

Arif Satria



.117

PENGANTAR SOSIOLOGI
MASYARAKAT
PESISIR

Diterbitkan atas Kerja Sama antara Fakultas Ekologi Manusia IPB
dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia

PENGANTAR SOSIOLOGI MASYARAKAT PESISIR

ARIF SATRIA

Diterbitkan atas Kerja Sama antara Fakultas Ekologi Manusia IPB
dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jakarta, 2015

Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir/Arif Satria; cet.: 1; ed. 2-
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015

xii + 150 hlm; 14,5 x 21 cm
ISBN: 978-979-461-935-3

Judul:

Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir
Arif Satria

Copyright ©2014, Arif Satria
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights reserved

Diterbitkan atas kerja sama antara Fakultas Ekologi Manusia IPB
dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Anggota IKAPI DKI Jakarta

Cetakan pertama: Juni 2015
YOI: 828.33.12.2015
Desain sampul: Anung H.

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jl. Plaju No. 10 Jakarta 10230
Tlp. 021-31926978; 3920114
Faks: 021-31924488
E-mail: yayasan_obor@cbn.net.id
[http: www.obor.or.id](http://www.obor.or.id)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
KATA PENGANTAR EDISI KEDUA	xi
BAB 1	
PENDAHULUAN	1
BAB 2	
KARAKTERISTIK SOSIAL MASYARAKAT PESISIR	7
BAB 3	
STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT PESISIR	38
BAB 4	
DINAMIKA PERUBAHAN TEKNOLOGI PERIKANAN DAN FORMASI SOSIAL	56
BAB 5	
KONFLIK-KONFLIK MASYARAKAT PESISIR	81
BAB 6	
KEMISKINAN MASYARAKAT PESISIR	92
BAB 7	
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN BERBASIS MASYARAKAT	107

Daftar Isi

BAB 8	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR	126
DAFTAR PUSTAKA	138
INDEKS	143
TENTANG PENULIS	148

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, buku *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir* ini terbit. Buku ini merupakan gagasan dan keinginan penulis sejak diberi kesempatan mengajar mata kuliah Sosiologi Perikanan di Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan FPIK-IPB. Tentu, keinginan itu muncul karena memang hingga saat ini penulis belum menemukan buku teks untuk mata kuliah tersebut. Mungkin sebenarnya buku itu ada, tetapi belum sempat ditemukan. Itulah yang kemudian mendorong penulis untuk secepatnya merampungkan buku ini, meski disadari sepenuhnya bahwa buku ini masih amat jauh dari sempurna karena ditulis hanya berdasar pada keberanian dan sedikit pengalaman dan pengetahuan. Perbedaan buku edisi revisi ini dengan yang terdahulu adalah, buku edisi revisi kali ini lebih disempurnakan konsep dan pengalaman penelitian di lapangan. Buku edisi revisi kali ini membawa pengetahuan yang relatif dinamis dan sesuai dengan isu-isu perikanan yang sedang berkembang dewasa ini. Namun, penulis yakin keberanian menulis buku ini sangatlah penting, apabila didorong oleh kebutuhan praktis dalam kegiatan perkuliahan. Paling tidak, buku ini dapat membantu mahasiswa mulai mengkaji fenomena sosial di dalam masyarakat pesisir.

Terbitnya buku ini tentu tidak lepas dari jasa berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu secara langsung maupun tidak secara langsung sehingga tidak memungkinkan penulis berterima

Kata Pengantar

kasih satu per satu. Namun, izinkan penulis menyebutkan beberapa orang di antaranya.

Pada kesempatan ini, penulis sangat berterima kasih kepada para guru dan dosen Sosiologi Perdesaan, khususnya kepada Pak Sajogyo, Pak Sediono Tjondronegoro, Pak Said Rusli, dan dosen lainnya. Selain itu penulis berterima kasih kepada Pak Didin S. Damanhuri yang telah mencerahkan penulis untuk berpikir secara strukturalis dan mendorong penulis untuk terus melahirkan karya-karya otentik.

Penulis sangat berterima kasih kepada Pak Rokhmin Dahuri yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada penulis untuk membantu beliau memimpin Departemen Kelautan dan Perikanan (sekarang Kementrian Kelautan dan Perikanan) serta yang telah membagi ilmu dan pengalamannya yang tentu sangat berharga bagi penulis. Tidak lupa, kepada Pak Tridoyo Kusumastanto yang terus memberikan kesempatan penulis untuk menambah pengalaman lapangan sehingga dapat mengenal dunia kelautan dan perikanan dari dekat.

Jasa rekan-rekan dosen di Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan (SEI) FPIK-IPB tidak dapat dilupakan juga. Merekalah yang sehari-harinya menemani penulis dan terus memberi semangat dan dorongan untuk melahirkan karya-karya yang bermanfaat. Kepada rekan-rekan Laboratorium Sosiologi dan Kelembagaan Jurusan SEI yang dipimpin oleh Ibu Ety Eidman yang memberi kepercayaan kepada penulis untuk memegang beberapa mata kuliah yang berbau sosiologi.

Tak lupa pula kepada Yoshiaki Matsuda Sensei dari Kagoshima University yang telah membuka mata penulis tentang dunia kelautan. Penulis pun berterima kasih kepada Pak Enang Haris beserta

pimpinan fakultas lainnya yang selama ini telah mendukung penulis. Kepada Pak Soleh Solahuddin dan Pak Bunasor, penulis sangat berterima kasih. Begitu pun kepada Pak Aman Wirakartakusumah beserta pimpinan IPB lainnya.

Kepada rekan-rekan kerja di DKP, khususnya Mas Pupup, Bang Barlan, Mas Didik, Budi, Ramli dan Dodik, penulis haturkan terima kasih. Tentu, termasuk Pak Andin Taryoto, Pak Saut, Pak Adi, Pak Sun'an, dan rekan-rekan di lingkungan Setjen beserta Pak Sudirman Saad yang terus menjadi teman diskusi yang menyenangkan. Rekan-rekan di Pusat Kajian Agraria (PKA) IPB, PKSPL IPB, kepada mereka sudah sepatutnya penulis berterima kasih.

Kepada mereka yang berjasa langsung, yaitu: Eva Anggraini, Suhana, Akhmad Solikhin yang secara tulus membantu menyelesaikan penulisan buku ini, penulis sangat berterima kasih. Karim yang bersedia mengoreksi di sana-sini serta rekan-rekan sejawat: Zulham, Tomas, Mimin, Sonhaji dan Fais. Tentu, tidak lupa pula kepada para mahasiswa jurusan FEI-IPB.

Kepada orang tua tercinta, Bapak Faruk Hasan dan Ibu Sri Utami, penulis berterima kasih atas ketulusan doa, kasih sayang dan bimbingannya selama ini. Khususnya kepada istri tersayang Retna Widayawati dan ananda Zafran Akhmadery yang mencurahkan kasih sayangnya dengan tulus sepanjang waktu dan terus menjadi inspirasi bagi penulis untuk berkarya. Kepada Mbak Nana dan Mas Budi sekeluarga, serta anggota keluarga besar Hasan Masrap di Jakarta dan Keluarga H. Soeratno di Teloyo. Terakhir, penulis sangat berterima kasih kepada PT Pustaka Cidesindo yang berkenan menerbitkan buku ini.

Bagi penulis, buku ini bukanlah akhir. Masih terus ada ikhtiar untuk selalu menyempurnakannya. Kesempurnaan itu sendiri tentu

Kata Pengantar

tidak pernah diketahui secara pasti kapan terwujud. Oleh karena itu, alangkah bersyukurnya penulis jika pembaca berkenan membantu untuk menyempurnakannya melalui kritik dan saran. Betapa pun, penulis berharap bukun ini dapat bermanfaat.

Bogor, Oktober 2002

Arif Satria

KATA PENGANTAR

Edisi Kedua

Buku *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir* ini merupakan revisi dari edisi yang pernah diterbitkan oleh Cidesindo tahun 2002. Karena semakin banyak permintaan mahasiswa, dosen dan peneliti agar buku tersebut diterbitkan lagi, maka penulis memandang hal tersebut sebagai sebuah tuntutan yang harus dipenuhi. Namun, pada saat yang sama penulis juga melihat bahwa edisi pertama buku tersebut memiliki sejumlah kekurangan. Tak ada cara lain selain penulis harus segera melakukan revisi terhadap naskah buku tersebut. Revisi difokuskan pada penambahan kasus-kasus sebagai ilustrasi sehingga bisa membuat pembaca semakin mudah memahami teori yang ada. Penambahan muatan studi kasus kajian-kajian pesisir dan perikanan di Indonesia menjadikan buku ini semakin berwarna dengan fakta lapangan yang beragam dan dinamis. Tentu diyakini sepenuhnya bahwa edisi revisi buku ini masih penuh dengan keterbatasan. Akan tetapi fokus pada keterbatasan yang berlebihan juga membuat buku ini tidak akan pernah selesai. Hanya keberanianlah yang membuat penulis berhenti fokus pada keterbatasan, dan lalu segera melangkah untuk menerbitkannya. Meski sulit juga bagi penulis untuk menahan rasa malu karena memang buku ini jauh dari sempurna. Semoga buku ini tetap bermanfaat.

Kata Pengantar

Atas terbitnya buku ini, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Juga terima kasih kepada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, sebagai tempat awal penulis mengabdikan dan belajar tentang perikanan. Secara khusus penulis berterima kasih pada Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia yang telah menerbitkan edisi revisi buku *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Tak lupa penulis berterima kasih kepada Rinto Andhi Suncoko dan Nur Hannah Muthohharoh yang secara tulus membantu proses penyelesaian buku edisi revisi *Pengantar Sosiologi Perikanan*. Juga kepada seluruh mahasiswa bimbingan yang skripsi dan tesisnya selalu menjadi inspirasi

Terakhir penulis berterima kasih kepada kedua orang tua Ayahanda Faruk Hasan dan Ibunda Sri Utami, serta istri tercinta Retna Widyawati, dan kedua buah hati kami, Zafran Akhmadery Arif dan Sweetyandari Nidya Areefa, penulis sampaikan terima kasih sedalam-dalamnya.

Kritik dan masukan sangatlah diharapkan, karena dengan itulah proses mencari kebenaran tak akan pernah henti.

Bogor, Oktober 2014

Arif Satria

BAB 1

PENDAHULUAN

Sosiologi masyarakat pesisir merupakan bidang kajian sosiologi yang relatif baru berkembang di Indonesia. Padahal, seperti diketahui, secara geografis bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan, yang lautnya mencapai 70 persen dari total wilayah. Kondisi laut yang demikian luas dan sumber daya alam yang begitu besar pada kenyataannya belum mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Salah satu sebabnya adalah pelaku usaha perikanan masih didominasi nelayan tradisional. Kondisi ini bukanlah suatu yang independen, melainkan merupakan akibat dari pilihan politik pembangunan masa lalu yang terlalu pro-darat dan mengabaikan kelautan. Akibatnya, masyarakat pesisir kurang berkembang dan terus dalam posisi marginal.

Namun, dewasa ini mulai muncul kesadaran pentingnya pembangunan yang lebih memfokuskan pada kelautan, misalnya, berdirinya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Diharapkan dengan adanya DKP, program-program pembangunan kelautan dan perikanan dapat dijalankan secara sistematis sehingga menghasilkan masyarakat yang sejahtera, khususnya masyarakat pesisir.

Ketika pembangunan kelautan dan perikanan tengah marak-maraknya, muncul sejumlah pertanyaan seputar efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan. Pertanyaan itu

Pendahuluan

didasarkan pada fakta empiris yang menunjukkan masih kurang tepatnya berbagai pendekatan program. Akibatnya, program pembangunan tersebut gagal. Ada contoh menarik, yaitu satu provinsi yang ingin sekali nelayannya menjadi tangguh sehingga pemerintah provinsi tersebut menyediakan kapal yang relatif besar bagi para nelayan padahal selama ini menggunakan perahu-perahu tradisional kecil. Yang terjadi, kapal tersebut justru hingga saat ini tidak bisa digunakan para nelayan. Meskipun niatnya baik faktanya belum tentu sesuai harapan karena pendekatan yang kurang pas. Mereka tidak pernah terpikir sebelumnya bahwa untuk mengoperasikan sebuah kapal besar diperlukan keahlian yang cukup dan kemampuan teknis yang memadai. Belum lagi, modal yang cukup besar. Para nelayan tradisional jelas tidak punya modal yang cukup dan tidak punya kemampuan mengoperasikan armada yang begitu “modern”. Selain itu, kebiasaan *one day fishing* tidak begitu mudah diubah menjadi *one week fishing*, misalnya. Dengan menggunakan kapal besar, diharapkan nelayan akan melakukan kegiatan penangkapan di laut yang lebih jauh dan waktu yang diperlukan pun lebih lama. Namun, tentu ada konsekuensi-konsekuensi sosiologis dalam komunitas tersebut. Banyak peranan sosial yang akan hilang, yang semula dimainkan oleh nelayan semasa *one day fishing* tersebut. Peranan-peranan sosial itu patut dicarikan solusi penggantinya agar ketidaksimbangan sistem sosial yang selama ini telah mapan tetap lestari.

Contoh lainnya, banyak kalangan yang selalu menganggap jelek adanya pola patron-klien dalam masyarakat pesisir. Setiap kali ada program pemberdayaan, berbagai proposal guna memutus ikatan patron-klien disodorkan. Ada anggapan ikatan patron-klien hanyalah ikatan ekonomi yang mudah digantikan dengan ikatan-ikatan lainnya yang lebih formal, seperti koperasi. Langkah-langkah

praktis seperti itu saat ini begitu populer di kalangan para LSM, akademisi, bahkan birokrat. Begitu datang ke masyarakat pesisir, tidak jarang mereka langsung menawari nelayan bantuan dana untuk melunasi utang-utang para nelayan dan tengkulak atau tauke. Setelah utang lunas, diharapkan nelayan tidak lagi berhubungan dengan para tauke. Namun, tidak pernah disadari bahwa disadari bahwa ikatan mereka pun tidak semata ekonomi, melainkan juga sosial, yang dalam bahasa Wolf, tidak semata ikatan instrumental, melainkan juga ikatan emosional. Akibatnya, program pemutusan itu hanyalah bersifat sementara, karena program-program tersebut bersifat proyek yang memiliki batas waktu dan pembiayaan. Sementara itu, nelayan yang belum lunas utangnya akhirnya tidak bisa memutuskan hubungan dengan tauke secara abadi. Ketika masa proyek habis, tidak ada lagi yang mendampingi nelayan dalam membangun institusi ekonomi. Artinya, tidak ada lagi sumber jaminan sosial ekonomi selain dari tauke. Bisa dipastikan, jalan satu-satunya adalah kembali ke tauke.

Dari kedua contoh di atas, terlihat bahwa seolah-olah kita, para akademisi atau orang di luar komunitas pesisir, lebih tahu tentang bagaimana masyarakat pesisir dapat berkembang, tanpa ingin mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi masyarakat pesisir itu. Kalaupun tahu, kita sering memukul rata saja antara satu masyarakat pesisir dengan masyarakat pesisir lainnya. Masyarakat pesisir di pantura Jawa dianggap sama saja dengan di Kepulauan Riau atau Papua. Padahal, masyarakat pesisir di Indonesia memiliki keragaman yang sangat tinggi. Dari suku laut di Riau hingga para nelayan di kapal *long line* di Muara Baru Jakarta, terdapat perbedaan yang sangat kontras itu.

Ihwal suku laut merupakan fenomena tersendiri yang menarik juga dicermati. Selama ini suku laut terkenal sebagai representasi masyarakat bahari, yakni masyarakat yang memiliki jiwa bahari

Pendahuluan

dengan tradisi menjadikan laut sebagai basis terbentuknya kebudayaan. Hal ini disebabkan suku laut dulunya hidup berkelana menangkap ikan dengan sampan *berkajang*, yang ternyata juga sekaligus berfungsi sebagai rumah. Jadi, semua aktivitas kehidupan dilakukan di atas sampan tersebut. Meskipun saat ini sudah sulit ditemukan pola hidup suku laut yang demikian, mereka sudah hidup menetap di sepanjang wilayah pesisir dalam kondisi tradisional. Mayoritas masyarakat suku laut kini bermukim di sepanjang daerah aliran sungai dan wilayah pesisir dengan bakau sebagai ekosistemnya. Mereka tinggal di rumah panggung yang terbuat dari kayu dan beratap daun nipah atau rumbia. Di bawah rumah itu masih banyak genangan air dari air pasang. Jarak antarrumah umumnya berdekatan satu sama lain. Pola rumah yang demikian hanya mengandalkan ventilasi dari pintu depan dan belakang. Jalan penghubung dalam permukiman tersebut juga terbuat dari kayu dan dibangun dengan tonggak-tonggak kayu.

Seperti yang digambarkan dalam PKSPL (2001), kegiatan ekonomi penduduk suku laut di Indragiri Hilir yang utama adalah menangkap kerang, ikan, udang, dan mencari kayu di hutan bakau. Merawai dilakukan setiap hari oleh dua orang nelayan. Sistem bagi hasil yang digunakan adalah pendapatan bersih yang telah dikurangi sewa motor dan biaya minyak dibagi dua. Misalnya, penghasilan sehari sebesar Rp.100.000; setelah dikurangi sewa motor Rp.15.000 dan minyak Rp.5.000, pendapatan bersih menjadi Rp.80.000; jadi, masing-masing mendapatkan Rp.40.000. Meskipun salah satu nelayan merupakan pemilik perahu, sistem bagi hasil yang digunakan tetap sama seperti itu. Kegiatan penangkapan oleh nelayan dikenai retribusi/trayek melaut sebesar Rp.5.750 untuk satu perjalanan. Biasanya pembayaran dilakukan untuk tiga kali perjalanan sebesar lebih kurang Rp.15.000.

Sosiologi Masyarakat Pesisir

Kondisi suku laut yang demikian berbeda sekali dengan masyarakat pesisir di Pekalongan, misalnya. Di Pekalongan sudah tidak ditemukan lagi perahu tanpa motor. Kapal-kapal besarlah, seperti kapal *purse seine* atau *mini purse seine* yang dominan. Pola bagi hasilnya pun jauh berbeda. Kondisi di Pekalongan berbeda pula dengan di Indramayu, dan seterusnya. Artinya, tipologi masyarakat pesisir dapat dirumuskan berdasarkan tingkat perkembangan ekonomi, sistem sosial, dan kondisi ekosistemnya.

Di sinilah semakin terasa bahwa untuk membangun masyarakat pesisir, diperlukan pemahaman sosiologi masyarakat pesisir. Sosiologi masyarakat pesisir berbeda dengan sosiologi pertanian yang basisnya adalah kegiatan pertanian di darat. Sosiologi masyarakat pesisir ini direkonstruksi dari berbasis sumber daya. Sosiologi perdesaan berbasis *society*, sementara sosiologi masyarakat pesisir lebih berbasis sumber daya. Kajian-kajian sosiologi di dalamnya bersumber dari berbagai aktivitas masyarakat yang terkait dengan sumber daya perikanan.

Namun, sosiologi masyarakat pesisir ini belumlah berkembang. Belum banyak sosiolog yang menaruh perhatian pada masyarakat pesisir ini. Akibatnya, semakin sulit pula kita untuk menemukan literatur-literatur tentang masyarakat pesisir ini. Faktor inilah, salah satunya, yang mendorong kami menulis dan menerbitkan buku *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir* ini. Sebagai karya pertama, disadari sepenuhnya bahwa buku ini belumlah sampai pada kemampuan menganalisis setiap tipe masyarakat pesisir yang ada. Diharapkan, dalam ke depannya, penulis dapat memberikan karya yang lebih bernas kepada masyarakat. Untuk buku ini, yang dapat disajikan berupa paparan singkat tentang masyarakat pesisir, berdasarkan hasil riset dan teori-teori yang ada. Tujuan buku ini

Pendahuluan

memang mengantarkan bagi mereka yang ingin mulai belajar tentang sosiologi masyarakat pesisir.

Buku ini terdiri atas delapan bab. Bab I berisi tentang mengapa perlunya mempelajari sosiologi masyarakat pesisir. Bab II menganalisis karakteristik sosial masyarakat pesisir. Di dalamnya dikupas juga tentang apa itu nelayan dan tipologi nelayan. Dalam Bab II ini, tampak karakteristik masyarakat pesisir yang dianalisis bias ke nelayan. Padahal, masyarakat pesisir tidak hanya nelayan, melainkan juga pembudi daya ikan, pengolah ikan, pedagang, dan seterusnya. Bab III berfokus pada struktur sosial masyarakat pesisir yang dicirikan dengan pola patron-klien. Juga di dalamnya disajikan bagaimana metode untuk menyusun stratifikasi sosial masyarakat pesisir. Bab IV berisi tentang transformasi teknologi perikanan dan dampaknya terhadap sistem sosial. Bab V menganalisis tentang konflik-konflik nelayan. Di dalamnya memuat tipologi konflik nelayan yang memang sangat beragam itu. Bab VI megupas tentang teori kemiskinan dan relevansinya untuk konteks masyarakat pesisir. Bab VII berisi tentang pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat. Terakhir, Bab VIII mencoba mengantarkan konsep pemberdayaan masyarakat pesisir disertai model yang selama ini digunakan pemerintah dalam program-program pembangunannya.

BAB 2

KARAKTERISTIK SOSIAL MASYARAKAT PESISIR

Secara sosiologis, karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris karena perbedaan karakteristik sumber daya yang dihadapi. Masyarakat agraris yang direpresentasi oleh kaum tani menghadapi sumber daya yang terkontrol, yakni pengelolaan lahan untuk produksi suatu komoditas dengan hasil yang relatif bisa diprediksi. Sifat produksi yang demikian memungkinkan tetapan lokasi produksi. Ini menyebabkan mobilitas usaha yang relatif rendah dan elemen risiko pun tidak besar. Dalam hal ini, pembudi daya ikan dapat tergolong masyarakat petani karena relatif miripnya sifat sumber daya yang dihadapi, yakni, pembudi daya mengetahui berapa, di mana, dan kapan ikan ditangkap sehingga pola pemanenan lebih terkontrol. Pola pemanenan yang terkontrol tersebut tentu disebabkan adanya masukan yang terkontrol pula. Pembudi daya ikan tahu berapa masukan produksi (benih, makanan, teknik, dsb) yang mesti tersedia untuk mencapai hasil yang akan diinginkan.

Karakteristik tersebut berbeda sama sekali dengan nelayan. Nelayan menghadapi sumber daya yang hingga saat ini masih bersifat akses terbuka (*open access*). Karakteristik sumber daya seperti ini menyebabkan nelayan mesti berpindah-pindah untuk

Karakteristik Sosial Masyarakat Pesisir

memperoleh hasil maksimal, yang dengan demikian elemen risiko menjadi sangat tinggi. Kondisi sumber daya yang berisiko tersebut menyebabkan nelayan memiliki karakter keras, tegas, dan terbuka.

Namun, tidak sedikit nelayan yang juga merangkap sebagai petani. Hal ini ditunjang oleh kondisi ekosistem yang memang memungkinkan, seperti tersedianya areal lahan persawahan di sekitar pantai. Ada musim-musim tertentu bagi nelayan untuk turun ke sawah, sementara pada musim lainnya mereka kembali melaut. Rangkaian pekerjaan tersebut merupakan bagian dari pola adaptasi masyarakat pesisir terhadap kondisi ekologi yang mereka hadapi.

Akan tetapi, menurut Firth (1946) masyarakat nelayan tersebut memiliki kemiripan dengan masyarakat tani, yakni bahwa sifat usahanya berskala kecil dengan peralatan dan organisasi pasar yang sederhana; eksploitasi yang sering berkaitan dengan masalah kerja sama; sebagian besar menyangandarkan diri pada produksi yang bersifat subsisten; dan memiliki keragaman dalam tingkat dan perilaku ekonominya.

Karakteristik Sosial Masyarakat Pesisir

Hal yang penting dipahami sebelum membahas karakteristik sosial masyarakat pesisir, khususnya kaum nelayan, adalah tentang konsep masyarakat itu sendiri. Telah banyak definisi tentang masyarakat. Salah satunya, Horton *et al* (1991) mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut. Ada lagi Ralph Linton (1956) dalam Sitorus *et. al* (1998) yang mengartikan masyarakat sebagai kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap

Sosiologi Masyarakat Pesisir

diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan secara jelas. Sementara itu, Soerjono Soekanto (1995) memerinci unsur-unsur masyarakat sebagai berikut:

- (a) Manusia yang hidup bersama,
- (b) Mereka bercampur untuk waktu yang lama,
- (c) Mereka sadar sebagai suatu kesatuan, dan
- (d) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Tabel 1. Matriks Masyarakat

Unsur-unsur Pengikat Satuan Sosial	Kerumunan	Golongan Sosial	Kategori Sosial	Jaringan Sosial	Kelompok Sosial	Himpunan	Komunitas
Pusat orientasi	*	±	+	+	+	+	-
Sarana Interaksi	-	±	-	*	+	+	+
Aktivitas Interaksi	±	±	-	*	+	+	+
Kesinambungan	-	*	±	±	+	+	*
Identitas	-	*	-	±	*	*	*
Lokasi	0	±	0	±	±	±	*
Sistem Adat dan Norma	-	*	*	±	+	+	-
Organisasi Tradisional	-	-	-	±	*	-	+
Organisasi Buatan	-	-	-	±	-	*	+
Pimpinan	±	-	-	±	*	*	+

+ : ada

- : tidak ada

± : Mungkin ada mungkin tidak

0 : tidak relevan

* : unsur pengikat dasar

Sumber: Koentjaraningrat (1990)

Untuk membedakan pengertian masyarakat dari satuan-satuan sosial lainnya, Koentjaraningrat (1990) membuat suatu matriks

masyarakat. Dalam hal ini, tampaknya Koentjaraningrat cenderung memaknai masyarakat sebagai komunitas. Matriks ini terdiri dari sumbu horizontal yang merupakan satuan-satuan sosial dan sumbu vertikal yang merupakan unsur pengikat satuan sosial tersebut. Satuan-satuan sosial tersebut mencakup kerumunan, golongan sosial, kategori sosial, jaringan sosial, kelompok, himpunan, dan komunitas. Sementara itu, unsur pengikat tersebut mencakup pusat orientasi, sarana interaksi, aktivitas interaksi, kesinambungan, identitas, lokasi, sistem adat dan norma, organisasi tradisional, organisasi buatan, dan pimpinan. Masih menurut Koentjaraningrat (1990), “identitas tempat” merupakan unsur pengikat yang penting dan dapat membedakannya dari satuan sosial lainnya.

Namun, ketika membicarakan masyarakat pesisir, ada baiknya menempatkannya sebagai bagian dari kesinambungan peradaban sebagaimana sering diungkapkan Redfield. Menurut Redfield (1941), dalam Koentjaraningrat (1990) ada empat tipe komunitas, yaitu *city* (kota), *town* (kota kecil), *peasant vilage* (desa petani), dan *tribal vilage* (desa terisolasi) dengan setiap komunitas tersebut memiliki karakteristik kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Proses transformasi dari desa terisolasi ke kota ditandai dengan: (1) pengenduran adat-istiadat, (2) sekularisasi, dan (3) individualisasi.¹ Merujuk pada klasifikasi Redfield tersebut, masyarakat pesisir berada pada setiap tipe komunitas. Namun, di Indonesia kebanyakan masyarakat pesisir merupakan representasi tipe komunitas desa petani dan desa terisolasi. Meski demikian, masyarakat pesisir (khususnya yang bergerak di kegiatan perikanan) pada umumnya mencirikan apa yang disebut Redfield sebagai kebudayaan *folk*.²

1 Koentjaraningrat (1990).

2 Menurut Redfield dalam Koentjaraningrat (1990) kebudayaan *folk* berada dalam masyarakat petani perdesaan (*peasant society*) tetapi juga pada penduduk kota yang

Selanjutnya Redfield (1962) sebagaimana dikutip Dharmawan (2001)³ menjelaskan lebih jauh tentang karakteristik *folk-society* sebagai berikut:

"...Thus we may characterize the folk society as small, isolated, nonliterate, and homogenous, with a strong sense of group solidarity.. There is no much division of labor in the folk society: what one person does is what another does...In the ideal folk society all the tools and ways of production are shared by everybody...For the obvious exception to the homogeneity of the folk society lies in the differences between what men do and know what women do and know... Of the ideal folk society as a group economically independent of all others: the people produce what they consume and consume what they produce...The ways in which the members of the society meet the recurrent problems of life are conventionalized ways; they are the result of long intercommunication within the group in the face of these problems; and conventionalized ways have become interrelated within one another so that they constitute a coherent and self-consistent system. Such a system is what we mean in saying that the folk society is characterized by 'a culture'...The member of folk society are guided in acting by previously established comprehensive and interdependentconventional understandings...In the folk society conventional behavior is strongly patterned: it tends to conform to a type or a norm..."

Lebih jauh, Redfield melihat bahwa kebudayaan *folk* tersebut dapat diteliti pada komunitas kecil. Dalam konteks masyarakat pesisir, masyarakat desa terisolasi (masyarakat pulau kecil) dan

bersifat rakyat umum, yaitu penduduk yang tidak termasuk golongan elit atau yang berkedudukan tinggi.

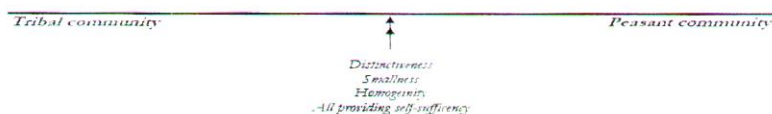
3 Dharmawan, Arya Hadi. 2001. *Farm Household Livelihood Strategies and Socio Economic Changes in Rural Indonesia*. Kiel: Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG.

Karakteristik Sosial Masyarakat Pesisir

masyarakat desa pantai dapat merupakan gambaran wujud komunitas kecil itu yang memiliki beberapa ciri,⁴ yaitu:

- (1) Mempunyai identitas yang khas (*distinctiveness*),
- (2) Terdiri atas sejumlah penduduk dengan jumlah yang cukup terbatas (*smallness*) sehingga masih saling mengenal sebagai individu yang berkepribadian,
- (3) Bersifat seragam dengan diferensiasi terbatas (*homogeneity*),
- (4) Kebutuhan hidup penduduknya sangat terbatas sehingga semua dapat dipenuhi sendiri tanpa bergantung pada pasaran luar (*allproviding self sufficiency*).

Komunitas kecil tersebut sebenarnya dapat dibagi-bagi lagi dalam sebuah garis kontinuitas yang menempatkan komunitas terisolasi (*tribal community*) pada titik ujung kiri dan komunitas petani (*peasant community*) pada titik ujung kanan. Komunitas kecil pada titik ujung kiri memiliki empat sifat di atas secara berlebihan, sementara komunitas kecil pada ujung kanan telah mengalami pengenduran keempat ciri tersebut. Sementara itu, antara dua titik ujung tersebut berisi variasi-variasi tipe komunitas kecil yang tempatnya bergantung pada banyak sedikitnya ciri yang dimiliki.⁵



Gambar 1. Garis Kontinuitas Komunitas Kecil.

4 Lihat Koenjaraningrat (1990) yang mengesktraksi cirri-ciri komunitas kecil dari Redfield (1955)

5 Koenjaraningrat (1990) hlm 141

Pada ujung kanan, *peasant community* didefinisikan oleh Redfield sebagai suatu “ ... masyarakat kecil yang tidak terisolasi, dan tidak memenuhi semua kebutuhan hidup penduduknya. Di satu pihak, mereka mempunyai hubungan horizontal dengan komunitas-komunitas petani lain di sekitarnya, tetapi di pihak lain juga secara vertikal memiliki hubungan dengan komunitas-komunitas di daerah perkotaan.⁶

Dalam Koentjaraningrat (1990), digambarkan pula bahwa Redfield menganggap bahwa suatu komunitas kecil adalah bagian yang terintegrasi dari lingkungan alam, tempat komunitas kecil itu berada, sehingga suatu komunitas kecil merupakan suatu sistem ekologi dengan masyarakat dan kebudayaan penduduk serta lingkungan alam setempat sebagai dua unsur pokok. Fenomena itu berada dalam suatu lingkaran pengaruh timbal balik yang mantap. Dengan demikian, tipe komunitas kecil pada masyarakat pesisir merupakan sistem ekologi, yang dapat menggambarkan betapa kuatnya interaksi antara masyarakat pesisir dengan lingkungan pesisir dan laut.⁷

Selanjutnya, hal tersebut dapat diterangkan dengan mengacu pada pemikiran Kluckhohn tentang hakikat hidup manusia. Bila meminjan kerangka Kluckhohn, masyarakat pesisir yang bertipe desa pantai dan desa terisolasi dicirikan oleh sikapnya terhadap alam dan manusia. Terhadap alam, umumnya mereka ada yang tunduk dan ada pula yang berusaha menjaga keselarasan dengan alam. Sikap tunduk itu dilatarbelakangi pandangan mereka bahwa alam memiliki kekuatan magis, yang bila mengacu pada pemikiran August Comte sikap tersebut merupakan salah satu ciri dari tahap teologis dalam perkembangan masyarakat. Upaya sedekah laut atau *nadran*

6 Koentjaraningrat (1990) hlm 141

7 Koentjaraningrat (1990)

Karakteristik Sosial Masyarakat Pesisir

sebenarnya merupakan bagian dari sikap ketundukan pada alam laut. Sementara adanya *awig-awig* di Lombok atau *sasi* di Maluku, misalnya, merupakan salah satu bentuk sikap masyarakat pesisir yang hendak selaras dengan alam. Tentu ciri masyarakat pesisir di dua tipe komunitas tersebut berbeda dengan tipe kota kecil dan kota besar, dengan masyarakat di dalamnya memiliki kecenderungan menguasai alam lewat praktik-praktik pembangunan yang merusak alam serta bercirikan individualisme yang menilai tinggi usaha atas kemampuan sendiri.

Tabel 2. Kerangka Kluckhohn

Orientasi Nilai Budaya			
Pandangan manusia terhadap alam (MA)	Manusia tunduk kepada alam yang dahsyat	Manusia berusaha menjaga keselarasan dengan alam	Manusia berhasrat menguasai alam
Hakekat hubungan antara manusia dengan sesamanya (MM)	Orientasi kolatral (horizontal), rasa ketergantungan pada sesamanya (berjiwa gotong royong)	Orientasi vertikal, rasa ketergantungan kepada tokoh tokoh atasan yang berpangkat	Individualisme menilai tinggi usaha atas kekuatan sendiri

Sumber: Koentjaraningrat (1990)

Sementara itu, lebih jauh untuk menjelaskan tipe solidaritas pada masyarakat *folk* tersebut, perlu digunakan kerangka Emile Durkheim yang membagi tipe solidaritas menjadi dua, yakni tipe solidaritas mekanik dan tipe solidaritas organik. Ciri solidaritas mekanik ditandai dengan masih kuatnya kesadaran kolektif (*collective conscience*) sebagai basis ikatan sosial. Hal ini disebabkan oleh homogenitas masyarakat mengingat masyarakat tersebut belum mengalami *division of labour* sebagaimana masyarakat perkotaan. Sistem hukumnya juga bersifat represif sebagai bentuk

kemarahan kolektif yang juga berarti belum berlakunya hukum formal dalam mengatur kehidupan. Maraknya pembakaran kapal atau perahu oleh nelayan lokal karena menggunakan alat tangkap terlarang merupakan salah satu potret bagaimana sistem hukum represif yang berlaku dalam masyarakat pesisir tersebut. Hal ini berbeda sekali dengan sistem hukum pada tipe solidaritas organik yang lebih menekankan hukum restitutif yang bersifat memulihkan. Hukum restitutif berfungsi mempertahankan atau melindungi pola saling ketergantungan yang kompleks antarberbagai individu yang berspesialisasi atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam tipe hukum ini, sanksi yang diberikan bersifat memulihkan keadaan dan bukan balas dendam. Secara ringkas sifat-sifat pokok dari dua tipe solidaritas tersebut dapat dilihat dalam kerangka berikut:

Tabel 3. Perbedaan Tipe Solidaritas Mekanik dan Organik

Solidaritas Mekanik	Solidaritas Organik
Pembagian Kerja Rendah	Pembagian Kerja Tinggi
Kesadaran Kolektif Kuat	Kesadaran Kolektif Lemah
Hubungan Represif Dominan	Hukum Restitutif Dominan
Konsensus Terhadap Pola-pola normatif itu Penting	Secara Relatif Saling Ketergantungan itu Tinggi
Secara Relatif Saling Ketergantungan itu Rendah	Secara Relatif Saling Ketergantungan itu Tinggi
Bersifat Primitif atau Perdesaan	Bersifat Industrial Perkotaan

Sumber: Johnson (1986)

Untuk lebih memperjelas karakteristik masyarakat pesisir sebagai representasi tipe komunitas desa pantai dan desa terisolasi tersebut, berikut ini akan diuraikan secara singkat dari berbagai

aspek, yaitu: (1) sistem pengetahuan, (2) sistem kepercayaan, (3) peran perempuan, (4) struktur sosial, dan (5) posisi sosial nelayan.

1. Sistem Pengetahuan

Pengetahuan tentang teknik penangkapan ikan umumnya didapatkan dari warisan orang tua atau pendahulu mereka berdasarkan pengalaman empiris. Kuatnya pengetahuan lokal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor penyebab terjaminnya kelangsungan hidup mereka sebagai nelayan. Seperti digambarkan Juwono (1998), para nelayan di Desa Kirdowono menggunakan *dugo-dugo*, yakni seutas tali dengan batu pemberat untuk mengetahui arah dan kekuatan aliran arus sekaligus kedalaman laut. Arah arus dapat diketahui dari kecenderungan tali *dugo-dugo* setelah dimasukkan ke laut. Sementara itu, kekuatan arus dapat dirasakan oleh tangan si pemegang *dugo-dugo*.

Begitu pula untuk sistem kalender dan penunjuk arah, para nelayan di Kirdowono menggunakan rasi-rasi bintang tertentu. Seperti digambarkan Juwono (1998), mereka mengenal enam buah rasi bintang yang muncul secara bergantian sepanjang tahun, yakni *Lintang Lumbang*, *Lintang Waluku*, *Lintang Wuluh*, *Lintang Gubug*, dan *Lintang Lanjar*. Sebagai penunjuk arah, nelayan mengenal *Lintang Prau* yang menunjuk arah utara. Namun, bila melakukan pelayaran malam dan langit mendung, penentuan arah dilakukan dengan membaca arah arus. Pada saat *Lintang Wuluh* muncul arus laut pada malam hari bergerak ke barat; pada saat *Lintang Waluku* muncul pada malam hari, arus bergerak dari utara dengan kecepatan rendah; saat *Lintang Lanjar* muncul di malam hari arus mengalir deras ke timur.

Begitu pula yang terjadi pada masyarakat suku laut.⁸ Sistem pengetahuan tradisional nelayan suku laut terhadap lingkungan hidupnya cukup tinggi. Hanya saja, karena belum dibarengi dengan pengetahuan modern tentang dunia luar, kebanyakan nelayan kurang mampu memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia dibanding masyarakat miskin lainnya. Cukup banyak pengetahuan tradisional nelayan suku laut yang bersifat positif dan perlu dikembangkan, seperti pengetahuan tentang kondisi dan rahasia alam yang berkaitan dengan musim ikan, tingkah laku organisme laut, dan berbagai keterampilan tradisional.

Nelayan suku laut mengenal konsep “**Perbani**” yaitu suatu kondisi air laut pada saat surut atau pasang tanggung, saat air laut berwarna merah dan tenang. Ilustrasi tentang suku laut bersumber dari pengalaman penulis melakukan studi di Indragiri hilir dalam sebuah kegiatan yang dilakukan PKSPL IPB Tahun 2001. Saat demikianlah diyakini sebagai kondisi banyak ikan. Pada saat air dalam berwarna hijau kemerah-merahan, dipercayai ikan-ikan besar banyak berkeliaran. Sebaliknya, jika kondisi air banyak mengandung ulat air atau “*ekor-ekor*”, menurut bahasa khas nelayan suku laut, diyakini kondisi-kondisi air laut tidak ada ikan.

Pengetahuan lainnya adalah tentang pemeliharaan sampan (perahu) melalui cara pengasapan badannya dengan membakar daun nipah dalam waktu tertentu agar kayu sampan (perahu) awet dan tidak dimakan binatang laut, seperti kapang (merusak dan pelobang kayu) dan krikip (binatang yang menempel di kayu). Selain itu, suku nelayan Duano juga ahli dalam pekerjaan menacak tongkat dengan memanfaatkan ilmu gaya berat melalui pasang-surut air laut dan

⁸ Ilustrasi tentang suku laut bersumber dari pengalaman penulis melakukan studi di Indragiri hilir dalam sebuah kegiatan yang dilakukan PKSPL IPB tahun 2001

terampil pula dalam dunia selam-menyelam yang diwariskan secara turun-temurun.

Pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) tersebut merupakan kekayaan intelektual mereka yang hingga kini terus dipertahankan. Bahkan, dalam beberapa literatur ekonomi sumber daya, *indigenous knowledge* tersebut mendapat tempat sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan, seperti dalam metode RAPFISH (*Rapid Appraisal for Fisheries*). Perihal ini yang mesti dikembangkan lebih jauh, bahwa sudah sepatutnya sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat nelayan dihargai dan sekaligus dikombinasikan dengan temuan modern dari lembaga riset ataupun perguruan tinggi.

2. Sistem Kepercayaan

Secara teologis, nelayan masih memiliki kepercayaan cukup kuat bahwa laut memiliki kekuatan magis, sehingga diperlukan perlakuan-perlakuan khusus dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan agar keselamatan dan hasil tangkapan semakin terjamin. Tradisi tersebut, antara lain, masih dipertahankannya tradisi *sowan* ke *suhu* atau dukun-dukun dalam rangka mendapatkan “keselamatan” saat melaut dan memperoleh hasil tangkapan yang baik (*along*). Sebagai contoh, hampir semua nelayan nakhoda yang berasal dari Wonokerto Pekalongan melakukan hal tersebut. Dalam setiap misi penangkapan ikan, memang nakhodalah yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan maupun hasil tangkapan.

Para *suhu* menganjurkan agar sebelum menangkap ikan, khususnya ketika kapal baru sampai di muara, para ABK harus menyalakan *dupo* atau *menyan* (wewangian) di sekitar kapal. Pada saat melempar jaring ke laut, nelayan harus menebarkan bungabunga di sekitar jaring. *Suhu* tersebut dianggap memiliki kontribusi bagi kesuksesan mereka menangkap ikan. Tanpa *sowan* ke *suhu*, mereka

seolah-olah kurang percaya diri untuk melaut. Sebagai penghargaan atas jasa-jasa para *suhu*, dalam sistem bagi hasil ada bagian yang harus diberikan kepada *suhu* tersebut, yakni biasanya satu bagian.

Selain dengan *sowan* ke *suhu*, di Pekalongan masih dikembangkan tradisi *cadranan*, yakni upacara rutin yang dilakukan setiap pertengahan bulan *Suro* (Muharram) oleh para nelayan dalam rangka memberikan sesajian untuk “penghuni” di sekitar pantai utara Jawa. Sesajian tersebut berupa kepala kerbau dan beberapa jenis makanan yang disusun di atas sebuah tumpeng, dan diletakkan di sebuah kapal kecil. Kapal tempat tumpeng tersebut lalu dilayarkan ke laut, dan diiringi oleh ratusan kapal-kapal nelayan. Selanjutnya, seluruh kapal harus berjalan mengelilingi kapal sesajian yang kecil itu secara terus-menerus (Satria 2001). Acara *cadranan* tidak semata-mata dilakukan di Pekalongan melainkan juga di wilayah pantai lainnya, baik di utara maupun selatan Jawa dengan istilah yang bermacam-macam, seperti *pesta laut* dan *sedekah laut*.

Begitu pula di Kirdowono, perawatan perahu pun dilakukan secara magis. Seperti digambarkan Juwono (1998), perahu telah dipersonifikasi seperti manusia yang bisa sakit dan harus diobati. “Pengobatan” perahu tersebut dilakukan melalui *kosokan* atau penggosokan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- (1) Badan perahu dan palka di dalamnya dibersihkan, dan lumut-lumut yang menempel digosok dengan sabut kelapa atau pasir hingga bersih;
- (2) Perahu dicuci dengan air cucian beras atau *banyu leri* yang direndami daun pinang (*areca cathecu*), alang-alang (*Impererata cylindrica*), dan klayu, daun *galing* (*Vitis trifolia*), abu merang padi ketan hitam, dan berlian;

- (3) Badan perahu dilumuri dengan *sambetan*, yaitu rampan rempah-rempah yang terbuat dari lempuyang, kunir, adas pulasari, dan jahe. Air cucian beras dan sambetan ini didapatkan dari dukun;
- (4) Pemilik perahu mengadakan selamatan kecil di perahu dengan sesajian dan kemenyan disertai doa agar perahunya membawa rezeki yang besar dan terlindung dari bahaya.

Sistem kepercayaan tersebut hingga saat ini masih mencirikan kebudayaan nelayan. Namun, seiring perkembangan teologis berkat meningkatnya tingkat pendidikan atau intensitas pendalaman terhadap nilai-nilai agama, upacara-upacara tersebut bagi sebagian kelompok nelayan hanyalah sebuah *ritualisme*. Maksudnya, suatu tradisi yang terus dipertahankan meskipun telah kehilangan makna sesungguhnya. Jadi, tradisi tersebut dilangsungkan hanya sebagai salah satu instrumen stabilitas sosial dalam komunitas nelayan.

3. Peran Perempuan

Aktivitas ekonomi perempuan merupakan gejala yang sudah umum bagi kalangan masyarakat strata bawah, tak terkecuali perempuan yang berstatus sebagai istri nelayan. Istri nelayan umumnya, selain banyak bergelut dengan urusan domestik rumah tangga, juga tetap menjalankan fungsi-fungsi ekonomi, baik dalam kegiatan penangkapan di perairan dangkal (seperti *beachseine*), pengolahan ikan, maupun kegiatan jasa dan perdagangan. Ada satu rumusan yang diungkapkan Pollnac (1988), yaitu pembagian kerja keluarga nelayan adalah pria menangkap ikan dan anggota keluarga yang perempuan menjual ikan hasil tangkapan tersebut. Peran perempuan ini merupakan faktor penting dalam menstabilkan ekonomi pada beberapa masyarakat penangkap ikan karena pria mungkin menangkap ikan hanya kadang-kadang sementara perempuan bekerja sepanjang tahun. Hal ini juga sejalan dengan

hasil penelitian Andriati (1992) *dalam* Kusnadi (2000), yang mengungkapkan bahwa salah satu strategi adaptasi yang ditempuh oleh rumah tangga nelayan dalam mengatasi kesulitan ekonomi rumah tangga adalah dengan mendorong istri mereka untuk ikut mencari nafkah. Yang lebih menarik lagi adalah bahwa ternyata istri nelayan tersebut juga dominan dalam mengatur pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Dengan begitu, sudah sepatutnya peranan istri-istri nelayan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam setiap program pemberdayaan.

Memang istri nelayan pada umumnya hanya menjalankan fungsi domestik dan ekonomi, dan tidak sampai pada wilayah sosial politik. Namun, kalau dicermati sebenarnya istri nelayan juga kreatif dalam menciptakan pranata-pranata sosial yang penting bagi stabilitas sosial pada komunitas nelayan. Hal ini tampak, misalnya, pada acara pengajian, arisan, serta simpan pinjam, yang juga memiliki makna penting dalam membantu mengatasi ketidakpastian penghasilan ekonomi (Kusnadi 2000). Karena itu, peran sosial istri nelayan tersebut tidak bisa dipandang kecil.

4. Posisi Sosial Nelayan

Posisi sosial nelayan dalam masyarakat juga menarik dicermati baik secara kultural maupun struktural. Hal ini disebabkan di kebanyakan masyarakat, nelayan memiliki status yang relatif rendah. Lihat saja di India pada umumnya nelayan tergolong berkasta rendah (Pollnac 1988). Di Jepang saat ini juga posisi nelayan mengalami degradasi status sehingga mengalami problem regenerasi nelayan. Imbasnya, kalangan muda yang bersedia menjadi nelayan sedikit meskipun dijanjikan akan memperoleh berbagai fasilitas subsidi dari pemerintah. Menurunnya status nelayan di Jepang juga diindikasikan oleh menurunnya minat perempuan Jepang untuk mendapatkan suami seorang nelayan. Rendahnya

posisi nelayan secara kultural juga digambarkan Firth (1971) dalam buku terkenalnya *Malay Fishermen: Their Peasant Economy*.. Dalam buku itu Firth menggolongkan nelayan sebagai *peasant* yang memiliki karakteristik “*disrespect, implying not merely a low economic level and small-scale semisubsistence production, but also a low cultural, even intellectual position.*”⁹

Kendati status mereka rendah, keluarga nelayan sangat bangga dengan profesinya. Seperti dituliskan Goodwin ketika mengutip penuturan salah seorang istri nelayan:

“We don’t think you know how much we appreciate the hard, exhausting, and dangerous work you do, or that we understand what your blood, sweat, and tears produces. We are thankful for our home, our treasures, and the food we eat. We don’t know how to reach you anymore. Our lives as vast as the sea from which you fish. We want to love you and respect you...Every time you leave, you take other people’s souls with you. We sit looking at the fullmoon, wondering how and when you’re. The kids draw pictures of your boat and tell everyone with such pride in their eyes, “My daddy’s a fisherman”.

Rendahnya posisi sosial nelayan juga diakibatkan keterasingan nelayan. Keterasingan tersebut menyebabkan masyarakat nonnelayan tidak mengetahui lebih jauh bagaimana dunia nelayan itu serta sedikitnya waktu dan kesempatan nelayan untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Tentu, ini disebabkan banyaknya alokasi waktu nelayan untuk kegiatan penangkapan ikan daripada untuk bersosialisasi dengan masyarakat nonnelayan yang memang secara geografis relatif jauh dari pantai.

Posisi sosial nelayan juga dapat dilihat secara politik. Menarik sebuah tesis yang dikemukakan oleh Goodwin (1990) dalam Satria

9 Dikutip dari Raymond Firth, 1966. *Malay Fishermen: Their Peasant Economy*

(2001), yakni salah satu ciri nelayan kecil (*small scale fisher*) adalah ketiadaan kemampuan untuk memengaruhi kebijakan publik, akibatnya nelayan terus dalam posisi dependen dan marjinal. Tesis ini mengimplikasikan kapital menjadi sangat dominan dalam menentukan posisi nelayan. Semakin besar penguasaan kapital, maka semakin besar pula kesempatan untuk memengaruhi proses politik. Kekuatan ekonomi atau kapital mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan kehidupan politik, hukum, dan sosial.

Kalau kita gunakan perspektif Marxis, faktor kapital memang merupakan kunci dalam terbentuknya kelas-kelas sosial. Semakin besar penguasaan kapital, maka semakin besar kesempatan menempati kelas atas. Semakin ke atas kelas sosialnya maka semakin besar pula kesempatan untuk memengaruhi proses politik, kebijakan publik, dan seterusnya. Pandangan kaum Marxis yang demikian merupakan turunan dari filsafat materialisme yang dikembangkan Karl Marx dan Engels. Intinya, masyarakat sebenarnya terdiri dari dua komponen pokok, yakni (1) infrastruktur (cara produksi yang terdiri dari kekuatan produksi—dalam konteks nelayan berupa kapal, alat tangkap, dan modal—dan hubungan produksi yang merujuk pada pemilikan atas kekuatan produksi), dan (2) suprastruktur (aspek kehidupan sosial, seperti politik, hukum, agama, dst). Dikatakan bahwa infrastruktur itulah yang akan menentukan suprastruktur, dan bukan sebaliknya. Artinya, kekuatan-kekuatan ekonomilah yang sebenarnya menentukan kehidupan politik, hukum, dan kehidupan sosial lainnya.

Kalau demikian halnya, maka posisi sosial nelayan akan secara otomatis meningkat seiring dengan peningkatan kapital mereka. Hal ini bisa terlihat dari HNSI yang pengurusnya adalah para elit nelayan bermodal. Merekalah yang mampu merespons

dan menyalurkan aspirasi terhadap suatu kebijakan. Sementara itu, para nelayan kecil tak bermodal masih merupakan “anak-bawang” dalam proses pengambilan keputusan, seperti dalam formulasi perundangan dan kebijakan pembangunan. Misalnya, dalam UU Perikanan Nomor 9/1985 tidak ada upaya eksplisit penyusun UU untuk memberikan perlindungan bagi institusi lokal yang secara historis eksis dan dipraktikkan para nelayan. *Sasi* yang merupakan salah satu bentuk kearifan tradisional dalam pengelolaan sumber daya pesisir tidak mendapat tempat dalam perundangan formal yang dibuat pemerintah. Nelayan tradisional pun tidak mampu berbuat apa-apa atas produk perundangan yang merugikan mereka. Padahal, kalau kita lihat, di negara lain yang menerapkan prinsip-prinsip liberal dalam pengelolaan sumber daya perikanan masih ada pengakuan terhadap tradisi lokal. Selandia Baru, misalnya, yang menerapkan sistem kuota ternyata memberikan kuota kepada Suku Maori sebesar 10 persen. Namun demikian, sejak penetapan UU No. 1/2014 tentang Perubahan atas UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, upaya pemerintah terhadap perlindungan institusi lokal mulai terlihat.

Selain tidak bisa berbuat banyak terhadap produk kebijakan yang diambil pemerintah, secara empiris nelayan juga tidak mampu berbuat banyak menghadapi praktik-praktik perikanan dan nonperikanan di wilayah pesisir yang ternyata sangat mengganggu aktivitas mereka. Beberapa contoh praktik yang hingga saat ini masih terus mengganggu, antara lain, praktik *trawl*, praktik kapal asing, dan penambangan pasir. Ketiga contoh tersebut lebih merupakan persoalan ekonomi politik dari hanya sekadar persoalan sosial biasa.

Praktik *trawl* masih terus menghantui masyarakat nelayan tradisional. Memang diakui bahwa *trawl* merupakan alat tangkap yang sangat efisien. Negara mana pun tidak ada yang melarang

beroperasinya *trawl*, kecuali mengaturnya melalui sistem zonasi. Namun, harus diingat bahwa di negara-negara maju *enforcement* dapat berjalan sehingga kehadiran *trawl* tidak terlalu bermasalah bagi nelayan non-*trawl*, meski ada pula kasus-kasus di Jepang yang menunjukkan bahwa ternyata *trawl* pun bermasalah.

Di Indonesia sendiri dengan mayoritas nelayannya masih tradisional, tampaknya praktik *trawl* masih sulit diterima, kecuali pada wilayah-wilayah tertentu yang formasi sosialnya sudah modern, seperti di Pekalongan dan pesisir Jawa lainnya. Hal ini terbukti dengan berkembangnya *cothok* atau *arad* yang hingga saat ini relatif tidak bermasalah. Berbeda dengan di Jawa, di luar Jawa (khususnya di wilayah kepulauan) kehadiran *trawl* sangat merugikan nelayan tradisional. Penghasilan nelayan secara signifikan menurun seiring berkembangnya mini *trawl* dan sejenisnya. Namun, nelayan tersebut tidak mampu menolak kehadiran *trawl* karena lemahnya posisi sosial mereka.

Isu *trawl* menjadi persoalan ekonomi politik ketika secara historis terlihat adanya peran “Angkatan Laut” dalam memaksakan kehadiran *trawl* di Pekalongan pada tahun 1970-an. Kehadiran *trawl* di Pekalongan merupakan hasil kolaborasi antara “Angkatan Laut” dengan para pemilik kapal dari Bagan Siapi-api, yang selanjutnya memicu konflik sosial cukup besar di Pekalongan waktu itu (Satria, 2001). Namun, apakah saat ini isu *trawl* masih merupakan isu ekonomi politik atau isu sosial biasa, tampaknya, diperlukan studi khusus untuk menjawab soal itu.

Lagi pula, menghadapi masalah kapal asing nelayan juga tidak bisa berbuat banyak, kecuali nelayan di Muara Angke yang mampu mengusir kapal-kapal asing. Bahkan, nelayan di pulau-pulau kecil seperti di Kepulauan Natuna kini semakin merasa terancam secara fisik sehingga ada beban psikologis (rasa takut) untuk melaut.

Tentunya hal tersebut cepat atau lambat akan sangat memengaruhi kondisi ekonomi mereka karena melaut merupakan mata pencarian mereka.

Terakhir, kasus penambangan pasir di Riau Kepulauan Tahun 2001 (Dahuri, 2001). Bila kita datang ke Pulau Karimun, maka dapat kita saksikan maraknya kapal-kapal pasir, baik yang legal maupun ilegal. Bagi nelayan yang biasanya menangkap ikan, keberadaan penambangan pasir tersebut sangat mengganggu. Bahkan, di Kepulauan Karimun, para nelayan mengaku kehilangan 50% penghasilannya akibat penambangan pasir dilakukan di *fishing ground* mereka. Namun, mereka tidak mampu mengadukan masalah itu dan menuntut Pemda agar kepentingan mereka diperhatikan. Paling tidak seharusnya dirumuskan model solusi kompensasi atas kerugian yang dialami nelayan. Apalagi, di wilayah kepulauan tidak ada pilihan lain selain menangkap ikan. Dengan kondisi demikian pun, nelayan tetap melaut meski dengan hasil yang makin menurun. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana mengendalikan kegiatan tersebut sehingga masalah sosial ekonomi seperti itu dapat dihindari.

Pengertian dan Penggolongan Nelayan

Nelayan sering didefinisikan sebagai orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. Definisi ini mudah dibuat untuk konteks masyarakat tradisional. Menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Revisi Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 1, angka 10 mendefinisikan nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Sedangkan nelayan kecil (Pasal 1, angka 11 UU No. 45 Tahun 2009, menyebutkan bahwa nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan paling besar

berukuran 5 GT (*gross ton*). Dalam undang-undang perikanan ini, membedakan definisi antara nelayan dengan pembudidaya ikan. Pasal 1, angka 12, menyebutkan bahwa pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan, dan pasal 1 angka 13, menyebutkan bahwa pembudidaya ikan kecil adalah orang yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tentang pengertian nelayan tersebut, Ditjen Perikanan (2000) mendefinisikan nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan (binatang air lainnya, tanaman air). Orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat perlengkapan ke dalam perahu/kapal tidak dikategorikan sebagai nelayan. Namun, ahli mesin dan juru masak yang bekerja di atas kapal penangkap dimasukkan sebagai nelayan, walaupun mereka tidak secara langsung melakukan penangkapan. Sama halnya dengan penangkapan, pada kegiatan budi daya yang dikategorikan sebagai petani ikan adalah orang yang melakukan pekerjaan pemeliharaan ikan, baik itu anggota rumah tangga maupun buruh (tenaga kerja).

Selanjutnya Ditjen Perikanan (2002) mengklasifikasikan nelayan berdasarkan waktu yang digunakan dalam melakukan pekerjaan operasi penangkapan/pemeliharaan, yaitu:

- i. Nelayan/Petani ikan penuh, yaitu nelayan/petani ikan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan/pemeliharaan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.
- ii. Nelayan/petani ikan sambilan utama, yaitu nelayan/petani ikan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan/pemeliharaan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.

Selain melakukan pekerjaan penangkapan/pemeliharaan, nelayan kategori ini bisa jadi mempunyai pekerjaan lain. iii. Nelayan/petani ikan sambilan tambahan, yaitu nelayan/petani ikan yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan/pemeliharaan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.

Ada dua cara untuk menghitung jumlah nelayan, yaitu (i) melalui pendekatan unit ekonomi Rumah Tangga/Perusahaan Perikanan) dan; (ii) melalui pendekatan rumah tangga (sebagai sumber data adalah nelayan), yakni rumah tangga perikanan dan rumah tangga buruh perikanan. Pengalaman menunjukkan bahwa cara yang pertama memiliki kelemahan: adanya kemungkinan penghitungan dua kali, karena satu orang nelayan dalam satu tahun mungkin bekerja pada dua rumah tangga/perusahaan perikanan yang berbeda. Karena itu, cara yang terbaik adalah cara yang kedua. Namun, mengingat kesulitan yang dihadapi, data nelayan yang disajikan dalam publikasi ini diestimasi berdasarkan cara yang pertama.

Klasifikasi nelayan di atas saat ini juga semakin kurang memadai seiring perkembangan karakteristik usaha perikanan. Ada pemilik kapal yang saat ini tidak lagi melaut atau bahkan belum pernah sama sekali melaut. Misalnya, pemilik kapal di Pekalongan tidak sedikit yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha batik.

Apakah mereka dapat disebut nelayan pemilik? Dalam bahasa nelayan mereka sering disebut sebagai juragan darat. Tentu, kemudian ada pula istilah juragan laut. Istilah juragan laut pun kemudian saat ini lebih cenderung bermakna nakhoda atau juru mudi. Hal ini terjadi karena nelayan pemilik lebih memilih bekerja di darat daripada di laut. Umumnya ini terjadi pada usaha perikanan yang sudah keluar dari ciri tradisional. Sementara itu, pada usaha tradisional, istilah

nelayan pemilik masih bisa berlaku karena pemilik perahu masih benar-benar ikut melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Klasifikasi juga semakin rumit ketika saat ini ABK pun juga semakin hierarkis. Ada yang berstatus sebagai nakhoda, motoris, juru arus, juru selam, bahkan sampai ada juru masak. Ada lagi status sebagai *ontel*, yaitu buruh yang melayani ABK di kapal. Karena itu, wajar pula bila ketika kita menyebut nelayan buruh, orang mengatakan, “nelayan buruh yang mana?”.

Jadi, keragaman status nelayan di atas terjadi seiring berkembangnya usaha perikanan. Untuk lebih memahami pengertian nelayan tersebut, perlu juga dipahami tingkatan usaha perikanan tersebut. Pollnac (1998) pernah membedakan nelayan ke dalam dua kelompok menjadi nelayan besar (*large scale fisherman*) dan nelayan kecil (*small scale fisherman*). Pembedaan ini berdasarkan respons untuk mengantisipasi tingginya risiko dan ketidakpastian. Tampaknya pengelompokan Pollnac tersebut kurang memadai untuk konteks negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, penulis mencoba menggolongkan nelayan menjadi empat tingkatan, yang dilihat dari kapasitas teknologi (alat tangkap dan armada), orientasi pasar, dan karakteristik hubungan produksi.

Pertama, peasant-fisher atau nelayan tradisional, yang biasanya lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri (*subsistensi*). Sebutan ini muncul karena alokasi hasil tangkapan yang dijual lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (khususnya pangan) dan bukan diinvestasikan kembali untuk pengembangan skala usaha (Satria 2001). Umumnya, mereka masih menggunakan alat tangkap tradisional dayung atau sampan tidak bermotor dan masih menggunakan anggota keluarga sebagai tenaga kerja utama. Ciri-ciri umum nelayan sebagai *peasant* juga pernah digambarkan Firth (1971) sebagai berikut:

*“These fishermen as forming part of a peasant economy: with relatively simple, non-mechanical technology; small-scale production units; and a substantial production for such an economy may be outlined. In peasant economy the manner of apportioning the product of the economy process is in some cases not very clearly defined in an overt way—as when the producing unit is an individual family; in other cases it may be laid down by definite rules of custom, and be quite complex”*¹⁰

Kedua, berkembangnya motorisasi perikanan menjadikan nelayan berubah dari *peasant-fisher* menjadi *post-peasant fisher* yang dicirikan dengan penggunaan teknologi penangkapan lebih maju seperti motor tempel atau kapal motor. Penguasaan sarana perahu motor tersebut semakin membuka peluang bagi nelayan untuk menangkap ikan di wilayah perairan lebih jauh sehingga mereka memperoleh surplus dari hasil tangkapan itu. Umumnya nelayan jenis ini masih beroperasi di wilayah pesisir. Pada tipe ini, nelayan sudah mulai berorientasi pasar. Sementara itu, tenaga kerja atau ABK sudah meluas dan tidak bergantung pada anggota keluarga.

Ketiga, adalah *commercial fisher*, yaitu nelayan yang telah berorientasi pada peningkatan keuntungan. Skala usahanya sudah membesar yang dicirikan dengan besarnya jumlah tenaga kerja dan status yang berbeda: dari buruh hingga manajemen. Teknologi yang digunakan pun sudah lebih modern, membutuhkan keahlian tersendiri baik dalam mengoperasikan kapal maupun alat tangkap, misalnya, nelayan *purse seine* di Pekalongan.

Keempat, adalah *industrial fisher*, yang pengertiannya dapat mengacu pada Pollnac (1998), yakni: (a) diorganisasi dengan

10 Firth, Raymond . 1971. *Malay Fishermen: Their Peasant Economy*

cara-cara yang mirip dengan perusahaan agroindustri di negara-negara maju; (b) secara relatif lebih padat modal; (c) memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada perikanan sederhana, baik untuk pemilik maupun awak perahu dan (d) menghasilkan ikan kaleng dan ikan beku yang berorientasi ekspor.

Nelayan skala besar berciri besarnya kapasitas teknologi penangkapan dan jumlah armada dengan orientasi lebih pada keuntungan (*profit oriented*) dan melibatkan buruh nelayan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang berorganisasi kerja lebih kompleks.

Tabel 4. Penggolongan Nelayan Berdasarkan Karakteristik Usaha

Jenis	Orientasi Ekonomi dan Pasar	Tingkat Teknologi	Hubungan Produksi
Usaha Tradisional	Subsistensi, rumah tangga	Rendah	Tidak hierarki, status terdiri dari pemilik dan ABK yang homogen
Usaha Post-Tradisional	Subsistensim surplus, rumah tangga, pasar domestik	Rendah	Tidak hierarki, status terdiri dari pemilik dan ABK yang homogen
Usaha Komersia	Surplus, pasar domestik, ekspor	Menengah	Hierarki, status terdiri dari pemilik, manajemen, ABK yang heterogen
Usaha Industrial	Surplus, ekspor	Tinggi	Hierarki, status terdiri dari pemilik, manajemen, ABK yang heterogen

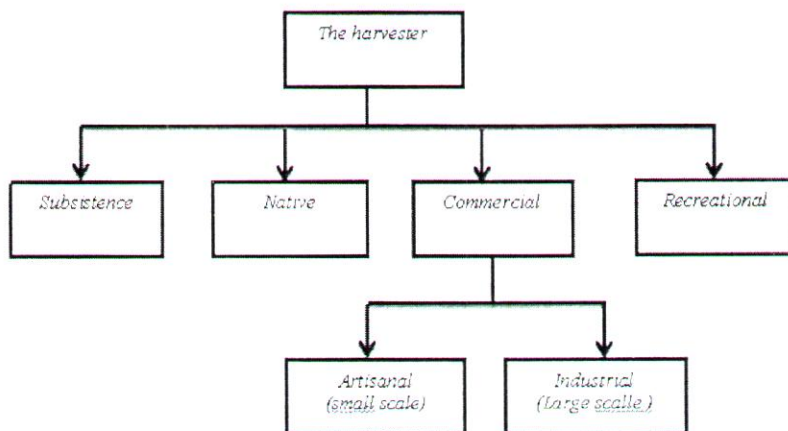
Sumber: Satria (2001).

Charles (2001) dalam bukunya dengan judul *Sustainable Fishery Systems*, menggambarkan hubungan *human systems* dengan aktivis perikanan yang meliputi (kelompok nelayan, teknologi penangkapan ikan, struktur komunitas nelayan dan rumah tangga, serta pola penangkapan) dimana semuanya merupakan internal

faktor sosial ekonomi dan lingkungan sedangkan untuk eksternal faktor merupakan aspek kebijakan pasar dan aturan perikanan.

Charles (2001), mendefinisikan tipologi nelayan berdasar pada unsur ekologi (lingkungan), pola human systems dan aktivitas perikanan menjadi empat kategori nelayan yaitu:

1. *Subsistence fishers*: nelayan yang menangkap ikan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari;
2. *Native/indigenous/aboriginal fishers*: kelompok nelayan yang mempunyai pola aktivitas nelayan tradisional dan seringkali hanya sebagai nelayan subsiten;
3. *Recreational fishers*: nelayan yang melakukan aktivitas perikanan hanya sebagai rekreasi saja;
4. *Commercial fishers*: nelayan yang menangkap komoditas perikanan dalam memenuhi pasar domestik maupun ekspor, yang tergolong menjadi dua kategori yaitu nelayan artisanal dan nelayan industri.



Skema Tipologi nelayan (diadopsi dari Charles, 2001).

Sosiologi Masyarakat Pesisir

Tipologi nelayan di atas dibedakan berdasarkan dari penangkapan sehingga membentuk pola karakteristik nelayan. Hasil studi FEMA IPB-TNC di Kabupaten Rote Ndao (2013), menggambarkan tipologi dan karakteristik nelayan Rote Ndao dan nelayan pendatang yang tinggal dan menetap di wilayah desa pesisir di Pantai Rote Ndao.

Tabel 5. Tipologi dan Karakteristik Nelayan di Rote Ndao

No.	Karakteristik Nelayan	Alat Tangkap	Tipologi Nelayan	Isu Kritis	Keterangan
1.	Nelayan sampam dan bodi susun atau bodi batang. Nelayan tombak (malam hari)	Jaring/pukat senar (<i>gillnet</i>) monofilamen dan multifilamen dan pancing (<i>hand line</i>). Dengan menggunakan lampu gas (petromak) dan sampam, serta alat tombak.	Subsisten	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai nelayan subsisten, hasil laut untuk kebutuhan sehari-hari dan di jual ke tetangga; 	Dengan menggunakan bodi susun atau sampam. Tidak mengenal musim (setiap desa penelitian di seluruh Rote Ndao).
2.	Nelayan perahu layar	Dengan menggunakan pancing rawai (menangkap sirip hiu) dan menggunakan tangan untuk menangkap lola dan teripang	Komersial dengan alat tangkap tradisional	<ul style="list-style-type: none"> Dapat mengganggu pertumbuhan karang karena mengangkap dengan tombak. Area penangkapan berada di wilayah Perairan Australia; Kendala faktor alam antara ombak dan cuaca; Kendala wilayah teritorial perbatasan dengan sistem aturan dari Australia; Harga sirip hiu dan teripang yang tinggi sehingga sampai saat ini masih diminati nelayan, terutama nelayan Bajo. 	Di Desa Dalama, Kecamatan Landuleko. Dilakukan pada Musim Timur, dan melaut dalam jangka waktu lama (Papela, Oelaba)

No.	Karakteristik Nelayan	Alat Tangkap	Tipologi Nelayan	Isu Kritis	Keterangan
3.	Nelayan Lampara Siang	Pukat (<i>mini purse seine</i>)	Komersial	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan alat tangkap <i>mini purse seine</i>, sehingga dimungkinkan dapat menangkap biota laut yang dilarang ditangkap menurut undang-undang; Minimnya akses pemasaran sehingga menyebabkan nelayan tidak mempunyai pilihan dalam menjual hasil tangkapannya kecuali ke papalele dengan keputusan harga rendah berada di papalele; Minimnya sarana industri pasca tangkap bagi hasil lampara. 	Dari Pulau Rote ke Pulau Nuse (Musim Timur) Di sekitar Perairan Selatan Rote (Musim Barat). Ditemukan di Tulandale, Kelurahan Metina dan Desa Namodela dan Oenggae Desa Tunggonamo.
4.	Nelayan Lampara Malam	Pukat (<i>mini purse seine</i>)	Komersial	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan alat tangkap <i>mini purse seine</i>, sehingga dimungkinkan dapat menangkap biota laut yang dilarang ditangkap menurut undang-undang; Minimnya akses pemasaran sehingga menyebabkan nelayan tidak mempunyai pilihan dalam menjual hasil tangkapannya kecuali ke papalele dengan keputusan harga rendah berada di papalele; Minimnya sarana industri pasca tangkap bagi hasil lampara. 	Dari Pulau Rote ke Pulau Nuse (Musim Timur) Di sekitar Perairan Selatan Rote (Musim Barat). Ditemukan di Desa Ndao dan Oenggae Desa Tunggonamo.
		<i>Jaring lampo (jaring dogol)</i>			Ditemukan di Batutua

Karakteristik Sosial Masyarakat Pesisir

No.	Karakteristik Nelayan	Alat Tangkap	Tipologi Nelayan	Isu Kritis	Keterangan
5.	Nelayan udang	Pukat senar udang (<i>trammel net</i>)	Komersial	<ul style="list-style-type: none"> • Pendeknya musim udang (hanya terjadi pada Bulan April-Agustus); • Minimnya akses pemasaran sehingga di jual ke papalele dengan harga rendah, yaitu Rp.50.000; • Menggunakan alat tangkap <i>mini purse seine</i>, sehingga dimungkinkan dapat menangkap biota laut yang dilarang ditangkap menurut undang-undang; • Minimnya akses pemasaran sehingga menyebabkan nelayan tidak mempunyai pilihan dalam menjual hasil tangkapannya kecuali ke papalele dengan keputusan harga rendah berada di papalele; • Minimnya sarana industri pasca tangkap bagi hasil lampara 	Waktu penangkapan Bulan Agustus-September. Ditemukan di Desa Oetefu
6.	Bagang Malam	Pukat (<i>mini purse seine</i>)	Komersial	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya akses pemasaran 	Waktu penangkapan malam hari di Musim Timur dan Barat. Ditemukan di Pulau Ndao, Batuttua dan Namondao
7.	Nelayan Tuna (Bodi Batang dan Bodi Susun)	Pancing Tonda dan Pancing Rawai dasar	Komersial	<ul style="list-style-type: none"> • Komoditas tuna sebagai tumpuan penangkapan nelayan bodi/sampan; • Belum mempunyai rumpun tuna menjadikan fishing ground jauh (45-70 mi dari Rote); • Sistem pemasaran yang belum memadai. 	Musim Timur dan Musim Barat. Ditemukan di Papela

No.	Karakteristik Nelayan	Alat Tangkap	Tipologi Nelayan	Isu Kritis	Keterangan
8.	Nelayan Ikan dasar (Bodi Susun)	Pancing Tonda			
9.	Bagan Tancap	Jaring			
10.	Sero/Lutu	Pukat meeting			

Sumber: Satria, Suncoko dan Sofyanto (TNC-FEMA IPB, 2013)

BAB 3

STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT PESISIR

Sebagaimana karakteristik ekosistem pesisirnya yang khas, masyarakat pesisir juga memiliki karakter kekhasan secara sosiologis. Pada bab 2 telah dibahas gambaran umum karakteristik sosial masyarakat pesisir tersebut, sementara dalam bab ini secara lebih khusus akan dikaji aspek struktur sosial. Sunarto (2000) mengutip bahwa menurut Kornblum struktur sosial merupakan pola perilaku berulang-ulang yang menciptakan hubungan antarindividu dan antarkelompok dalam masyarakat. Dalam struktur sosial ini, terdapat dua konsep penting, yaitu status dan peranan. Status adalah suatu kumpulan hak dan kewajiban, sementara peranan adalah aspek dinamis dari status.¹ Misalnya, seseorang berstatus sebagai nakhoda atau juru mudi, kewajibannya adalah memimpin dan bertanggung jawab atas anak buah kapal dalam menjalankan operasi penangkapan ikan di laut. Adapun peranannya, antara lain, menentukan daerah penangkapan, mengorganisasasi anak buah kapal dalam bekerja, mewakili anak buah kapal dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pemilik kapal, dan seterusnya.

Pembahasan tentang struktur sosial pada bab ini hanya akan dibatasi pada struktur yang terbentuk dari hubungan produksi

¹ Koentjaraningrat (1990) *Sejarah dan Teori Antropologi II* (Jakarta: UI Press) hlm. 160.

(termasuk pasar) pada usaha perikanan, baik penangkapan maupun budi daya.

Patron-Klien: Ciri Umum Struktur Sosial Masyarakat Pesisir

Struktur sosial dalam masyarakat nelayan umumnya berciri ikatan patron-klien yang kuat. Kuatnya ikatan patron klien tersebut merupakan konsekuensi dari sifat kegiatan penangkapan ikan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Bagi nelayan, menjalin ikatan dengan patron merupakan langkah yang penting untuk menjaga kelangsungan kegiatannya karena pola patron-klien merupakan institusi jaminan sosial ekonomi. Hal ini terjadi karena hingga saat ini nelayan belum menemukan alternatif institusi yang mampu menjamin kepentingan sosial ekonomi mereka.

Tentang hubungan patron-klien, Legg (1983) dalam Najib (1999) mengungkapkan bahwa tata hubungan patron-klien umumnya berkaitan dengan:

- (1) Hubungan di antara pelaku yang menguasai sumber daya tidak sama;
- (2) Hubungan khusus yang merupakan hubungan pribadi dan mengandung keakraban;
- (3) Hubungan yang didasarkan atas asas saling menguntungkan.

Jadi, karakteristik hubungan patron-klien di atas sejalan dengan kategori Wolf tentang dua macam kelompok teman, yaitu yang berdasarkan *emotional friendship* dan *instrumental friendship*. Artinya, hubungan patron-klien pada umumnya merupakan ikatan *emotional friendship* sekaligus *instrumental friendship*.² Dua

² Lihat Kamanto Sunarto, 1993, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta; Lembaga Penerbit FE UI)

kategori ini dapat dijadikan kerangka untuk melihat sejauh mana kekuatan ikatan patron-klien tersebut.

Ahli lainnya, Koentjaraningrat (1990), melihat pola patron-klien dalam kerangka jaringan sosial. Pola patron-klien merupakan pola hubungan yang didasarkan pada *principle of reciprocity* atau asas timbal balik. Merujuk pada Foster, dalam Koentjaraningrat (1990), juga ditemukan istilah lain untuk menjelaskan gejala patron-klien, yaitu *dyadic contract*, atau hubungan antara dua satuan yang bekerja sama.

Sementara itu, James Scott (1993) melihat hubungan patron-klien sebagai fenomena yang terbentuk atas dasar ketidaksetaraan dan sifat fleksibilitas yang tersebar sebagai sebuah sistem pertukaran pribadi. Dalam pertukaran tersebut, ada arus dari patron ke klien dan sebaliknya. Menurut Scott (1993), arus dari patron ke klien mencakup: (1) penghidupan subsistensi dasar, berupa pemberian pekerjaan tetap, penyediaan saprodi, jasa pemasaran, dan bantuan teknis, (2) jaminan krisis subsistensi, berupa pinjaman yang diberikan pada saat klien menghadapi kesulitan ekonomi, (3) perlindungan, berupa perlindungan terhadap klien baik dari ancaman pribadi (musuh pribadi) maupun ancaman umum (tentara, pejabat, pemungut pajak, dsb), (4) memberikan jasa kolektif, berupa bantuan untuk mendukung sarana umum setempat (sekolah, tempat ibadah, jalan, dsb), serta mensponsori festival dan perayaan desa.

Sementara itu, arus dari klien ke patron, menurut Scott (1993), sulit untuk dikategorisasi. Sebabnya, klien adalah “orangnya” patron, yang menyediakan tenaga dan keahliannya untuk kepentingan patron, apa pun bentuknya, seperti jasa pekerjaan dasar, jasa tambahan bagi rumah tangga patron, jasa domestik pribadi, dan juga klien merupakan anggota setia dari faksi lokal patron tersebut. Meskipun apa yang digambarkan Scott tersebut merupakan hasil

kajiannya berdasarkan konteks sosial agraris, gambaran tentang hubungan patron-klien dapat membantu untuk menggambarkan kondisi masyarakat pesisir.

Berdasarkan tata hubungan di atas jelas bahwa memang antara nelayan dengan patronnya menguasai sumber daya tidak sama. Artinya, patron menguasai sumber daya modal jauh lebih besar daripada nelayan. Ketidaksamaan itu menyebabkan ikatan patron-klien terjalin. Masyhuri (1999) menggambarkan bahwa pada saat hasil tangkapan kurang baik, nelayan kekurangan uang dan pada akhirnya melepas jenis barang-barang yang mudah dijual dengan harga lebih murah. Sering peran penjualan dilakukan istri-istri nelayan melalui mekanisme pegadaian, sehingga istri nelayan sering berhubungan dengan institusi pegadaian (Juwono, 1998).

Selanjutnya nelayan akan mencari utang kepada patron dengan jaminan ikatan pekerjaan atau hasil tangkapan yang dijual kepada patron dengan harga lebih rendah daripada harga pasar dan ditetapkan secara sepihak oleh patron. Misalnya, di Sape-Bima hasil tangkapan kakap merah yang berlaku di pasar Rp.22.000/kg harus dijual ke patron dengan harga Rp.15.000/kg. Ikatan patron-klien tersebut merupakan mekanisme pertukaran antara patron dan klien. Dalam hal ini, patron memberikan bantuan modal, kapal motor, dan alat tangkap kepada klien. Patron tersebut menyediakan berbagai bentuk bantuan yang diperlukan klien. Adapun cicilan pelunasan utang klien pada patron dibayarkan setiap penjualan hasil tangkapan.³

Dengan pola patron-klien yang demikian, klien sering dihadapkan pada sejumlah masalah, seperti tidak berakhirnya pelunasan kredit. Menurut patron, kliennya tidak disiplin dan mementingkan pengeluaran konsumtif seperti pembelian barang-

³ Kasus di Bima NTB ini merupakan hasil pengamatan penulis di lapangan melalui kegiatan yang dilakukan PKSPL IPB

barang elektronik. Di pihak lain, nelayan (klien) menganggap hal itu merupakan taktik patron untuk terus mengikat klien sehingga bisnisnya bisa terus berjalan.

Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat suku laut. Sebagian besar penduduk asli tidak memiliki alat tangkap sendiri sehingga mereka harus menyewa kepada tauke-tauke Cina (ada yang menyebutnya “nirik”). Biaya sewa Pompong Rp.25.000/hari. Hubungan dengan tauke tidak hanya sebatas pinjam meminjam uang dan alat tangkap, melainkan ada keterikatan nelayan untuk menjual hasil tangkapannya ke tauke tersebut. Permasalahannya adalah peran tauke sebagai penentu harga (*price maker*) dan sering harga yang diberikan kepada nelayan di bawah harga jual rata-rata.

Ikatan patron-klien serupa ditemukan juga di sekitar Kepulauan Riau, dengan mekanisme pertukaran jasa yang senada pula. Dalam hal ini, nelayan hanya dalam posisi sebagai *price taker*. Misalnya, di Pulau Busung, para nelayan harus menjual udang ke patron sebesar Rp.45.000/kg, sementara harga di pasar sudah mencapai Rp.50.000. Menghadapi kenyataan itu, nelayan tidak memiliki kekuatan untuk meningkatkan posisi tawar mereka, meskipun mereka sadar bahwa kondisi demikian sangat merugikan mereka.

Hubungan patron-klien memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada masing-masing daerah. Hal ini tampak pada pola hubungan patron-klien untuk perikanan tangkap di Kecamatan Mauk, Tangerang.⁴ Hubungan patron-klien di daerah ini terjalin antara nelayan tangkap dengan *langgan* atau pedagang pengumpul, sehingga sistem yang terbentuk disebut dengan *sistem langgan*. *Sistem langgan* ini biasa berlaku bagi nelayan-nelayan jaring rajungan, sero, dan jaring udang. Yang disebut *langgan* di sini

⁴ Contoh pola patron-klien di kecamatan Mauk diperoleh dari pengalaman penulis dalam studi yang dilakukan LSI IPB tahun 2002

adalah orang yang memberikan bantuan uang kepada nelayan untuk kegiatan produksi maupun untuk kebutuhan rumah tangga, dan biasanya *langgan* berprofesi sebagai pengumpul ikan, udang, atau rajungan. Sebagai timbal baliknya, nelayan harus menjual hasil tangkapannya kepada *langgan*. Bagi nelayan rajungan, biasanya bantuan diberikan secara cuma-cuma tanpa ada kewajiban untuk membayar. Lebih unik lagi, bila jaring rajungan tersebut hilang di laut, pinjaman yang diberikan pun dianggap hilang, sehingga sering *langgan* memberikan lagi bantuan untuk membeli jaring rajungan yang baru. Namun, biasanya *langgan* akan selalu memberikan pinjaman kepada nelayan. Bila tidak, nelayan tersebut bisa beralih kepada *langgan* yang lain.

Kewajiban nelayan adalah menjual hasil tangkapannya kepada *langgan*. Harga rajungan yang dijual ke *langgan* lebih rendah dibandingkan harga pasar dengan selisih harga Rp.2.000/kg. Perbedaan harga jual itu pun berlaku untuk udang, ikan, dan cumi. Bila nelayan yang terikat pada seorang *langgan* tidak menjual hasil tangkapannya kepada *langgan* tersebut, maka dia segera akan ditegur dan diperingatkan oleh *langgan*.

Sistem *langgan* pada alat tangkap sero sedikit berbeda dengan jaring rajungan. Untuk alat tangkap sero, nelayan diharuskan mengembalikan pinjaman modal yang diterima, tapi tidak untuk pinjaman sehari-hari (untuk kebutuhan hidup). Perbedaan ini terjadi karena biaya yang dibutuhkan untuk membuat sero cukup besar, yaitu mencapai Rp.2.500.000. Namun, kewajiban nelayan sero tetap sama dengan nelayan jaring rajungan, yaitu menjual hasil tangkapannya ke *langgan*.

Sistem *langgan* yang terbentuk di Kecamatan Mauk, Tangerang menunjukkan saling kebergantungan antara nelayan dan *langgan*. Dengan situasi tersebut, masing-masing pihak bersedia untuk

mengambil risiko dan konsekuensinya. Bagi seorang *langgan* yang harus selalu memberikan pinjaman kepada nelayan, risiko kerugian akan lebih besar pada saat hasil tangkapan nelayan sedikit, karena jumlah pinjaman relatif sama. Sementara itu, bagi nelayan, konsekuensi menjual dengan harga yang lebih rendah harus diterima meskipun pada saat hasil tangkapan banyak peluang untuk memperoleh untung lebih besar.

Fenomena patron-klien lainnya dapat ditemukan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, yakni antara nelayan pencari telur ikan terbang (*torani*) atau sering disebut *pa'torani* dengan pedagang pengumpul (*papalele*).⁵ *Torani* memiliki nilai jual yang sangat tinggi berkisar Rp.150.000 hingga Rp.300.000 dan diekspor ke Jepang, Taiwan, dan Korea. Setiap kali melaut, *pa'torani* dapat menghasilkan 30-40 kg *torani* yang telah dikeringkan. *Pa'torani* memerlukan waktu 20-30 hari untuk melaut, dan masa melaut umumnya dilakukan pada bulan Mei hingga September. Untuk melaut *pa'torani* memerlukan modal yang umumnya diperoleh dari hasil pinjaman kepada *papalele* sekitar Rp.3.000.000 hingga Rp.7.000.000. Pinjaman modal itu kemudian dikembalikan dengan mengambil hasil *torani* sebesar 30%.

Kasus di Sulawesi lainnya tampak sebagaimana digambarkan dalam Sarma dan Sajogyo (2000). Pola patron-klien dengan istilah lokal "*punggawa-sawi*" cenderung mengikat para nelayan buruh secara permanen dan turun-temurun. Dalam pola ini, setiap hasil tangkapan senilai sekitar Rp.2.000.000 yang diperoleh satu kelompok nelayan, maka hanya Rp.530.000 atau 26,5 persen yang dapat dibagi untuk 10 orang *sawi*, sementara 73 persen sisanya menjadi bagian "*punggawa*" sebagai pemilik modal. Ketimpangan ini semakin nyata

5 Uraian tentang pola patron-klien di Kabupaten Takalar ini bersumber dari Kompas, 4 Juli 2002

melalui hasil studi LPPM Unhas (1993) yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan *sawi* sekitar Rp.30.000-Rp.60.000, juragan laut sekitar Rp.100.000-Rp.250.000, dan *punggawa* sekitar Rp.300.000 hingga Rp.1.500.000.⁶

Pola patronase seperti tergambar di atas juga terjadi pada perikanan budi daya. Prinsipnya sama bahwa patron - yang umumnya warga keturunan Tionghoa meminjamkan modal kepada para nelayan lokal untuk melakukan pembesaran ikan napoleon dan kerapu. Modal tersebut digunakan untuk membuat jaring apung, pengadaan bibit, dan pengadaan pakan. Hasil pembesaran tersebut harus dijual kepada patron dengan harga yang lebih murah daripada pasar. Selanjutnya patron yang merupakan nelayan besar sekaigus pedagang tersebut memasarkan hasil panen ke Hongkong melalui pedagang perantara. Pola ini dapat ditemukan di kepulauan Natuna. Dengan kondisi struktur yang demikian, jelaslah bahwa pada umumnya nelayan yang berlatar belakang etnik Melayu dan etnik lokal lainnya memiliki strata yang lebih rendah dibandingkan para nelayan keturunan Tionghoa. Setidaknya hal ini terlihat pada penguasaan dan pemilikan alat produksi.

Mekanisme patron-klien di berbagai kasus tersebut seolah merupakan tata hubungan yang “saling menguntungkan”. Namun, berdasarkan hasil-hasil studi, derajat keuntungannya berbeda, yakni bahwa patron lebih banyak memetik keuntungan dibandingkan klien. Inilah sisi negatif dari pola patron-klien. Namun, ada pula pola yang bersifat positif karena mampu mendorong terjadinya mobilitas vertikal nelayan. Seperti di Sape, para nelayan tradisional akhirnya mampu memiliki perahu motor karena peran patron. Jadi, selain sisi negatif, pola patron-klien juga memiliki sisi positif. Sisi

6 Sarman, Mukhtar, dan Sajogyo. 2000. *Masalah Penanggulangan Kemiskinan* (Jakarta:Puspa Swara)

positif ini muncul karena memang secara riil institusi patron-klien mampu memacu kehidupan nelayan untuk keluar dari perangkap keterbelakangan.

Artinya, ditemukan juga adanya pola hubungan tengkulak dengan nelayan yang relatif tidak bersifat eksploitatif sebagaimana studi Anggraini (2002). Namun, kalau dikaji lebih jauh, hubungan tengkulak dengan nelayan di Pulau Panggang tersebut belumlah terikat sebagaimana patron-klien pada umumnya. Hasil studi Samiya (2011) juga menunjukkan bahwa pola hubungan patron-klien berbeda-beda tergantung dari jenis usaha perikanan (Kotak 1).

Pola patron-klien terus terjadi dalam komunitas nelayan karena memang belum adanya institusi formal yang mampu berperan sebagaimana patron. Tentu, institusi tersebut belum berjalan efektif karena ada kesenjangan kultur institusi yang dibangun secara formal dengan kultur nelayan yang masih menekankan aspek personalitas. Nelayan itu sendiri belum mampu membangun institusi baru secara mandiri. Meski diakui bahwa para nelayan itu memiliki solidaritas sesama yang kuat, etos kerja, dan mobilitas tinggi, mereka tetap saja masih memiliki sejumlah kelemahan, khususnya dalam kemampuan mengorganisasi diri baik untuk kepentingan ekonomi (koperasi) maupun profesi. Sebagian nelayan memang menganggap status nelayan sebagai *way of life*, sehingga etika subsistensi masih menjadi pegangan mereka. Ikatan-ikatan komunal yang ada (seperti ikatan dengan patron) umumnya dipertahankan untuk menjaga kepentingan subsistensi mereka. Karena itu, bisa dijelaskan mengapa ikatan patron-klien sulit dilepaskan.

Tabel 6. Ciri-ciri Hubungan Tengkulak dan Nelayan di Kelurahan Pulau Panggang.

Ciri Spesifik Hubungan Tengkulak-Nelayan	Pola Hubungan Tengkulak dan Nelayan
1. Ciri Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Kedua belah pihak menguasai sumber daya yang berbeda;2. Hubungan terbentuk atas dasar saling percaya dan suasana kekeluargaan; dan3. Hubungan yang berdasarkan azas saling menguntungkan serta memberi dan menerima.
2. Ciri Khusus	<ol style="list-style-type: none">1. Tidak bersifat eksploitatif;2. Tidak terdapat hubungan mengikat;3. Kebebasan nelayan dalam memilih pembeli; dan4. Terdapat peran nelayan dalam menentukan harga.

Sumber: Angraini, 2002

Struktur Sosial Masyarakat Pesisir

Kotak 1. Pengaruh Ikatan Patron Klien terhadap Pengelolaan Sumberdaya Pesisir

Hasil penelitian Samiya (2011) studi kasus di Pulau Panggang, Taman Nasional Kepulauan Seribu menunjukkan bahwa pola hubungan antara tengkulak (patron) dan nelayan (klien) di Pulau Panggang berbeda-beda tergantung dari jenis usaha perikanan. Tingkat ketergantungan paling tinggi berturut-turut terdapat pada ikatan patron-klien usaha perikanan tangkap menggunakan jaring *muroami*, usaha perikanan tangkap ikan hias, usaha perikanan budidaya, dan terakhir pada usaha perikanan tangkap menggunakan *hubu*. Perbedaan tingkat ketergantungan klien terhadap patron disebabkan karena adanya perbedaan pengaruh patron terhadap usaha perikanan yang klien lakukan (Tabel 7).

Adanya ikatan patron klien ini memengaruhi pengelolaan sumber daya pesisir di Pulau Panggang yaitu pada penggunaan alat tangkap/sarana budidaya dan kepatuhan terhadap zonasi Taman Nasional Kepulauan Seribu. Pengaruh tersebut terlihat pada ikatan patron klien usaha perikanan tangkap jaring *muroami* dan usaha penangkapan ikan hias. Patron pada usaha perikanan jaring *muroami* memiliki pengaruh besar terhadap penggunaan potasium oleh klien (nelayan pekerja). Patron merupakan pemasok potasium yang digunakan klien. Ketika patron tidak menyediakan potasium, maka klien tidak menggunakannya. Pada usaha perikanan tangkap ikan hias, patron mengharuskan klien untuk melaporkan lokasi dan waktu penangkapan ikan serta melarang penggunaan potasium. Hal ini terkait dengan adanya pemberian sertifikasi ramah lingkungan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Pertanian.

Sumber: Samiya, 2011.

Sosiologi Masyarakat Pesisir

Tabel 7. Perbandingan Pengaruh Tengkulak pada Usaha Perikanan di Pulau Panggang.

Ciri	Jenis Usaha Perikanan			
	Muroami	Bubu	Ikan Hias	Budidaya
Pemberian Modal atau Pinjaman	Pinjaman alat tangkap (kapal, motor, jaring dan kompresor) Pemberian bekal di laut (ransum) Pinjaman untuk keluarga jika menginap di laut (babang)	Pinjaman untuk biaya sehari-hari nelayan	Pemberian biaya pembelian BBM (Rp.25.000 sampai Rp.50.000/minggu) Pinjaman untuk biaya sehari-hari	Pinjaman untuk biaya sehari-hari
Pemilihan Alat Tangkap dan Sarana Budidaya	Ditentukan oleh nelayan pemilik	Ditentukan sendiri oleh nelayan	Ditentukan sendiri oleh nelayan	Ditentukan sendiri oleh nelayan
Penentuan Harga Ikan	Ditentukan oleh nelayan pemilik	Ditentukan oleh tengkulak, namun kadang terjadi negosiasi oleh nelayan	Ditentukan oleh nelayan tengkulak, namun kadang terjadi negosiasi oleh nelayan	Ditentukan oleh tengkulak
Penentuan Jumlah Hasil Tangkapan/ Panen	Tidak ada batasan minimum jumlah ikan yang harus ditangkap	Tidak ada batasan minimum jumlah ikan yang harus ditangkap	Terdapat batasan minimum jumlah ikan yang harus ditangkap	Tidak ada batasan minimum jumlah ikan yang harus dipanen

Sumber: Samiya (2011).

Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial berarti pembedaan populasi berdasarkan kelas secara hierarkis (Sorokin 1962). Basis pembedaan kelas menurut Sorokin (1962) adalah hak dan *previlege (rights and privilege)*,

Struktur Sosial Masyarakat Pesisir

kewajiban dan tanggung jawab (*duties and responsibilities*), nilai sosial dan privasi (*social values and privations*), serta kekuasaan dan pengaruhnya pada masyarakat (*social power and influences among the members of a society*). Sorokin (1962) membagi bentuk stratifikasi menjadi tiga, yakni (a) stratifikasi berdasar ekonomi (*economically stratified*), bila dalam suatu masyarakat terdapat perbedaan atau ketidaksetaraan status ekonomi, (b) stratifikasi berdasarkan politik (*politically stratified*), bila terdapat pemeringkatan sosial berdasarkan otoritas, gengsi, kehormatan, dan gelar, serta bila terdapat orang yang mengatur (*the rulers*) dan yang diatur (*the ruled*), dan (c) stratifikasi berdasarkan pekerjaan (*occupationally stratified*), jika masyarakat terdiferensiasi ke dalam berbagai pekerjaan dan beberapa di antara pekerjaan itu lebih tinggi statusnya dibandingkan yang lain.

Untuk konteks masyarakat pesisir, stratifikasi merupakan aspek yang penting dipelajari. Dengan mempelajari stratifikasi, akan ditemukan mana kelompok superior dan mana kelompok inferior, baik dalam konteks ekonomi maupun politik. Hal tersebut tentunya semakin memudahkan kita untuk memahami berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat pesisir tersebut.

Namun, jelas bahwa bentuk stratifikasi masyarakat pesisir di Indonesia sangatlah beragam. Masyarakat yang kian berkembang akan semakin terstratifikasi. Sebaliknya, masyarakat yang masih tradisional dengan semua nelayan masih menggunakan perahu dayung tanpa motor stratifikasi sosialnya belum terlalu kompleks. Misalnya, posisi kelembagaan kerja usaha nelayan hanya terdiri dari dua, yaitu pemilik yang sekaligus menjadi juru mudi, dan satu atau dua orang ABK. Tentu ketika masyarakat sudah mulai berkembang dengan modernisasi perikanan, jumlah ABK bertambah dari dua orang menjadi 15 orang, umpamanya. Kelima belas orang itu

memiliki posisi yang berbeda-beda. Ada yang menjadi juru mudi, motoris, juru masak, juru arus, juru selam, dan lain sebagainya. Lebih detail lagi Kusnadi (2000) mengklasifikasikan spesialisasi pekerjaan dalam perahu sleret sebagai berikut:

- 1) *Jhuragan* adalah *pandhiga* yang bertanggungjawab atas kegiatan operasi perahu.
- 2) *Kel-bekel* adalah wakil *jhuragan* yang bertugas membantu *jhuragan*.
- 3) *Madhara' prao* adalah *pandhiga* yang bertugas menjaga dan memelihara perahu.
- 4) *Tokang jaga'an* adalah *pandhiga* yang bertugas mengontak *pandhiga-pandhiga* lain untuk bekerja.
- 5) *Tokang jaga mesin* adalah *pandhiga* yang bertugas merawat dan menghidupkan mesin untuk melajukan perahu.
- 6) *Tokang pancer* atau kemudi adalah *pandhiga* yang bertugas mengatur arah perjalanan perahu dan dilakukan oleh tiga orang.
- 7) *Tokang lampu* adalah *pandhiga* yang bertugas merawat, memompa tabung lampu, serta menghidupkan dan meletakkannya di tempat yang tersedia (*anjhang*).
- 8) *Tokang ngoras aeng* adalah *pandhiga* yang bertugas membuang air ke laut.
- 9) *Tokang nyobeng* adalah *pandhiga* yang bertugas menurunkan lampu ke laut sambil berenang dan mengatur posisi lampu agar dapat mengumpulkan ikan.
- 10) *Tokang ngereng* adalah *pandhiga* yang bertugas membuang timah ketika menaburkan payang bagian depan dan mengatur perlengkapan timah tersebut.
- 11) *Tokang nggorit* adalah *pandhiga* yang bertugas menata posisi payang sebagaimana mestinya setelah dipakai.

12) *Tokang du'um* adalah *pandhiga* yang bertugas membagi hasil tangkapan.

Seiring modernisasi, akan terjadi diferensiasi sosial yang tampak pada semakin bertambahnya jumlah posisi sosial atau jenis pekerjaan. Bersamaan dengan itu, terjadi pula perubahan stratifikasi karena sejumlah posisi sosial tersebut tidaklah bersifat horizontal melainkan vertikal atau berjenjang. Ukuran penjenjangan tersebut bervariasi, bisa dengan ukuran ekonomi, prestise, atau kekuasaan.

Untuk mempelajari stratifikasi sosial suatu masyarakat, setidaknya ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan (Zanden 1990), yaitu:

1. Pendekatan obyektif, yakni menggunakan ukuran obyektif berupa variabel yang mudah diukur secara statistik seperti pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Pendekatan ini lebih merupakan kategori statistik. Para peneliti berdasarkan data statistik dapat menentukan kelas-kelas yang ada. Namun, pendekatan ini terlalu sederhana untuk sebuah analisis kelas (Zanden 1990).
2. Pendekatan subyektif (*self-placement*), yakni kelas dilihat sebagai kategori sosial dan disusun dengan meminta para responden survei untuk menilai status sendiri dengan jalan menempatkan diri pada skala kelas tertentu. Data yang terkumpul memberikan gambaran subyektif mengenai stratifikasi.
3. Pendekatan reputasional. Dalam pendekatan reputasional para subyek penelitian diminta untuk menilai status orang lain dengan jalan menempatkan orang lain tersebut pada skala tertentu. Dengan cara ini, antara lain, dapat disusun skala gengsi pekerjaan yang memperlihatkan peringkat prestise pekerjaan tertentu dalam struktur kelas komunitas.

Sosiologi Masyarakat Pesisir

Tabel 8. Stratifikasi Sosial Masyarakat Krpyak dalam Pandangan Nelayan.

Lapisan	Jenis Pekerjaan	
ATAS-ATAS (5,5<6)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik Kapal 2. Juragan Batik 3. Dokter 	
ATAS-BAWAH (5<5,5)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nahkoda 2. Pemilik usaha pengasinan ikan 3. Petani Pemilik 4. Pemilik took 5. Pemilik mobil umum 	
MENENGAH-BAWAH (3<4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik perahu 2. Pemilik tambak 3. Juru mesin 4. Pedagang ikan 5. Pegawai KUD 6. Pegawai TPI 7. Pengurus HSNI 8. Pengurus kapal 9. Petani penyewa 	<ol style="list-style-type: none"> 10. Bakul batik 11. Pemilik warung 12. Pemilik kios 13. Lurah 14. Guru SD 15. ABRI 16. Guru SMA 17. Pemilik becak 18. Tukang sungging
MENENGAH-BAWAH (3<4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Juru arus 2. Juru gidang 3. Penjual ikan di pasar 4. Pegawai kantor pabrik pengolahan ikan 5. Mandor batik 6. Pelayan took 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Pegawai kelurahan 8. Pegawai kantor di kelurahan swasta 9. Sopir angkot 10. Pemilik sasak 11. Tukang jahit
BAWAH-ATAS (2<3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Juru selam 2. Buruh tambak 3. Tukang kireng 4. Buruh tani 5. Buruh batik 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Penjual sayur 7. Tukang becak 8. Kenek angkutan umum 9. Tukang cukur
BAWAH-BAWAH (1<2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Juru masak 2. Pandega 3. Buruh usaha pengolahan ikan 	

Sumber: Satria (2001).

Struktur Sosial Masyarakat Pesisir

Penulis pernah menggunakan pendekatan reputasional, dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel di atas. Tampak pada Tabel tersebut bahwa secara reputasional posisi pemilik kapal lebih tinggi daripada seorang lurah. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata masyarakat pesisir yang diteliti penulis lebih mempertimbangkan aspek penguasaan kapital daripada kekuasaan dalam melihat posisi sosial seseorang.

Tabel 9. Stratifikasi Nelayan Nelayan dan Pembudidaya Rumput Laut.

Jenis nelayan	Lapisan atas	Lapisan tengah	Lapisan bawah
Nelayan teripang, lola dan sirip hiu (Bajo Oelaba dan Papela)	Pemilik perahu layar	Juragan	ABK
Nelayan bodi/tuna (Bajo Papela)	Pemilik bodi	Juragan	ABK
Nelayan bodi /ikan dasar (P. Ndao)	Pemilik bodi	Pemilik Kapal	ABK
Nelayan Lampara	Pemilik lampara	Juragan	ABK
Nelayan bagan malam	Pemilik bagan	Juragan	ABK

Sumber: Satria, Suncoko dan Sofyanto (2013).

Kotak 2. Stratifikasi Nelayan di Rote Ndao.

Hasil di lapangan ditemukan bahwa stratifikasi sosial nelayan di Rote Ndao terdapat stratifikasi nelayan berdasarkan stratifikasi ekonomi dan politik. Hal ini disebabkan setiap karakteristik dan jenis nelayan satu dan lainnya berbeda dan juga terjadi pembedaan ini berdasarkan dari hasil komoditas yang ditangkap oleh nelayan. Pembagian tiga lapisan stratifikasi nelayan, yaitu lapisan atas, menengah dan bawah, berdasarkan atas kekuasaan dalam menentukan posisi tawar bagi hasil. Lapisan atas adalah pemilik modal, lapisan menengah adalah orang yang dipercaya menukangi perahu dan menentukan hasil produksi oleh bos. Lapisan menengah mempunyai dua bagian dalam bagi hasil, sedangkan lapisan bawah adalah ABK yang menjual jasanya untuk bos.

Pembagian tiga lapisan stratifikasi nelayan, yaitu lapisan atas, menengah dan bawah, berdasarkan atas kekuasaan dalam menentukan posisi tawar bagi hasil. Lapisan atas adalah pemilik modal, lapisan menengah adalah orang yang dipercaya menukangi perahu dan menentukan hasil produksi oleh bos. Lapisan menengah mempunyai dua bagian dalam bagi hasil, sedangkan lapisan bawah adalah ABK yang menjual jasanya untuk bos. Semakin berkembangnya masyarakat nelayan semakin terstratifikasi nelayan tersebut. Nelayan komersial adalah jenis nelayan berkembang. Di Rote Ndao nelayan komersil terdapat dua jenis, yaitu nelayan modern dengan menggunakan teknologi motorisasi dan nelayan tradisional yang menggunakan perahu layar untuk menangkap teripang, sirip hiu, dan lola di perbatasan.

Sumber: Satria, Suncoko dan Sofyanto (2013).

BAB 4

DINAMIKA PERUBAHAN TEKNOLOGI PERIKANAN DAN FORMASI SOSIAL

Perubahan Teknologi Perikanan Sebagai Perubahan Kebudayaan

Perubahan teknologi perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, secara antropologis dipandang sebagai perubahan kebudayaan. Perubahan teknologi tersebut dapat berlangsung melalui adopsi dan inovasi.

Dalam inovasi, penemuan baru berupa alat oleh seorang individu dalam masyarakat sering disebut *discovery*. Apabila penemuan baru tersebut diakui dan diterima oleh masyarakat, penemuan baru tersebut dinamakan *invention*.¹ Antara *discovery* dan *invention* sering butuh waktu yang lama. Karena bagaimana pun masyarakat ingin memastikan apakah temuan teknologi baru tersebut akan benar-benar bermanfaat ataukah tidak. Bagi masyarakat pesisir, menerima suatu temuan mesti didasarkan pada bukti empiris. Artinya, apakah sudah ada orang yang pernah mencoba; apakah percobaan tersebut berhasil ataukah tidak? Dalam konteks masyarakat pesisir, kecepatan perubahan antara dua proses itu sangat bergantung pada tingkat risiko yang akan diterima bagi orang

1 Pemikiran ini merujuk Ralp Linton dalam Koentjaraningrat, *op.cit.*, hlm. 109.

yang hendak menggunakan teknologi baru tersebut. Masyarakat pesisir yang berkategori *peasant* umumnya proses perubahan dari *discovery* menjadi *invention* membutuhkan waktu yang lebih lama seiring dengan karakteristiknya yang *enggan ambil risiko* dan *safety first* itu.

Menurut Koentjaraningrat (1990), penemuan baru dalam masyarakat pesisir didorong oleh kreativitas yang tumbuh karena:

- (a) Kesadaran para individu akan adanya kekurangan-kekurangan dalam kebudayaan mereka;
- (b) Adanya kesadaran akan pentingnya mutu keahlian yang bersangkutan, sehingga seseorang yang telah ahli dalam suatu bidang akan terus meningkatkan keahliannya;
- (c) Adanya sistem perangsang dalam masyarakat yang mendorong mutu, seperti kehormatan, kedudukan, dan harta;
- (d) Adanya krisis dalam masyarakat, yang berarti bahwa dalam masyarakat itu ada sejumlah orang yang menentang keadaan karena mereka sadar akan kekurangan-kekurangan yang ada dalam masyarakat itu serta merasa tidak puas dengan keadaan itu.

Sementara itu, perubahan teknologi juga dapat terjadi sebagai hasil difusi oleh pihak luar. Beberapa daerah mengalami modernisasi perikanan karena pengaruh pihak. Seperti di Pelabuhan Ratu, perubahan teknologi penangkapan dibawa oleh nelayan pendatang dari Cirebon.² Begitu pula di Pekalongan. Hadirnya alat tangkap *trawl* di Pekalongan karena peran nelayan Bagan Siapi-api.³ Hal

² lihat *Perubahan Sosial Masyarakat Nelayan di Pelabuhan Ratu* (2002)

³ Satria (2001) *Dinamika Modernisasi Perikanan: Formasi Sosial dan Mobilitas Nelayan* (Bandung: HUP)

serupa juga terjadi di Bima, yakni nelayan Bugis memperkenalkan alat tangkap bagan kepada nelayan Waworada.

Modernisasi Perikanan

Urgensi modernisasi perikanan melalui perbaikan teknologi atau alat tangkap untuk peningkatan produksi dapat dipahami. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa kita masih *under capacity* untuk memanfaatkan potensi perikanan baik budi daya maupun tangkapan, lebih-lebih untuk penangkapan di perairan ZEEI.

Harus diakui bahwa pada akhirnya kapal-kapal asinglah yang mendominasi kegiatan penangkapan di perairan ZEEI, yang memang sesuai dengan hukum internasional bahwa kapal asing memang diperkenankan beroperasi kalau kita tidak mampu memanfaatkan potensi laut di situ.

Namun, harus dicatat bahwa izin bagi kapal asing dikeluarkan setelah adanya perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara yang dijadikan bendera. Izin tersebut disertai dengan ketentuan kuota ikan yang boleh ditangkap serta *fee* yang harus dibayar. Namun, ternyata praktik pencurian ikan (*illegal fishing*) oleh kapal asing justru marak yang berarti pelanggaran terhadap hukum internasional, sehingga perlu penegakan hukum bagi kapal asing, termasuk bagi para pengusaha Indonesia yang memfasilitasi terjadinya praktik tersebut.

Dengan melihat potensi yang ada, termasuk di wilayah perairan pesisir luar Jawa, upaya peningkatan teknologi atau armada penangkapan memang merupakan suatu keharusan. Namun, upaya pengembangan kapasitas penangkapan tersebut mesti mempertimbangkan beberapa hal, mengingat perubahan teknologi akan memengaruhi perubahan sosial.

Sosiologi Masyarakat Pesisir

Tabel 10. Perkembangan Modernisasi Alat Tangkap di Indonesia.

Jenis Alat Tangkap	Keterangan
<i>Trawl</i> (Jaring tarik)	
Jaring <i>Muroami</i>	Jaring ini diperkenalkan di Indonesia oleh orang Jepang sebelum perang dunia kedua.
Jaring <i>Lampara</i>	Jaring ini diperkenalkan pertama kali oleh para nelayan dari Kepulauan Fiji yang membawa KM. Seniroso dan KM. Senileba ke air tembaga pada Tahun 1952.
Jaring <i>Otoshi-ami</i> (<i>Teichi-ami/set-net</i>)	Jaring ini dimulai dicoba di Indonesia pada Tahun 1956.
<i>Tuna Longline</i>	Percobaan penangkapan tuna dengan pancing rawai atau <i>long line</i> dilakukan pada Tahun 1956-1958.
Jaring insang (<i>gillnet</i>)	Semula jarring insang yang dipakai di Indonesia terbuat dari benang lawe yang disamak secara tradisional. Sejak Tahun 1963 diperkenalkan jarring insang dari benang sintesis.
Jaring lingkaran (<i>purse seine</i>)	<i>Purse seine</i> berkembang dengan pesat sejak Tahun 1964.
Pukat Udang	Penggunaan TED (<i>Turtle Excluder Device</i>) di Indonesia dimulai sejak Tahun 1982.
Rumpon laut dalam (<i>Payaos</i>)	Penggunaan alat pengumpul ikan pelagis besar ini di Indonesia telah dirintis oleh Ditjen Perikanan pada Tahun 1980-1983.
Lampara Dasar, Giltong dan Lapdu	Alat tangkap ini dikembangkan untuk menggantikan <i>trawl</i> . Rancang bangun alat tangkap ini oleh BPPI pada Tahun 1980-1983.
Terumbu Karang Buatan (TKB)	Mulai dilakukan pada Tahun 1985 oleh Pemda DKI dengan menenggelamkan 100.000 becak dan lebih dari 200 ex bus/truck di perairan Teluk Jakarta. Pada waktu itu TKB masih dikenal dengan sebutan rumpon.

Sumber: Soewito, *et.al* (2000).

Dalam kegiatan penangkapan, modernisasi mulai berkembang di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda. Pada waktu itu dilakukan

percobaan dengan menggunakan jaring payang di Teluk Jakarta yang dilakukan oleh *Instituut voor Zeevisserij*. Tahun 1948-1951, di perairan Teluk Jakarta terdapat dua tipe perahu motor.⁴ Sejak saat itu motorisasi perikanan terus berkembang diiringi dengan perkembangan berbagai jenis alat tangkap. Tabel berikut ini menjelaskan awal perkembangan berbagai alat tangkap perikanan di Indonesia.

Kotak 3. Modernisasi alat tangkap di Nelayan Bajo Wakatobi

Perkembangan teknologi tidak serta merta muncul dengan sendiri. Pengaruh global dengan kemajuan teknologi yang terjadi pada perkembangan mesin dan alat tangkap nelayan merupakan bentuk globalisasi dari modernisasi teknologi alat tangkap. Dekade 1970-an modernisasi alat tangkap melanda dunia pertanian dan perikanan sebagai bentuk ekspansi pemanfaatan sumber daya alam terutama di negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Tujuan utama dari penggunaan teknologi adalah untuk mendapatkan keuntungan secara efektif dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Berdasar hasil penelitian di Wakatobi (2012), didapatkan bahwa pengaruh perkembangan teknologi penangkapan ikan di Wakatobi terjadi pada dekade 1970-an dengan ditandai dikenalnya motorisasi- merk Kubota produksi dari Jepang.

Sumber: Suncoko (2012).

Road map perkembangan teknologi motorisasi penangkapan ikan konsumsi karang hidup di Wakatobi adalah sebagai berikut:

4 Soewito *et.al* (2000) Sejarah Perikanan Indonesia. Ditjen Perikanan Jakarta.

Tabel 11. Perkembangan teknologi dalam komunitas nelayan Bajo Wakatobi

Tahun	Perkembangan Teknologi	Keterangan
1970	Mesin Kubota (diesel)	7 PK, untuk mesin Sope (perahu khas Suku Bajo) (4 GT).
1972	Mesin Kubota (diesel)	8 PK, untuk mesin Sope (6 GT).
Dekade 1970-an akhir	Johnson (bensin)	8, 12, 15, 25, 40 PK. Pada dekade ini juga sudah ada katinting dari merk mesin Honda dan Kawasaki. Nelayan sudah mulai ramai menggunakan Johnson
Dekade 1990-an	Yanmar (Jepang) (diesel)	Untuk bodi susun/batang (perahu kayu dengan ukuran lebih besar 3 x lipat dari sampan), hampir seluruh nelayan menggunakan bodi.
Dekade 2000-an	Djiandong (Cina) (diesel)	Untuk bodi susun/batang.

Sumber: Suncoko (2012).

Begitu pula perubahan teknologi budi daya. Teknologi budi daya perairan bagaimana pun masih perlu terus dipacu untuk meningkatkan produktivitas guna peningkatan kesejahteraan para pembudi daya ikan. Hal ini seiring dengan transformasi masyarakat ke arah ciri industrial, yang kemampuan kontrolnya terhadap sumber daya semakin besar sehingga budidaya perikanan pun menjadi sangat penting.

Modernisasi perikanan melalui peningkatan kualitas alat tangkap pada umumnya didorong untuk meningkatkan produksi perikanan. Berbagai pengalaman menunjukkan hal demikian. Secara umum ada beberapa pengaruh positif dari kelangsungan modernisasi perikanan tersebut, antara lain:

- 1) Terjadinya peningkatan produksi perikanan;
- 2) Meningkatnya pendapatan nelayan;

3) Mendorong terciptanya lapangan kerja baru.

Namun, tidak dapat dimungkiri juga bahwa modernisasi perikanan juga seringkali menyebabkan berbagai permasalahan. Berbagai studi menunjukkan bahwa modernisasi perikanan sering menyebabkan ketimpangan antarnelayan karena kesempatan untuk memperoleh bantuan teknologi dan modal sering bias kepada segelintir nelayan, serta ketimpangan pendapatan antara nelayan buruh dengan pemilik kapal.⁵ Begitu pula modernisasi perikanan juga tak jarang menyebabkan terjadinya konflik nelayan.⁶

Konsep Formasi Sosial

Salah satu teori yang dapat menjelaskan bagaimana pengaruh modernisasi terhadap perubahan sosial adalah teori formasi sosial. Pada umumnya, modernisasi perikanan akan menyebabkan terjadinya perubahan formasi sosial. Konsep pokok formasi sosial adalah cara produksi (*mode of production*) yang terdiri atas kekuatan dan hubungan produksi. Kekuatan produksi mencakup alat-alat kerja, manusia dan kecakapannya, dan pengalaman-pengalaman dalam produksi (teknologi). Sementara itu, hubungan produksi adalah hubungan kerja sama atau pembagian kerja antara manusia yang terlibat dalam proses produksi, yakni struktur pengorganisasian sosial produksi, seperti hubungan antara pemilik modal dan pekerja. Hubungan-hubungan produksi tersebut bukan hanya ditentukan oleh tingkat perkembangan kekuatan produksi dan struktur kelas yang tercipta dalam masyarakat, melainkan juga oleh tuntutan efisiensi produksi (Magnis Suseno 1999).

⁵ Kusnadi (2000) *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial* (Bandung: HUP) 6
⁶ Satria (2001) *op.cit.*

Formasi sosial merupakan gejala yang melibatkan dua atau lebih cara produksi hadir secara bersamaan dalam masyarakat, dan salah satu cara produksi mendominasi yang lainnya (Budiman, 1995). Kondisi dengan cara produksi kapitalis dominan disebut formasi sosial kapitalis. Begitu pula ketika cara produksi tradisional atau feodal yang dominan. Konsep formasi sosial tersebut penting untuk dipahami, sehingga masyarakat tidak lagi dilihat secara hitam putih. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk merombak formasi sosial tradisional menjadi formasi sosial kapitalis. Dalam proses transformasi ini, dua cara produksi atau lebih akan melakukan artikulasi, dan pada umumnya cara produksi kapitalis akan mendominasi. Yang kemudian patut diperhatikan adalah apakah terpinggirkannya cara produksi tradisional dalam formasi sosial kapitalis merupakan hasil adaptasi ataukah merupakan “kekalahan”. Kalau merupakan adaptasi, modernisasi akan lebih merupakan instrumen percepatan evolusi. Sebaliknya, kalau merupakan “kekalahan”, modernisasi akan bersifat *zero sum game*, dan ini merupakan potensi konflik.

Fenomena “kekalahan” nelayan tradisional terlihat ketika berjayanya alat tangkap *trawl* sejak tahun 1970-an. Pada kurun waktu tersebut, di sepanjang pesisir Pulau Jawa terdapat kompetisi yang tidak seimbang antara alat tangkap tradisional dengan *trawl*. Pada akhirnya kehadiran *trawl* tersebut mempercepat terbentuknya formasi sosial kapitalis di sepanjang pesisir Jawa. Namun, harus diakui bahwa terbentuknya formasi sosial sejak tahun 1970-an tersebut memakan biaya sosial dan lingkungan yang tidak kecil. Konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan *trawl* tak terhindarkan. Begitu pula ketika kerusakan sumber daya hayati pesisir terjadi hingga pada tahun 1980, dikeluarkan Kepres yang

melarang pengoperasian *trawl*. Contoh perubahan formasi sosial akibat perubahan teknologi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 12. Formasi Sosial Masyarakat Nelayan Pekalongan Periode 1972-1980.

Aspek	Cara Produksi	
	Cara Baru (modern)	Cara Lama (Tradisional)
Kekuatan Produksi		
Alat Produksi	<i>Trawl, Puerse seine</i>	Cantrang dan Klitik
Tenaga Kerja	Buruh nelayan semi-bebas	Buruh nelayan bebas
Hubungan Produksi		
Ukuran dan unit produksi	Kelompok besar (7-10 orang) dan (16-20 orang)	Kelompok kecil (3-4 orang)
Struktur	Hierarki	Egaliter
Sifat	Semi eksploitatif dan eksploitatif	Non-eksploitatif

Sumber: Satria (2001).

Akibat pelarangan pengoperasian *trawl*, maka terjadi pula perubahan teknologi penangkapan, yakni *purse seine* menjadi dominan. Formasi sosial yang tercipta berbeda. Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Namun, perubahan teknologi penangkapan tidak saja menimbulkan konflik antar cara produksi, melainkan juga ternyata menyebabkan timbulnya konflik internal cara produksi. Dalam formasi sosial yang baru di kasus Pekalongan, “kekalahan” nelayan tradisional terjadi tatkala mereka melakukan adaptasi terhadap modernisasi dengan menjadi ABK kapal *trawl*, kapal *pursein*, dan seterusnya. “Kekalahan” mereka tidak lagi dalam pertarungan antar cara produksi, melainkan dalam hubungan produksi. dengan memasuki cara produksi baru yang lebih modern. Mereka harus

berhadapan dengan hubungan produksi yang sama sekali berbeda dengan hubungan produksi pada cara produksi tradisional. Hubungan produksi pada cara produksi baru bersifat hierarkis dengan spesialisasi pekerjaan yang semakin tinggi.

Tabel 13. Formasi Sosial Periode 1980-1990-an.

	Cara Baru			Cara Lama	
Kekuatan produksi					
Jenis alat produksi	Purse seine	Sope (mesin duduk)	Motor tempel	Cantrang	Klitik
Sifat alat produksi	Modern	Semi-modern	Semi-modern	Tradisional	Tradisional
Tenaga Kerja	Buruh permanen	Buruh semi permanen	Buruh bebas	Buruh bebas	Buruh bebas
Hubungan produksi					
Ukuran unit produksi	Kelompok besar (16-20 orang)	Kelompok kecil (4-6 orang)	Kelompok kelompok (3-4 orang)	Kelompok kecil (3-4 orang)	Kelompok kecil (3-4 orang)
Struktur	Hierarki	Semi Hierarki	Egaliter	Egaliter	egaliter
Sifat	Eksplloitatif dan semi eksploitatif	Semi eksploitatif	Non-eksploitatif	Non-eksploitatif	Non-eksploitatif

Sumber: Satria (2001).

Bagaimana pun, “kekalahan” para ABK adalah pola bagi hasil yang sering bias kepada pemilik kapal (juragan). Mereka sepenuhnya menyadari “kekalahan” itu, tak berdaya. Hingga kini belum ada organisasi nelayan yang secara sistematis memperjuangkan kepentingan buruh nelayan tersebut. Sudah saatnya HNSI memperlebar cakupan perjuangannya sampai pada membela kepentingan buruh nelayan. Hal itu memang sulit terwujud karena HNSI pada umumnya dikelola oleh para pemilik kapal, sehingga terus terjadi konflik

kepentingan selaku pimpinan HNSI dengan kepentingan pemilik kapal. Di beberapa daerah sudah mulai berkembang organisasi nelayan non-HNSI, dan ini merupakan kecenderungan yang positif bagi perjuangan membela buruh nelayan.

Tabel 14. Lokasi Kontradiktif dalam Hubungan Kelas

No	Proses hubungan kelas		
1. Kelas	Pemilik ekonomi: Kontrol atas investasi, sumber daya.	Penguasaan: Kontrol atas produksi fisik.	Penguasaan: Kontrol atas tenaga kerja orang lain.
2. Borjuis			
a. Kapitalis tradisional	+	+	+
b. Eksekutif tinggi	+	+	+
c. Manajer tinggi	Parsial	+	+
d. Manajer menengah	Minimal	Parsial	Parsial
e. Teknokrat	Minimal	Minimal	Minimal
f. Mandor	-	-	Minimal
3. Majikan kecil	+	+	Minimal
4. <i>Petty borjuis</i>	+	+	-
5. Pekerja semi-otonom	Minimal	Minimal	-
6. Proletar	-	-	-

Sumber: Wright (1982).

Keterangan:

+ : kontrol sepenuhnya

parsial : kontrol lemah

- : tidak ada kontrol

minimal : kontrol residual

Lebih jauh, analisis formasi sosial secara lebih detail, khususnya untuk masyarakat yang sudah memiliki usaha-usaha industrial, dapat menggunakan kerangka Wright (1982). Wright juga menggunakan analisis formasi sosial untuk melihat gejala masyarakat transisional. Masyarakat transisional yang dimaksud adalah masyarakat yang

memiliki keragaman cara produksi yang cukup tinggi, dari borjuis kecil hingga borjuis besar. Kerangka Wright tampak lebih realistis dan lengkap karena juga mempertimbangkan posisi-posisi sosial yang selama ini jarang dilihat, seperti posisi pekerja semi-otonom (guru, dokter, peneliti, dsb) dan borjuis kecil serta memerinci bagaimana tingkat kontrol setiap posisi baik dalam cara produksi borjuis besar maupun borjuis kecil sebagaimana ditunjukkan Tabel berikut:

Pola Bagi Hasil

Pola bagi hasil merupakan salah satu bagian penting dalam hubungan produksi usaha perikanan. Pada komunitas nelayan tradisional tertentu berlaku sistem bagi hasil yang tidak menggunakan uang sebagai alat ukur melainkan lebih menekankan pola bagi hasil tangkapannya. Sistem ini berlaku, misalnya, di Lamalera dengan mengikuti tata cara adat yang berlaku. Masyarakat Lamalera membedakan hasil tangkapan ke dalam dua golongan, yaitu ikan besar (paus, lumba-lumba, hiu, dan pari) dan ikan kecil (tuna, cakalang, tongkol, penyu, dll).

Pembagian hasil tangkap untuk jenis ikan besar hanya dilakukan oleh orang tertentu dan biasanya adalah pemilik perahu (*tèna alep*) yang bertugas mengatur pembagian porsi untuk masing-masing anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada umumnya pembagian hasil untuk jenis ikan besar menggunakan tiga patokan dasar, yaitu bagian untuk tuan tanah (*leffo tana alep*), bagian untuk awak perahu (*mèng alep*) dan bagian untuk keluarga suku pemilik perahu. Cara pembagian untuk paus berbeda dengan ikan pari dan ikan-ikan lainnya.⁶

6 Ambrosius Oleona & Pieter Tedu Bataona (2001) *Masyarakat Nelayan Lamalera dan Tradisi Penangkapan Paus* (Bogor: Lembaga Gelekat Lefo Tanah)

Pola bagi hasil paus seperti di atas merupakan contoh pola bagi hasil pada komunitas tradisional. Tentu pola bagi hasil ini berbeda dengan pola bagi hasil pada masyarakat yang telah mengalami perkembangan kapital. Bagaimana pun proses kapitalisasi atau perubahan alat tangkap akan memengaruhi pola bagi hasil. Seperti diketahui, ciri umum hubungan produksi pada usaha perikanan tangkap adalah adanya sistem bagi hasil. Sistem ini tercipta sebagai konsekuensi dari tingginya tingkat risiko usaha penangkapan. Sistem bagi hasil tersebut sangatlah beragam seiring dengan perbedaan karakteristik alat produksi dan karakteristik sosial, sebagaimana terlihat pada studi Juwono (1998) di Kirdowono, Kusnadi (2000) di Situbondo, serta Satria (2001) di Pekalongan.

Pola Bagi Hasil di Kirdowono⁷

Hasil studi Juwono (1998) menunjukkan bahwa sistem bagi hasil antara *juragan-pandega* di masyarakat nelayan Kirdowono dibagi atas dua tipe, yaitu aturan biasa dan aturan darurat. Aturan darurat dilakukan apabila hasil tangkapan yang diperoleh sedikit, sehingga menggunakan model *serang rata* atau penghasilan dibagi sama rata antara juragan dan *pandega*. Sedangkan, aturan biasa dibedakan menjadi dua model, yaitu model *telung bagen* dan *papat-enem*. Model *telung bagen*, yaitu pembagian hasil dengan juragan mendapatkan tiga porsi *bagen*; *bagen awak*, *bagen prau*, dan *bagen jaring*, sementara *pandega* masing-masing hanya mendapatkan satu *bagen*. Cara ini biasanya diterapkan pada perahu-perahu yang memerlukan sedikit *pandega*. Adapun model *papat-enem*, yaitu juragan mendapatkan 40% dan *pandega* mendapat 60%. Cara ini diterapkan pada perahu-perahu yang diawaki banyak *pandega*.

⁷ Kasus ini bersumber dari Juwono (1998) *Ketika Nelayan Harus Sandar Dayung* (Jakarta: Kophalindo)

Sebagai contoh, sebuah perahu kantong (ber*pandega* empat orang) untuk suatu pelayaran mendapat hasil Rp.40.000. Hasil tersebut terlebih dahulu dikurangi biaya perbekalan sebesar Rp.5.000. Sisanya, Rp.35.000 dibagi dalam tujuh bagian; tiga bagen juragan dan (4 x 1) *bagen pandega*. Hasilnya, juragan mendapat Rp.15.000 dan setiap *pandega* mendapat Rp.5.000. Khusus untuk juru mudi, ia masih mendapat bonus dari juragan sebesar 10% dari penerimaan juragan yaitu Rp.1.500.

Dalam sistem bagi hasil model *telung bagen*, juragan mendapatkan bagian sedikit lebih besar daripada yang diterima melalui model *papat-enem*, yaitu juragan menerima sekitar 42% dan *pandega* (biasanya berjumlah empat orang) menerima 52% dari hasil tangkapan. Namun, hal ini tidak dipermasalahkan oleh para *pandega*, karena mereka rata-rata menerima 14,5% dari seluruh hasil. Sementara itu, pada model *papat-enem*, bagian juragan “hanya” 40%, tetapi 60% jatah *pandega* harus dibagikan kepada 8 hingga 30 *pandega*. Penurunan angka 2% itu dapat dianggap sebagai pengorbanan juragan untuk menambah sedikit hasil bagi *pandega*.

Rumus Model *Telung Bagen* menurut Juwono (1998), yaitu:

$$X = \frac{Y - Z}{3 + n \text{ pandega}} \times 3$$

Keterangan:

X = Hasil Juragan

Y = Hasil Penjualan

Z = Biaya Perbekalan

3 = Porsi Bagen Juragan

Sementara itu, dalam sistem bagi hasil di antara *pandega* terdapat dua model, yaitu *undho usuk* dan *serang rata*. Model *undho usuk* (bertingkat berjenjang) diterapkan pada perahu yang

mempunyai banyak *pandega*. Pada model ini penghasilan seorang *pandega* dapat berbeda satu dengan yang lain, bergantung pada statusnya. *Pandega* biasa mendapat satu porsi *bagen* yang dikenal dengan *bagen awak* atau penghasilan badan. *Pandega* pegawai mendapat satu porsi *bagen awak* ditambah *bagen pegawe*-nya; dan *bagen pegawe* ini jumlahnya berbeda-beda antara satu jabatan dengan jabatan lain.

Model *serang rata* digunakan pada perahu-perahu yang mempunyai *pandega* sedikit. Diterapkannya model *serang rata* mempunyai alasan sosial, yaitu berfungsi sebagai jaminan sosial untuk perahu berawak banyak ketika hasil tangkapan yang diperoleh sangat sedikit. Pada model ini, setiap *pandega* mendapat hasil yang sama jumlahnya dengan *pandega* lain. Juru mudi dan *pandega* pegawai lainnya mengorbankan hasil mereka demi menambah penghasilan *pandega* biasa yang menjadi bawahan mereka. Sistem bagi hasil ini berbeda antaralat tangkap seperti ditunjukkan Juwono (1998) pada Tabel berikut.

Tabel 15. Penerapan Aturan Bagi Hasil di Kirdowono

Tipe Perahu	Bagi Hasil	
	Juragan-Pandega	AntarPandega
<i>Gillnet</i>	<i>Telung Bageu</i>	<i>Serang rata</i>
<i>Kantong</i>	<i>Telung Bageu</i>	<i>Serang rata</i>
<i>Pukat Pantai</i>	<i>Papat-enem</i>	<i>Undho usuk</i>
<i>Purseine Mini</i>	<i>Papat-enem</i>	<i>Undho usuk</i>
<i>Cantrang</i>	<i>Papat-enem</i>	<i>Undho usuk</i>
<i>Gemplo</i>	<i>Papat-enem</i>	<i>Undho usuk</i>

Sumber: Juwono (1998).

Pola Bagi Hasil di Pesisir-Situbondo⁸

Proses produksi dalam kehidupan nelayan perahu *sleret* di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki melibatkan dua kelompok yaitu *orenga* (pemilik perahu) dan *pandhiga* (pihak yang mengoperasikan perahu). Dalam proses tersebut terdapat sistem bagi hasil, yaitu sistem yang mengatur pembagian hasil tangkapan antara *orenga* dan *pandhiga* berdasarkan norma-norma yang berlaku (Kusnadi 2000).

Di Desa Pesisir berlaku dua sistem bagi hasil perahu *sleret*: sistem bagi tiga (*telon*) dan sistem bagi dua (*maron*). Sistem bagi tiga yang dimaksud adalah hasil tangkapan dibagi menjadi tiga bagian, dengan peruntukan satu bagian untuk *orenga* dan dua bagian untuk *pandhiga*; sedangkan pada sistem bagi dua, hasil tangkapan dibagi dua bagian dengan peruntukan satu bagian untuk *orenga* dan satu bagian lainnya untuk *pandhiga*. Namun, sistem yang umumnya digunakan oleh nelayan Desa Pesisir adalah sistem bagi tiga (*telon*).

Perbedaan sistem bagi tiga dengan sistem bagi dua terletak dalam penanggungungan biaya operasi dan biaya perbaikan. Pada sistem bagi tiga, bagian yang diterima *orenga* merupakan penghasilan bersih tanpa harus mengeluarkan lagi biaya perbaikan kerusakan, peralatan tangkap, dan kebutuhan bahan bakar.

Kebutuhan itu diambil dari dua pertiga bagian yang menjadi bagian *pandhiga*. Di sisi lain, sistem bagi dua membebankan biayabiaya tersebut kepada *orenga*. Bagian yang diterima oleh *Pandhiga* merupakan pendapatan bersih. Pembagian hasil (*nyancang*) dilakukan oleh nelayan sebelum turun ke darat, dan bentuknya tidak berupa uang melainkan ikan.

Pembagian hasil untuk *pandhiga* memiliki sistem tersendiri. Bagian yang diterima oleh masing-masing *pandhiga* disebut sara'an.

8 Kasus ini bersumber dari Kusnadi, *op.cit.*

Masing-masing *pandhiga* mendapatkan nilai *sara'an* yang berbeda-beda, bergantung pada spesialisasi pekerjaannya. Spesialisasi pekerjaan itu menunjukkan tanggung jawab dan berat atau ringannya pekerjaan tersebut. Nilai *sara'an* untuk masing-masing spesialisasi pekerjaan dalam mengoperasikan perahu sleret dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 16. Pembagian Kerja dan Perolehan Hasil

No.	Spesialisasi	Jumlah Pandhiga	Jumlah Sara'an
1.	Jhuragan	1	4
2.	Kel-bekel	1	2
3.	Madar' prao	2	4
4.	Tokang Jaga'an	2	4
5.	Tokang Jaga Mesin	4	5
6.	Tokang Pancer	3	4
7.	Tokang lampu	6	9
8.	Tokang Ngoras aeng	2	3
9.	Tokang Nyobeng	1	1
10.	Tokang Ngereng	4	6
11.	Tukang Nggorit	7	10
12.	Tokang Du'um	1	1
Jumlah		34'	45

Sumber: Kusnadi (2000).

3. Pola Bagi Hasil di Pekalongan⁹

Proses pembagian hasil perikanan tangkapan pada nelayan *purse seine* besar Kodya Pekalongan memiliki pola yang sudah ditentukan secara tertulis. Sistem pembagian hasil ini terlebih dahulu disepakati oleh nelayan pemilik kapal *purse seine* dengan nelayan bukan pemilik kapal (ABK) yang akan bekerja pada kapal miliknya.

⁹ Ilustrasi pola bagi hasil di Pekalongan bersumber dari naskah perjanjian kerjasama bagi hasil untuk jenis alat tangkap *purse seine* besar pada tahun 1998.

Setiap kapal *purse seine* besar umumnya memiliki anak buah kapal (ABP) yang terdiri atas nahkoda (1 orang), wakil nahkoda (1 orang), kempitan (1 orang), motoris (2 orang), pelopor (1 orang), juru arus (2 orang) dan juru *gidang* (2 orang) yang masing-masing memiliki perannya sendiri-sendiri.

Atribut-atribut dari pola bagi hasil pada nelayan *purse seine* besar tersebut terdiri atas: pertama, *raman* bersih yaitu penerimaan hasil penjualan lelang ikan dari TPI setelah dipotong 3% dan sewa basket; kedua, *lawuhan* dan bonus; ketiga, perbekalan yang terdiri dari kebutuhan bahan bakar seperti oli, solar, dan minyak tanah, kebutuhan pengawetan ikan berupa es dan garam, kebutuhan bahan pangan ABK selama penangkapan ikan di laut, biaya bongkar muat es ke kapal, uang transpor ABK dan biaya bongkar ikan di TPI, biaya suku cadang yang dibawa ke laut, ongkos perbaikan jarring, dan biaya perizinan; keempat, penyusutan jarring; kelima, bagian pihak kesatu (nelayan pemilik); dan keenam, bagian pihak kedua (nelayan ABK). Besarnya masing-masing bagian tersebut dapat dilihat dalam tabel di samping ini.

Tabel 17. Sistem Bagi Hasil Pada Perikanan Tangkap *Purse Seine* Besar Kodya Pekalongan

Atribut Bagi Hasil	Besarnya	
Raman bersih		= Rp.A
Lawuhan dan bonus	= 12% X A	= Rp.B
	Sisa 1 (A-B)	= Rp.C
Perbekalan		= Rp.D
	Sisa 2 (C-D)	= Rp.E
Penyusutan Jaring	= 30% X E	= Rp.F
	Sisa (E-F)	= Rp.G
Bagian Pihak Kesatu	= 50% X G X F	
Bagian Pihak Kedua	= 50% X G X B	

Sumber: Satria (2001).

Sementara itu, besarnya biaya untuk *lawuhan* dan bonus masing-masing ABK memiliki persentase yang berbeda sesuai dengan peran yang diembannya. Perbedaan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 18. Pembagian *Lawuhan* dan Bonus ABK

Atribut	Besarnya
Lawuhan	4,5%
Nahkoda	4,25%
Wakil Nahkoda	0,5%
Kempitan	0,25%
Motoris (2 orang)	1,0%
Pelopor	0,25%
Juru Arus (2 orang)	0,75%
Juru Gidang (2 orang)	0,75%
Lain-lain	0,5%

Sumber: Satria (2001).

Kesepakatan pola bagi hasil antara nelayan pemilik dengan nelayan bukan pemilik pada nelayan *purse seine* akan batal dengan sendirinya dan dibuat kesepakatan lagi apabila terdapat hal-hal berikut: 1. raman bersih kurang dari perbekalan, maka kekurangannya dibebankan pada perbekalan berikutnya dan pihak kesatu wajib memberikan pinjaman kepada pihak kedua sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah); 2. raman bersih sama dengan perbekalan, maka pihak kesatu wajib memberikan pinjaman kepada pihak kedua sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah); 3. raman bersih sampai dengan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setelah dipotong perbekalan maka sisanya dibagi dua: 50% (lima puluh persen) untuk pihak kesatu dan 50% (lima puluh persen) untuk pihak kedua; dan 4. apabila bagian yang diterima pihak kedua seperti dimaksud di

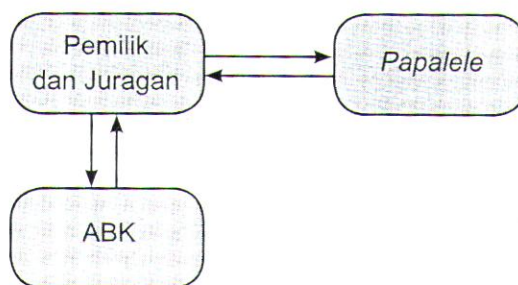
atas kurang dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), maka pihak kesatu masih wajib memberikan pinjaman sehingga jumlah yang diterima pihak kedua mencapai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

Pola Bagi Hasil di Rote Ndao

Kajian penelitian tentang bagi hasil nelayan di Rote Ndao sangat bervariasi berdasar tipologi nelayan dan jenis komoditas tangkapnya. Terdapat tiga pola bagi hasil nelayan yaitu: nelayan lampara, nelayan tuna dan nelayan lintas batas untuk komoditas teripang, sirip hiu maupun lola.

Kotak 4. Bagi Hasil Nelayan *Lampara* atau *Bagan* (komoditas ikan halus)

Papalele (pengepul) ikan yang memberikan modal kepada nelayan menentukan pola bagi hasil di nelayan *lampara siang* atau *bagan malam*. Terdapat pola bagi hasil antara nelayan *lampara siang* dengan *bagan malam*. Modal tersebut adalah bahan bakar minyak (bbm) dan bekal logistik untuk melaut. Sistem pengembalian pembayaran hutang *bbm* dan logistik dilakukan dengan cara memotong harga penjualan dari nelayan yang berhutang. *Papalele* membeli ikan kepada nelayan dengan harga standar dari *papalele* lainnya tetapi memperoleh jumlah ikan yang banyak dibandingkan apabila membeli kepada nelayan tanpa hutang, sehingga menyebabkan keuntungan *papalele* menjadi dua kali lipat. Ilustrasi ikatan ABK-Juragan-Pemilik Kapal terlihat pada skema di bawah:



Skema Ikatan Nelayan *Lampara/Bagan*

Lanjutan kotak 4

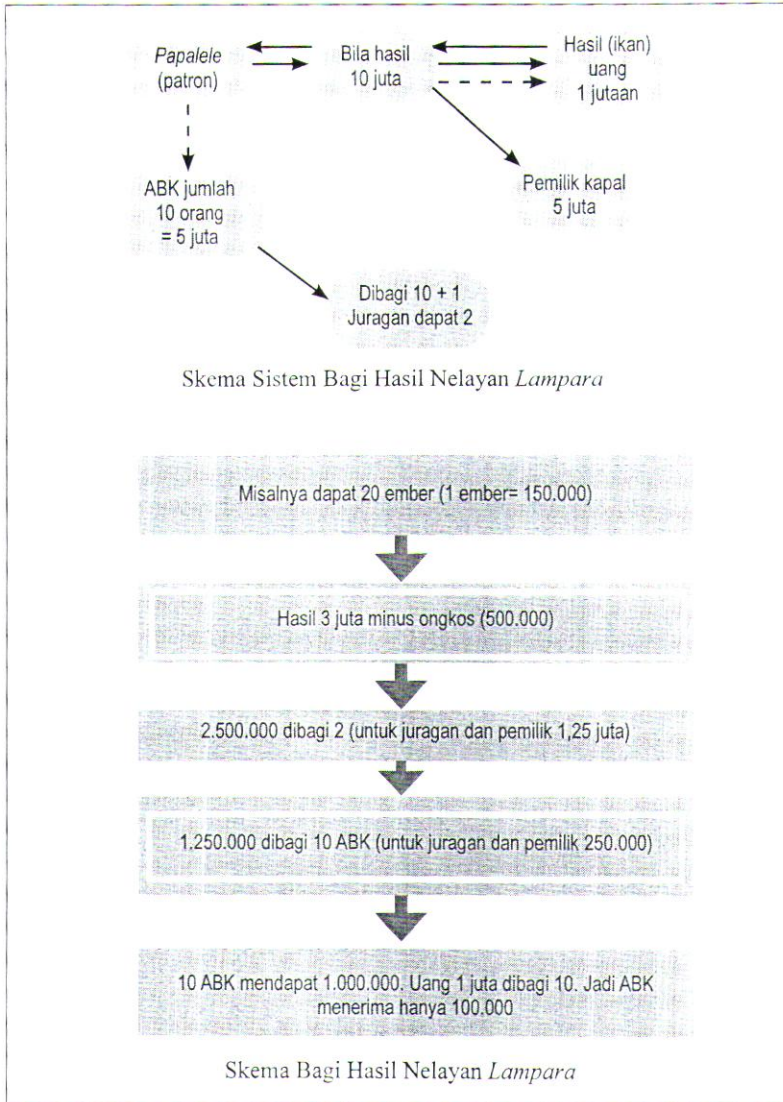
Temuan hasil pola bagi hasil pada nelayan lampara siang di Komunitas Bajo Oenggae, Pantai Baru, Rote Ndao terdapat aliran pinjaman yang ditandai dengan garis panah hitam dan aliran ikan ditandai dengan garis panah merah. *Papalele* tidak hanya berlaku sebagai pembeli saja, akan tetapi sebagai pemberi pinjaman BBM terhadap ABK nya.

Sebagai contoh: ikan tongkol, dengan harga dan jumlah yang sama, misalnya tiga ekor tongkol harganya Rp.20.000, maka *papalele* tersebut akan mengambil 4 atau 5 ekor dan dibeli dengan harga yang sama. *Papalele* mempunyai *power* dalam memberikan modal dan pinjaman bbm dan logistik kepada nelayan *lampara*. Pengembalian pinjaman dengan cara diangsur sampai lunas.

Berbeda dengan studi kasus nelayan *bagan malam* di Desa Batutua, Rote Ndao, sistem pinjaman perongkosan dan perbekalan biasanya mengambil dari yang punya kios yang merupakan *patron* untuk dirinya. Pengembalian hutang perongkosan akan dibayar secara angsuran melalui pemotongan ikan yang diambil. Kios disini berperan sebagai pemberi pinjaman perongkosan dan juga menjadi *papalele*. Kasus di Batutua cukup berbeda dan menarik, di sini kios tidak serta merta mengambil seluruh hasil kepada dirinya, tetapi membebaskan nelayan menjual kepada *papalele* lainnya.

Secara garis besar ragam ikatan patron-klien yang ada di komoditas ikan halus nelayan *lampara siang* dan *bagan malam* lebih cenderung ke arah ikatan hutang antara majikan/bos sebagai pemilik kapal/modal logistik melaut sebagai debiturnya dengan ABK (nelayan) sebagai krediturnya. Antara keduanya mempunyai peran timbal balik, akan tetapi ABK lebih cenderung dirugikan dalam hal pembagian hasil.

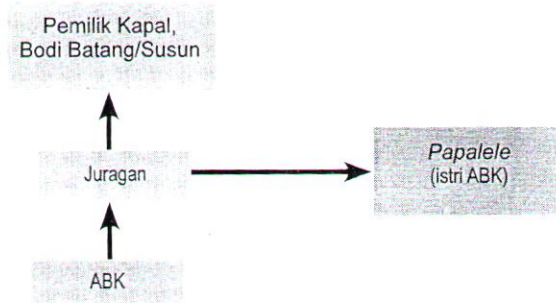
Lanjutan kotak 4



Sumber: Satria, Suncoko dan Sofyanto (TNC-FEMA IPB, 2013).

Kotak 5. Nelayan Tuna (Bajo Papela)

Khusus komoditas tuna, pemilik *bodi* menanggung biaya perongkosan dengan dimasukkan ke dalam beban perongkosan dengan biaya hasil dipotong biaya perongkosan yang ditanggung antara pemilik *bodi* dan nelayan. Rata-rata biaya perongkosan dalam sekali melaut Rp.7.000.000. Dengan perhitungan kotor, pendapatan antara pemilik kapal dan ABK sekitar Rp.8.000.000. Hal ini senada dengan yang dituturkan oleh salah satu pemilik kapal, sekaligus patron bagi ABK nelayan tuna di Bajo Papela. Strategi pemilik kapal dalam menjaga ABK, memberikan biaya sosial berupa sumbangan Rp.500.000 ketika ada acara hajatan atau keluarga. Sistem bonus juga diberikan oleh pemilik *bodi* yang merupakan strategi dari pemilik dari pemilik *bodi* sebesar Rp.150.000 (untuk 10 kali melaut), sekali melaut bonusnya Rp.15.000. Selain bonus dan sumbangan sosial, terdapat juga biaya jaminan sosial untuk keluargayang ditinggalkan. Jaminan keselamatan tidak dipentingkan karena tidak diperhatikan lebih dalam penangkapan, walaupun pada dasarnya pemilik *bodi* tidak menyuruh nelayan untuk melaut.



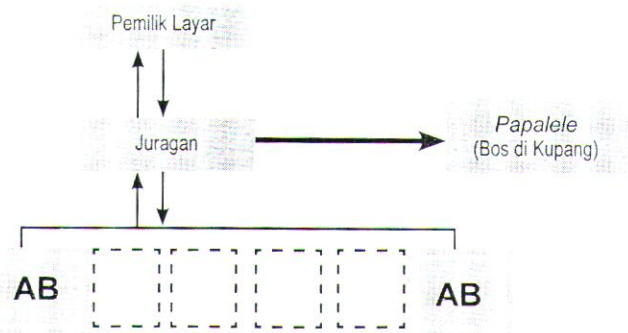
Skema Bagi Hasil pada Nelayan Tuna di Bajo Papela Rote

Sumber: Satria, Suncoko dan Sofyanto (TNC-FEMA IBB, 2013)

Kotak 6. Nelayan Lintas Batas untuk Komoditas Teripang, Sirip Hiu, Lola

Pemilik perahu layar memberikan perongkosan yang dianggap sebagai hutang bagi ABK yang ikut berlayar ke Pulau Pasir. Biaya perongkosan dibebankan kepada nelayan sebagai biaya yang dipinjamkan oleh pemilik kapal. Apabila mendapat hasil, maka hasilnya dipotong dengan biaya perongkosan. Bekal seperti rokok, ABK meminjam ke kios, dan di lunasi ketika sudah ada hasil. Dalam menjamin kehidupan sosial keluarga ABK, pemilik perahu layar memberikan pinjaman kepada istri yang ditinggalkan suaminya ke Pulau Pasir. Secara detail perongkosan ke Pulau Pasir adalah sebagai berikut: Modal perongkosan mencari hiu: 3-5 juta dan mendapatkan hasil 20-30 juta. Dalam menangkap Hiu ada sebanyak 7-9 ABK ikut dengan perahu layar. Rincian perongkosan adalah sebagai berikut.

1. Beras 100-150 orang (7-9 orang),
2. Air 4 drum (1 drum Rp.10.000)
3. 5 kg Gula, Rp.10.000/kg
4. Kopi 30-60 bungkus (@cap tugu buaya , Rp.500/sachet)
5. Garam satu karung, Rp.50.000
6. The 2-3 bungkus (Rp.21.000)
7. Kayu api 1 pick up sekitar 3 kubik, Rp.150.000
8. Rokok 1-2 slop, Surya 16, Rp.173.000 dan LA, > Rp.100.000 (pinjam ke kios).



Skema Bagi Hasil Nelayan Lintas Batas

Lanjutan kotak 6

Setiap kali melaut, menghasilkan puluhan ton ekor hiu 5-12 ton/sekali melaut. Pembagian hasil melaut dari lintas batas dibagi tiga setelah dikurangi dengan biaya perongkosan. Bagian tersebut, satu bagian untuk perahu, satu bagian untuk pemilik perahu layar dan satu bagian untuk ABK yang dibagi dengan sejumlah ABK yang terlibat. Setiap kali melaut, menghasilkan puluhan ton ekor hiu 5-12 ton/sekali melaut. Pembagian hasil melaut dari lintas batas dibagi tiga setelah dikurangi dengan biaya perongkosan. Bagian tersebut, satu bagian untuk perahu, satu bagian untuk pemilik perahu layar dan satu bagian untuk ABK yang dibagi dengan sejumlah ABK yang terlibat.

Sumber: Satria, Suncoko dan Sofyanto (TNC-FEMA IPB, 2013).

BAB 5

KONFLIK-KONFLIK MASYARAKAT PESISIR

Secara sosiologis, kajian konflik merupakan bagian dari kajian proses sosial. Proses sosial merupakan cara-cara berhubungan yang dapat diamati apabila perorangan atau kelompok manusia saling bertemu. Dalam proses sosial tersebut, obyek pengamatannya adalah peristiwa sosial atau perbuatan sosial (Sitorus *et. al.*, 1998) dan memiliki dua sifat, yaitu asosiatif (mendekatkan) dan disosiatif (menjauhkan). Yang tergolong asosiatif, antara lain, kerja sama, asimilasi, akulturasi, dan akomodasi. Kerja sama merupakan bentuk interaksi sosial yang dilakukan oleh beberapa orang yang didasari oleh tujuan bersama. Dalam proses ini, diwujudkan beberapa usaha yang terkoordinisasi dan terencana untuk mencapai tujuan. Di sisi lain, yang bersifat disosiatif, misalnya, persaingan, kontravensi, dan konflik.

Persaingan dapat terjadi antara orang perorangan (*rivalry*) maupun antarkelompok dalam mencapai suatu keuntungan melalui segala aspek kehidupan. Dalam proses persaingan, setiap pihak berusaha untuk menarik perhatian publik dan menguasai opini publik tanpa melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ancaman ataupun kekerasan. Persaingan yang dilakukan oleh orang perorangan atau antarkelompok melahirkan beberapa bentuk persaingan yaitu,

persaingan ekonomi, persaingan kedudukan dan peranan, dan persaingan ras (Soekanto 1995).

Jika disertai gejala-gejala ketidakpastian dan keraguan tentang seseorang dan adanya sikap tersembunyi atas gagasan dan budaya yang dimiliki, persaingan itu disebut dengan kontravensi. Sikap tersembunyi tersebut dapat pula bersumber dari rasa ketidaksenangan terhadap kepribadian seseorang yang dapat berkembang menjadi rasa benci dan curiga terhadap segala tingkah lakunya. Tapi, sikap ini tidak mellihatkan indikasi pertentangan ataupun pertikaian di kedua belah pihak. Timbulnya kontravensi dalam hubungan dua pihak dapat terlihat dari adanya, antara lain, pendapat-pendapat negatif tentang rivalnya, dan bahkan bisa berkembang menjadi isu-isu yang tidak menyenangkan di lingkungan tersebut.

Tahapan selanjutnya disebut konflik apabila kontravensi yang terjadi menciptakan ketegangan dalam hubungan kedua belah pihak karena dikuasai oleh rasa marah yang berlebihan. Situasi ini ditandai dengan tindakan menantang pihak lain, diikuti dengan ancaman dan tindakan kekerasan. Lebih ekstrem lagi, tindakan kekerasan ini diikuti oleh perasaan ingin melukai dan menghancurkan pihak lawan, sehingga tidak jarang terjadi perkelahian ataupun bentrokan antara kedua belah pihak.

Beberapa faktor yang menjadi akar penyebab terjadinya konflik, menurut Soekanto (1995), adalah perbedaan individu, perbedaan budaya, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Perbedaan individu dan perbedaan budaya terjadi karena perbedaan lingkungan yang membentuk kedua belah pihak sehingga menciptakan prinsip, nilai-nilai, kebiasaan, dan tata cara yang berbeda. Biasanya konflik akan terjadi apabila masing-masing pihak tidak bisa menerima atau menghormati prinsip atau sistem nilai yang dimiliki oleh pihak lain sehingga muncul keinginan untuk mengubah sistem tersebut.

Sebagai contoh, revolusi yang dilakukan oleh beberapa negara merupakan bentuk konflik yang terjadi antara dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Kepentingan ini biasanya didasari oleh sistem nilai yang dianut sehingga untuk mentransformasikannya dipilih jalan yang bersifat revolusioner. Revolusi biasa ditandai dengan ancaman dan tindakan-tindakan kekerasan yang menghancurkan pihak lawan.

Menurut Robbins (1974), konflik dapat digolongkan menurut intensitasnya, yaitu:

- 1) Memiliki sedikit ketidaksetujuan atau sedikit kesalahpahaman. Setiap perbedaan itu merupakan sumber konflik. Konflik yang paling ringan adalah perbedaan persepsi dan perbedaan pemaknaan terhadap suatu perkara. Perbedaan di sini masih tersimpan dalam memori individu atau kelompok yang berinteraksi.
- 2) Mempertanyakan hal-hal yang berbeda. Pihak-pihak tertentu mulai mempertanyakan hal-hal yang dianggap berbeda, tapi belum ada vonis bahwa pihak lain itu keliru.
- 3) Mengajukan serangan-serangan verbal. Perbedaan sudah diungkapkan secara terbuka dan sudah ada vonis agar pihak lain itu bersikap seperti yang diinginkan.
- 4) Mengajukan ancaman dan ultimatum. Di sini koersi verbal sudah muncul. Artinya ada suatu upaya agar pihak lain itu bersikap seperti dirinya.
- 5) Melakukan serangan fisik secara agresif. Bentuk pemaksaan sudah meningkatkan dalam bentuk koersi fisik.
- 6) Melakukan upaya-upaya untuk merusak atau menghancurkan pihak lain.

Dalam kegiatan perikanan, khususnya penangkapan ikan, konflik merupakan gejala sosial yang sering ditemukan di berbagai wilayah perairan. Gejala konflik sosial tersebut dapat dilihat dari perspektif sumber daya, yaitu konflik antarnelayan sering terjadi dalam memperebutkan sumber daya ikan yang jumlahnya terbatas.

Perebutan ini terjadi karena karakteristik sumber daya perikanan yang bersifat *open access*. Dengan karakteristik itu, seolah-olah sumber daya tersebut dapat diperebutkan siapa saja, kapan saja, dan dengan alat tangkap apa saja. Namun, sebenarnya kalau ditelusuri lebih jauh, kondisi sumber daya yang benar-benar terbuka hampir sulit ditemukan. Hal ini disebabkan, selain pemerintah pada umumnya telah memiliki regulasi pengelolaan sumber daya, juga masyarakat sendiri banyak yang telah memiliki aturan main. Karena itu, yang dapat ditemukan secara empiris adalah kondisi sumber daya yang bersifat *quasi open access*. Akan tetapi, meski secara *de jure* sumber daya telah diatur, seperti adanya jalur-jalur penangkapan ikan dan larangan penggunaan pukat harimau, secara *de facto* aturan tersebut sulit untuk ditegakkan. Akibatnya, seolah-olah laut merupakan wilayah dengan hukum rimba: yang kuat, yang menang.

Pada kondisi lain, ada hal-hal yang sebenarnya belum diatur secara *de jure*, tetapi secara *de facto* telah diatur oleh masyarakat. Inilah yang sering disebut dengan aturan lokal, hak ulayat, dan lain sebagainya. Bisa saja konflik terjadi akibat upaya penangkapan ikan hanya didasarkan pada aturan *de jure* tanpa memperhatikan aturan secara *de facto*. Tentu masyarakat yang secara *de facto* merasa memiliki aturan. Jika dilanggar aturan tersebut, misalnya, oleh nelayan pendatang, masyarakat akan menentangnya. Akibatnya, terjadilah konflik.

Anatomi Konflik

Secara anatomis, sebenarnya konflik dalam masyarakat pesisir, khususnya nelayan, dapat dibedakan atas faktor-faktor penyebabnya. Berdasarkan Satria (2009a), terdapat tujuh macam konflik sebagai berikut:

1. *Konflik Kelas*, yaitu konflik yang terjadi antarkelas nelayan dalam memperebutkan wilayah penangkapan (*fishing ground*). Nelayan tradisional merasakan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya ikan akibat perbedaan penguasaan kapital. Hal ini dapat ditemukan dalam daerah dalam bentuk konflik antara nelayan *trawl* dengan nelayan tradisional. Konflik tersebut muncul akibat beroperasinya nelayan *trawl* di daerah penangkapan nelayan tradisional.
2. *Konflik Kepemilikan Sumber daya*, yaitu konflik yang terjadi dalam isu “ikan milik siapa” atau “laut milik siapa”, yang terjadi antarkelas nelayan maupun interkelas nelayan. Atau bisa saja terjadi antara nelayan dengan pihak non nelayan, seperti antara nelayan dan para pelaku usaha lain seperti pengusaha akuakultur, wisata bahari, pertambangan ataupun dengan pemerintah itu sendiri.
3. *Konflik Pengelolaan Sumber daya* merupakan konflik yang disebabkan oleh pelanggaran aturan pengelolaan baik yang terjadi antarnelayan maupun antara nelayan dengan pemerintah. Dalam konteks ini isu yang mencuat adalah siapa yang berhak mengelola sumber daya ikan maupun sumber daya laut.
4. *Konflik Cara Produksi atau Alat Tangkap*, merupakan konflik yang terjadi akibat perbedaan alat tangkap, baik sesama alat tangkap tradisional maupun antara alat tangkap tradisional dengan alat tangkap modern yang merugikan salah satu pihak.

Konflik-konflik Masyarakat Pesisir

5. *Konflik Lingkungan*, yaitu merupakan konflik yang terjadi akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh praktik salah satu pihak yang merugikan nelayan. Konflik ini kerap terjadi antara nelayan yang sudah sadar akan keramahan lingkungan dan nelayan yang masih mempraktekan aktivitas penangkapan perikanan yang tidak ramah lingkungan dan merusak ekosistem terumbu karang ataupun periaran lainnya.
6. *Konflik Usaha*, yaitu merupakan konflik yang terjadi di darat akibat mekanisme harga ataupun sistem bagi hasil yang merugikan sekelompok nelayan. Konflik mekanisme harga terjadi antara nelayan dan pengolah ikan dan pedagang ikan, atau antara nelayan dengan nelayan
7. *Konflik Primordial*, yaitu Nelayan Tomia di Kawasan TN Wakatobi, sangat tidak suka dengan tindakan Nelayan Bajo Lamanggau (Tomia), dikarenakan sifat merusaknya yang menangkap ikan karang konsumsi hidup dengan potasium. Kerap terjadi Nelayan Tomia melaporkan tindakan mereka terhadap BTN Wakatobi maupun yang berwajib setempat.

Dengan melihat kategori konflik di atas, nampaknya penting untuk memetakan jenis konflik dengan kategori nelayan beserta contohnya sebagai berikut:

1. Konflik kelas: Studi Kasus (Satria, 2001). Hadirnya kapal *trawl* di Pekalongan yang di bawa oleh nelayan dari Bagan Siapi-api. Memicu konflik antara nelayan Bagan Siapi-api dengan nelayan tradisional Pekalongan;
2. Konflik Kepemilikan Sumber Daya: Konflik antara nelayan dengan pengusaha wisata bahari yang ada di Lombok Utara, dimana masyarakat nelayan yang menggunakan jaring *muroami*

terusir dari daerah *fishing ground* yang telah berlangsung turun temurun sejak tahun 1950-1999.

3. Konflik Pengelolaan Sumber Daya: Terjadinya pelanggaran aktivitas penangkapan ikan di wilayah yang mempunyai aturan lokal, seperti *Sasi*, *Awig-Awig*, *Panglima Laot*, dan sebagainya.
4. Konflik cara produksi atau alat tangkap: Kasus di Pulau Busung Tanjung Pinang, yaitu konflik yang terjadi antara nelayan yang menggunakan alat tangkap bubu ketam dan nelayan mini *trawl*. Hal ini dikarenakan nelayan mini *trawl* seri dioperasikan di wilayah nelayan tradisional. Nelayan tradisional menganggap nelayan mini *trawl* menyebabkan menurunnya hasil tangkapan dan merusak sumber daya hayati yang ada.
5. Konflik Lingkungan: Konflik antara nelayan dengan pelaku usaha pertambangan, juga konflik antara nelayan Trenggalek dan Pacitan terkait dengan penggunaan alat tangkap merusak oleh salah satu pihak.
6. Konflik Usaha: Terjadi pada studi kasus perusahaan ikan karang hidup yang sudah mengikuti skema dan aturan dari *Seafood Savers* dengan perusahaan yang belum mengikuti atau perusahaan yang masih menggunakan praktek-praktek *bad practice fishing*. Perusahaan *Seafood Savers* sangat peduli dengan penangkapan ramah lingkungan dan membeli hasil tangkapan dengan standar *sizing* 600 grams. Konflik ini terdapat pada persaingan harga, dimana perusahaan *Seafood Savers* sudah mempraktikkan *premium price* dengan harga beli lebih tinggi dibanding dengan perusahaan lainnya (Suncoko, 2012).
7. Konflik Primordial: Konflik primordial nelayan Tomia di Kawasan TN Wakatobi, sangat tidak suka dengan tindakan Nelayan Bajo Lamanggau (Tomia), dikarenakan sifat

merusaknya yang menangkap ikan karang konsumsi hidup dengan potasium. Kerap terjadi Nelayan Tomia melaporkan tindakan mereka terhadap BTN Wakatobi maupun yang berwajib setempat (Suncoko, 2012).

Sebagai contoh, di sekitar Tanjung Pinang meskipun belum berwujud dalam bentuk konflik secara fisik, hubungan antara nelayan tradisional - yang menggunakan *bubu ketam*—dengan nelayan mini *trawl* dan semacamnya (seperti sondong, pukot kikis) tidaklah harmonis. Hal ini karena alat tangkap mini *trawl* tersebut sering dioperasikan di wilayah perairan (*fishing ground*) nelayan tradisional. Tentu saja dengan hadirnya alat-alat tangkap yang mampu mengikis ikan-ikan kecil di dasar laut menyebabkan hasil tangkapan nelayan tradisional menjadi berkurang. Di samping menurunnya tingkat pendapatan nelayan tradisional, alasan penolakan nelayan terhadap kehadiran alat tangkap tersebut adalah karena alat tangkap tersebut dianggap merusak sumber daya hayati yang ada. Kasus serupa terjadi di daerah Pulau Busung, Tanjung Pinang. Pada umumnya, nelayan pengguna alat tangkap seperti mini *trawl*, sondong, dan jaring kikis tersebut berasal dari luar kecamatan. Sementara itu, kasus konflik antaralat tangkap antara mini *trawl* dengan alat tangkap tradisional lainnya ditemukan di Kijang.¹ Ini menggambarkan bahwa konflik dalam suatu masyarakat merupakan kombinasi konflik kelas, konflik antaralat tangkap sumber daya, konflik agraria, dan konflik primordial.

Konflik kelas juga ditemukan di Pekalongan. Berdasarkan studi Satria (2001), gejala konflik antarnelayan di Pekalongan dipicu hadirnya kapal *trawl* pada tahun 1970-an. Dengan kondisi

1 Contoh kasus ini bersumber dari pengalaman penulis pada saat melakukan studi lapang atas nama PKSPL IPB.

formasi sosial tradisional, hadirnya kapal *trawl* yang dibawa para nelayan dari Bagan Siapi-api mendorong nelayan lokal melakukan pemberontakan.

Kehadiran *trawl* tidak juga menjadi masalah di wilayah pesisir Bengkulu. Pembakaran perahu *trawl* pada bulan Mei 2002 menandakan telah terjadi konflik kelas di masyarakat pesisir Bengkulu.² Konflik terjadi antara nelayan-nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap pancing atau jaring sederhana serta perahu lancang bercadik hingga perahu dayung dengan nelayan-nelayan *trawl* yang menggunakan kapal-kapal dengan kapasitas muatan di atas 30 GT. Meskipun pada musim panen ketegangan yang terjadi antara kedua belah pihak tidak menimbulkan bentrokan, hal tersebut tetap menjadi kontravensi yang berlangsung terus-menerus. Akibatnya, pada saat musim paceklik, kontravensi yang selama ini muncul tidak mampu dibendung lagi, karena nelayan tradisional merasa terancam oleh keberadaan kapal-kapal *trawl* di perairan mereka.

Contoh lainnya adalah adanya konflik sosial pada kasus penambangan pasir di Riau Kepulauan. Di wilayah pesisir Pulau Karimun, dapat dilihat banyaknya kapal-kapal pasir baik kapal keruk maupun kapal pengangkut yang berlabuh. Bagi nelayan setempat, adanya penambangan pasir tersebut sangat mengganggu. Bahkan, di Kepulauan Karimun, para nelayan mengaku kehilangan 50% penghasilannya akibat penambangan pasir dilakukan di *fishing ground* mereka. Namun, para nelayan belum mendapat solusi terbaik akibat penambangan pasir yang umumnya memperoleh izin dari pemerintah setempat. Padahal, mereka hanya memiliki mata pencarian sebagai nelayan, tidak ada alternatif pekerjaan lain.

² Kompas, 19 Juli 2002

Sebab itu, mereka masih tetap melakukan kegiatan penangkapan udang dan tengiri meskipun dengan tingkat produksi yang jauh dari sebelumnya. Ini merupakan contoh konflik lingkungan di pesisir.

Resolusi Konflik

Bila tidak segera ditangani, konflik-konflik yang terjadi pada masyarakat pesisir lambat laun akan mengancam perkembangan perikanan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan resolusi konflik untuk mengelola konflik yang terjadi sehingga dapat meminimalkan akibat-akibat dari konflik tersebut. Resolusi konflik dapat ditempuh dengan melakukan proses akomodasi antara kedua belah pihak yang bertikai. Kimball Young & Richard W. Mack dalam Soekanto (1995) mengklasifikasikan proses akomodasi ke dalam beberapa bentuk yaitu:

- 1) *Coercion*, adalah proses akomodasi yang terjadi dengan melakukan paksaan oleh pihak yang memiliki kekuatan kepada pihak yang lemah
- 2) *Compromise*, masing-masing pihak mengurangi tuntutan agar mencapai suatu kesepakatan;
- 3) *Arbitration*, upaya untuk mencapai kesepakatan yang dilakukan oleh pihak ketiga karena kedua belah pihak tidak dapat mencapainya;
- 4) *Mediation*, pihak ketiga yang bersifat netral diundang oleh pihak-pihak yang bertikai untuk membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi. *Mediation* hampir menyerupai *arbitration*;
- 5) *Conciliation*, adalah suatu usaha yang mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi

Sosiologi Masyarakat Pesisir

tercapainya suatu persetujuan bersama. *Conciliation* bersifat lebih lunak daripada *coercion*.

- 6) *Toleration*, adalah suatu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang berbentuk formal;
- 7) *Stalemate*, pihak-pihak yang berselisih berhenti pada suatu titik tertentu dalam melakukan pertentangannya karena kekuatan yang dimiliki masing-masing pihak seimbang;
- 8) *Adjudication*, penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan.

BAB 6

KEMISKINAN MASYARAKAT PESISIR

Ibarat tikus mati kelaparan di lumbung padi. Itulah refleksi ironi pembangunan kita, yakni bahwa kemiskinan nelayan masih terjadi di tengah limpahan kekayaan sumber daya laut. Siapa yang salah? Apakah nelayan yang salah karena tidak mau dan tidak mampu mentransformasi diri menjadi nelayan yang tangguh? Ataupun pemerintah yang salah karena tidak ada kesempatan bagi nelayan untuk melakukan mobilitas vertikal? Untuk menjawab pertanyaan tersebut berikut ini akan diantarkan teori-teori kemiskinan yang selama ini berkembang.

Kemiskinan Relatif dan Absolut

Memetakan kemiskinan merupakan pekerjaan penting agar kita tidak dibingungkan oleh wacana yang sering berkembang. Ada yang mengatakan bahwa nelayan itu miskin, bahkan termiskin di antara orang miskin (*the poorest of the poor*). Ada pula yang mengatakan bahwa nelayan tidaklah miskin. Buktinya ketika terjadi krisis, nelayan tenang-tenang saja. Bahkan, nelayan pulalah yang justru menikmati buah krisis ekonomi yang terjadi sejak 1997 itu. Mana yang benar? Bisa jadi nelayan Muara Angke itu tidak miskin, bila dibandingkan nelayan-nelayan suku laut di Riau. Bisa juga dikatakan nelayan Muara Angke miskin bila dibandingkan dengan

pemilik kapal *long line* yang markasnya di Muara Baru. Di sinilah mulai terasa perlunya memahami apa itu kemiskinan.

Berdasarkan ukurannya, kemiskinan dibagi menjadi dua, yaitu *kemiskinan relatif* dan *kemiskinan absolut*. Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang diukur dengan membandingkan satu kelompok pendapatan dengan kelompok pendapatan lainnya. Misalnya, suatu kelompok nelayan berpenghasilan satu juta rupiah per bulan. Bisa jadi mereka tidak tergolong miskin berdasarkan ukura garis kemiskinan. Namun, bisa jadi kelompok nelayan tersebut dapat dikatakan miskin bila dibandingkan dengan para pengusaha *cold storage*. Kemiskinan relatif tersebut identik dengan istilah kesenjangan. Ada banyak ukuran kesenjangan tersebut, dan yang paling populer adalah ukuran (gini) rasio.

Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang dilihat dari ukuran garis kemiskinan (*poverty line*). Garis kemiskinan pun bermacam-macam, bergantung pada institusi yang mengeluarkan. Misalnya, BPS menerapkan garis kemiskinan dengan ukuran kalori. Orang dikatakan miskin bila tingkat pengeluaran untuk makanan kurang dari 2100 kalori. Sementara itu, Bank Dunia menggunakan ukuran pendapatan. Bila orang desa memiliki pendapatan kurang dari 50 dolar per tahun, maka dia dapat digolongkan miskin. Sajogyo *dalam* Muflikhati (2010) lain lagi dalam menetapkan garis kemiskinan, yakni menggunakan ukuran pengeluaran setara beras. Selengkapnya berbagai ukuran untuk menetapkan garis kemiskinan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Kemiskinan Masyarakat Pesisir

Tabel 20. Ringkasan Metode Identifikasi Kemiskinan

Metode Identifikasi	Kriteria Kemiskinan	Sumber Data	Keterangan
1. Analisa atas Desa (Non-lokal) dengan unit per-kapita			
1. Sayogyo	Tingkat Pengeluaran setara kilogram beras per-kapita per tahun:	Beragam sumber, terutama SUSENAS	Pengeluaran total untuk berbagai kebutuhan.
	Kota Desa		
	Miskin <480 <320		
	Miskin Sekali <360 <240		
Sangat Miskin <270 <180			
2. Bank Dunia	Tingkat pendapatan per kapita per tahun:	Didekati dari PDRB	Indikator kemiskinan Bank Dunia menggunakan pendekatan pendapatan perhari (US\$ 1 - US\$ 2) atau perbulan.
	Kota Desa		
	Miskin <US\$ 75 <US\$ 50		
	Data Bank Dunia (1990) melaporkan jumlah penduduk miskin dunia dengan menggunakan standar pendapatan perhari US\$1 –US\$2.		
	Indikator kesejahteraan menurut Bank Dunia:		
	Tipologi kemiskinan Pendapatan keluarga		
	Keluarga miskin <US\$ 1 per hari		
	Keluarga hampir miskin hari <US\$ 1,25 per hari		
	Keluarga hampir tidak miskin US\$ 1,25 -<US\$ 2 per hari		
	Keluarga tidak miskin >US\$ 2 per hari		
Sumber: Mufikhati (2010).			

Sosiologi Masyarakat Pesisir

3. BPS	<p>Tingkat pengeluaran per kapita per hari untuk makanan: Miskin <2100 kalori atau dikonversi dengan harga bahan makanan menjadi pengeluaran untuk bahan makanan per kapita per bulan (per Rp/1990).</p> <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Desa</td> <td style="text-align: center;">Kota</td> </tr> <tr> <td>Miskin</td> <td style="text-align: center;"><20614</td> <td style="text-align: center;"><13925</td> </tr> </table> <p>Ada dua indikator kemiskinan BPS yaitu: 1) Garis kemiskinan pangan dan bukan pangan (garis kemiskinan yang dibedakan antara perdesaan dan perkotaan) dan 2) Garis kemiskinan yang didasarkan kriteria rumah tangga miskin berdasar sasaran BLT (Bantuan Langsung Tunai), merupakan indikator yang digunakan pemerintah berdasarkan kriteria-kriteria rumah tangga miskin yang dikeluarkan oleh BPS (Muflikhati, 2010).</p>		Desa	Kota	Miskin	<20614	<13925	Data SUSENAS	<p>BPS dalam mengkaji kemiskinan menggunakan pendekatan pengeluaran perhari atau perbulan. Indikator kemiskinan yang digunakan oleh BPS jauh lebih rendah daripada indikator Bank Dunia.</p>
	Desa	Kota							
Miskin	<20614	<13925							
4. BKKBN	<p>BKKBN mengolongkan keluarga berdasarkan tahapan kesejahteraan keluarga dengan berbagai kriteria menjadi 5 kategori yaitu: keluarga pra sejahtera (pra-KS), keluarga sejahtera I (KS I), keluarga sejahtera II (KS II), keluarga sejahtera III (KS III) dan keluarga sejahtera III plus (KS III plus) (Muflikhati, 2010). Menurut BKKBN, kategori keluarga KS I adalah: 1) makan dua kali sehari; 2) Anggota keluarga mempunyai pakian berbeda, bersekolah dan berpergian; 3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik; 4) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan; 5) Bila PUS ingin berKB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi; dan 6) Semua anak umur 7-15 Tahun dalam keluarga bersekolah (Muflikhati, 2010).</p>	Dimensi ekonomi, sosial dan spiritual untuk menggambarkan kondisi keluarga yang riil.	<p>BKKBN mengkategorikan kondisi keluarga miskin karena alasan ekonomi. Menurut indikator ini, keluarga dikatakan miskin jika tidak memenuhi enam kriteria yang mencerminkan kebutuhan dasar individu dalam keluarga, yaitu sandang, pangan dan papan.</p>						

Kemiskinan Masyarakat Pesisir

5. Sosial Metrik	Kesejahteraan keluarga menurut indikator sosial metrik lebih mengarah pada yang dirasakan oleh responden, dalam hal ini adalah suami dan atau istri dari keluarga contoh. Indikator sosial metrik terdiri dari 8 pertanyaan yang meliputi: 1) Kecukupan dalam hal ketahanan pangan; 2) Keterjangkauan dalam menyekolahkan anak, 3) Keterjangkauan terhadap pelayanan kesehatan; 4) Kepemilikan peralatan rumah tangga; 5) Keterlibatan dalam aktivitas di masyarakat; 6) Penghargaan dari orang lain; 7) Kemampuan baca-tulis dan hitung; dan 8) Keberadaan kelompok rawan dalam keluarga (Muflikhati, 2010).	Informasi keluarga/ anggota keluarga.	Indikator Sosial Metrik digunakan oleh The Foundation for International Community Assistance (FINCA) untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin.
II. Analisis atas desa (Non-lokal) dengan unit Desa/Kelurahan/Kecamatan			
1. BANGDES (unit: desa)	Tingkat pendapatan perkapita rata-rata penduduk dihitung dengan setara beras miskin <360 kg.	Data BANGDES	Pendapatan bersih
2. Agraria (unit: kecamatan, kriteria KBP dari tingkat kabupaten)	Pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan minimum 9 bahan pokok (KBP): Miskin sekali <0.75 KBP Miskin 0.75-1.25 KBP Hampir Miskin 1.25-2.00 KBP Tidak Miskin >2.00 KBP	Beragam sumber atau pengumpulan data sendiri	Pendapatan perkapita dari produksi 15 sektor dengan harga lokal, disertai analisis faktor yang mempengaruhi kemiskinan.
3. Bappenas	Melihat persentase jumlah desa miskin per kecamatan: Miskin sekali > 75% Miskin 50%-75% Hampir Miskin <50%	Menggabungkan data BPS dan BANGDES	Dinyatakan dalam peta kemiskinan.
III. Analisis tingkat desa (lokal) dengan unit per kapita/keluarga			
1. P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani/Nelayan Kecil)	Indikator lokal yang berkaitan dengan pendapatan, kemampuan kerja/usaha, pemilikan asset dan kondisi umum keluarga.	Dikaitkan dengan pengembangan usaha masyarakat	

Sosiologi Masyarakat Pesisir

2. UUPKA (U'saha Peningkatan Pendapatan Kelompok Akseptor)	Indikator lokal yang berkaitan dengan berbagai aspek kesejahteraan keluarga.	Berkaitan dengan program KB.
---	---	---------------------------------

Sumber: Rusli *et.al*, 1995 dan Muflikhati (2010).

Berbagai ukuran kemiskinan yang ada mampu menunjukkan hasil yang berbeda pula. Muflikhati (2010) membandingkan kualitas sumber daya manusia keluarga nelayan dan bukan nelayan di wilayah pesisir Jawa Barat yaitu pesisir utara (pantura) dan pesisir selatan (pansela) yang direpresentasikan dari tingkat pendidikan dan kesehatan. Kualitas sumber daya manusia pada keluarga nelayan lebih rendah dibanding pada keluarga bukan nelayan. Secara lebih spesifik, kualitas sumber daya manusia pada keluarga di pantura lebih rendah dibandingkan keluarga di pansela.

Selanjutnya menurut Muflikhati (2010), kesejahteraan keluarga nelayan lebih tinggi dibandingkan keluarga bukan nelayan jika menggunakan indikator *World Bank* dan BPS. Namun jika berdasarkan indikator rumah tangga miskin penerima bantuan langsung tunai (BLT), BKKBN, dan sosial metrik, keluarga bukan nelayan lebih sejahtera dibandingkan keluarga nelayan. Secara lebih spesifik, keluarga nelayan di pantura lebih sejahtera dibandingkan keluarga di pansela jika menggunakan indikator *World Bank* dan BPS (garis kemiskinan dan kriteria rumah tangga miskin BLT). Jika menggunakan indikator BKKBN dan sosial metrik, keluarga di pansela berpeluang lebih sejahtera.

Nilai Tukar Nelayan

Sejak tahun 1983 BPS telah mengembangkan Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai salah satu proksi untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. NTP merupakan angka perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh petani (It) dengan indeks harga yang dibayarkan oleh petani (Ib). Perhitungan indeks harga yang digunakan didasarkan pada indeks harga Laspayres, yaitu menggunakan kuantitas barang pada tahun dasar sebagai dasar perhitungan. NTP yang dikembangkan BPS mencakup lima komoditas, yaitu komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang mencakup perikanan laut dan darat.

Hal ini juga diperkuat oleh pengertian BPS (2014), Menurut BPS, bahwa nelayan di kategorikan sebagai petani.

Kotak 7. Pengertian Nilai Tukar Petani

1. Pengertian Umum :

- NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib)

❖ Arti Angka NTP :

- $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

❖ Kegunaan dan Manfaat

- Dari Indeks Harga Yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.
- Dari Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di perdesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan
- NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.
- Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

Sumber: BPS (2014).

Sejak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka dikembangkan nilai tukar perikanan sendiri yang terdiri atas nilai tukar nelayan (NTN). Nilai Tukar (NTN) merupakan salah satu indikator kinerja utama (IKU) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dinilai mampu menggambarkan perkembangan penerimaan dan pengeluaran masyarakat secara bersamaan dalam suatu nilai indeks. Merujuk dari Permen KP No. 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Arsitektur Data Kelautan dan Perikanan di Lingkungan Kementrian Kelautan dan Perikanan, untuk menghasilkan data Nilai Tukar Nelayan (NTN) sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan yaitu:

- 1) Data harga yang diterima/pendapatan nelayan dari hasil produksi dan harga jual produk budidaya;
- 2) Data pengeluaran rumah tangga nelayan yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kebutuhan sehari-hari dan pengeluaran biaya usaha perikanan.

Oleh karena itu, NTN berkaitan dengan kemampuan dan daya beli nelayan dalam membiayai hidup rumah tangganya. Apabila kenaikan pendapatan yang diterima akibat kenaikan harga produksi lebih besar dari kenaikan harga barang yang dibeli, maka hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan daya dan kemampuan nelayan atau kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan (Bappenas/JICA, Analisis Pencapaian Nilai Tukar Nelayan, 2014).

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah “rasio total pendapatan terhadap total pengeluaran rumah tangga nelayan selama periode waktu tertentu”. NTN merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan secara relatif. Nilai tukar merupakan suatu pendekatan untuk mengetahui perbandingan nilai suatu komoditas terhadap komoditas lain. Konsep ini telah digunakan dan berkembang untuk berbagai kebutuhan.

Angka NTN didapat dari perhitungan perbandingan Indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan Indeks harga yang dibayar nelayan (Ib). Komponen penyusun untuk It dan Ib agar dapat dirinci, sehingga dapat dianalisis dan dapat dijadikan kebijakan untuk meningkatkan nilai NTN kedepannya. BPPSEKP, Balitbang KP telah melakukan penghitungan angka NTN dengan berbagai metode dan dihasilkan angka yang berbeda-beda untuk setiap metodenya. BPS pun telah melakukan penghitungan NTN dengan berbagai metode seperti pada Balitbang KP. Metode-metode tersebut sudah dievaluasi satu-persatu, sehingga pada akhirnya BPS memakai metode terbaik untuk penghitungan NTN yaitu dengan formula Indeks *Laspeyres* yang dikembangkan. Adapun rumus NTN adalah sebagai berikut:

$$NTN = It/Ib$$

Dimana:

It: Indeks Harga yang diterima oleh nelayan

Ib: Indeks Harga yang dibeli oleh nelayan

Sedangkan Indeks Harga yang diterima nelayan (It) dan Indeks Harga yang dibayar oleh nelayan (Ib) dihitung dengan formula Indeks *Laspeyres* yang dikembangkan (*Modified Laspeyres Index*), yaitu:

$$I_t = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{P_{it}}{P_{i(t-1)}} P_{i(t-1)} Q_{0i}}{\sum_{i=1}^n P_{0i} Q_{0i}} \times 100$$

Keterangan:

It = indeks yang diterima / indeks yang dibayar

Pti = harga barang i pada tahun t

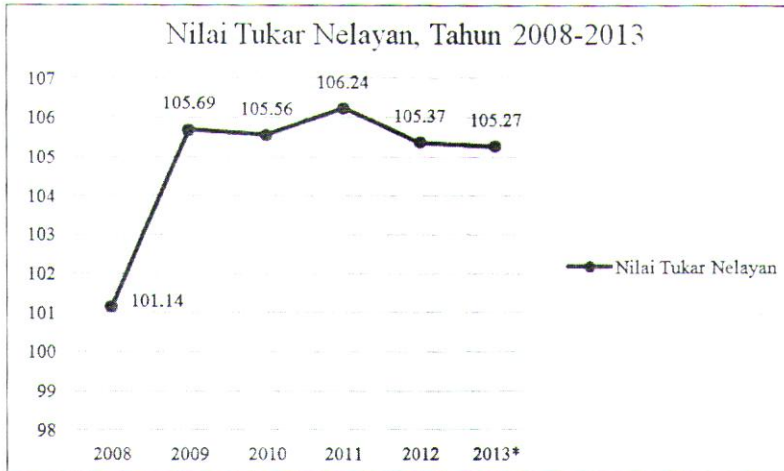
Kemiskinan Masyarakat Pesisir

$P(t-1)I$	=	harga barang i pada tahun $t-1$
Q_{oi}	=	kuantitas barang i pada tahun dasar (tahun 0)
$P(t-1)Q_{oi}$	=	nilai bobot barang i pada tahun $t-1$
$P_{oi} Q_{oi}$	=	nilai bobot barang i pada tahun dasar
p_{yj}	=	harga barang konsumsi rumah tangga
q_{yj}	=	kuantitas barang konsumsi rumah tangga

Sumber: Bappenas/JICA, Analisis Pencapaian Nilai Tukar Nelayan (NTN), 2014.

Pada umumnya nelayan hidup di daerah pesisir. Kemiskinan nelayan dapat direpresentasikan dengan kemiskinan di daerah pesisir. Gambar 2 menjelaskan grafik Nilai Tukar Nelayan (NTN) mulai Tahun 2008-2013.

Bila merujuk pada penghitungan NTN (Gambar 2), nilai NTN berada pada kisaran di atas 100 (tergolong baik), meski masih sering diperdebatkan sejauhmana relevansi NTN sebagai indikator kesejahteraan. Pada tahun 2011 NTN mencapai 106,24, namun mengalami penurunan pada tahun 2012 yaitu 105,37. Angka ini kembali mengalami penurunan pada tahun 2013 meski tidak signifikan, yaitu 105,27. Penurunan ini banyak dipengaruhi oleh variabel yang kebanyakan di luar sektor perikanan, karena komponen indeks harga yang harus dibayar nelayan termasuk harga makanan pokok, komunikasi, transportasi, bahan bakar, dan barang konsumsi lainnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan NTN tidak cukup dengan meningkatkan harga ikan, tetapi juga harus mampu mengendalikan harga-harga lain untuk barang konsumsi maupun sarana produksi.



Gambar 2. Nilai Tukar Nelayan

*) Rata-rata 2013 mencakup Januari–November 2013 dengan tahun dasar 2007=100/*The average of 2013 covers January–November 2013*

Sumber : BPS, 2013

Hingga saat ini masih belum ditemukan pendekatan yang lebih pas untuk memantau perkembangan “kesejahteraan” secara periodik (bulanan) selain dengan NTN. Sejauh ini NTN adalah yang termudah dibandingkan dengan pengukuran lain. Akan tetapi, masih perlu diupayakan ketersediaan data tentang seberapa efektif intervensi program pembangunan terhadap kesejahteraan nelayan melalui berbagai program bantuan.

Kemiskinan Kultural, Alamiah, dan Struktural

Selanjutnya kategorisasi kemiskinan juga dapat dilakukan berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan tersebut.

Ada dua aliran besar dalam konteks ini.

Pertama, adalah aliran modernisasi yang selalu menganggap bahwa persoalan kemiskinan disebabkan faktor internal masyarakat. Aliran ini menyatakan kemiskinan nelayan terjadi sebagai akibat dari faktor budaya (kemalasan), keterbatasan modal, dan teknologi, keterbatasan manajemen, dan kondisi sumber daya alam. Umumnya kemiskinan tipe ini disebut dengan kemiskinan kultural dan alamiah. Karena itu, aliran ini selalu sarat dengan proposal modernisasi nelayan, yaitu bahwa sudah sepatutnya nelayan mengubah budayanya, meningkatkan kapasitas teknologinya, dan memperbaiki sistem usahanya.

Kedua, adalah aliran struktural yang selalu menganggap bahwa faktor eksternal-lah yang menyebabkan kemiskinan nelayan. Jadi, menurut aliran ini nelayan miskin bukan karena budaya atau terbatasnya modal, melainkan karena faktor eksternal yang menghambat proses mobilitas vertikal nelayan. Faktor eksternal tersebut berjenjang, baik pada tingkat mikrodesa maupun makrostruktural. Pada tingkat mikrodesa, masih ditemukan sejumlah pola hubungan patron-klien yang bersifat asimetris, yakni suatu pola hubungan transfer surplus dari nelayan ke patron. Sementara itu, pada tingkat makrostruktural, belum adanya dukungan politik terhadap pembangunan kelautan dan perikanan sehingga sektor tersebut tidak mampu berkembang sebagaimana sektor-sektor lainnya.

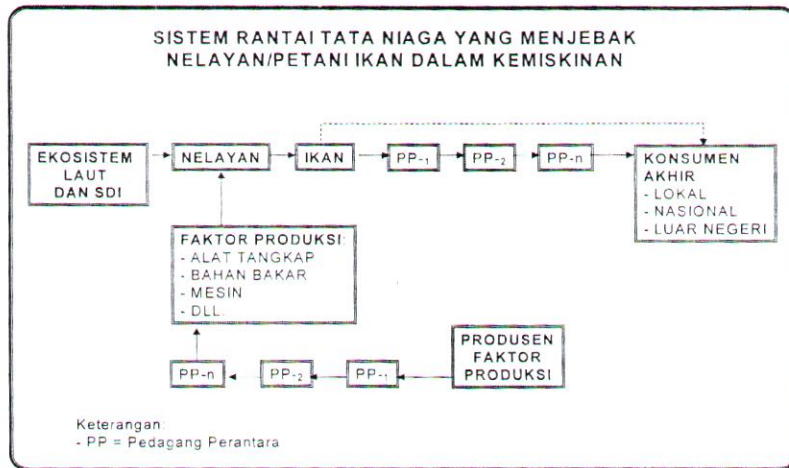
Aspek struktural lainnya adalah lemahnya posisi nelayan atau pembudi daya ikan dalam pemasaran. Akibatnya, margin pemasaran lebih banyak jatuh ke pedagang dan bukan ke nelayan atau pembudi daya ikan. Sebagaimana ditunjukkan Dahuri (2001), harga ikan mas koi di tingkat produsen di Blitar sebesar Rp.400 per ekor. Dua minggu kemudian, setelah dikirim ke Jakarta, harganya menjadi Rp.14.000, padahal biaya pemeliharaan selama kurun waktu tersebut hanya Rp.2.000. Contoh lainnya adalah harga jual ikan

bawal putih di Muara Angke, Jakarta Utara sekitar Rp.15.000/kg. Pada hari yang sama, ikan yang sama dijual oleh pedagang perantara (restoran *seafood* di Muara Angke) kepada para konsumen akhir adalah sebesar Rp.50.000/kg.

Menurut Dahuri (2001), posisi tawar-menawar nelayan atau masyarakat pesisir yang lemah ini disebabkan juga oleh sedikitnya produksi akibat rendahnya produktivitas. Dengan demikian, produsen tidak memiliki pilihan yang banyak untuk menjual hasilnya. Akibat desakan kebutuhan ekonomi dan uang tunai yang tinggi yang kadang muncul setiap hari, nelayan tidak bisa melakukan spekulasi untuk mendapat harga jual produknya yang lebih tinggi atau lebih baik. Dalam situasi ini, nelayan menerima harga yang ditawarkan pasar (*price taker*) dan menjalankan hidupnya dari hari ke hari dengan uang tunai yang didapatkan setiap hari (*short life subsistence strategy*). Secara ringkas problematika tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.

Dari dua perspektif tersebut, tampak teori struktural lebih mendekati kenyataan. Jadi, nelayan bukan tidak mau maju, melainkan nelayan tidak memiliki kesempatan untuk maju. Untuk membuat nelayan maju diperlukan pendekatan-pendekatan struktural, baik mengatasi problem patron-klien di tingkat desa, maupun meningkatkan dukungan politik untuk kemajuan nelayan di tingkat makro. Artinya, perlu kebijakan-kebijakan afirmatif yang secara riil mendorong nelayan untuk melakukan mobilitas vertikal.

Kemiskinan Masyarakat Pesisir



Gambar 3. Sistem Rantai Tata Niaga yang menjebak Nelayan/ Petani Ikan dalam Kemiskinan

Sumber: Dahuri (2001).

Namun, jika kita berangkat dari masalah kemiskinan nelayan tentu orang pun akan bertanya, mungkinkah mengatasi kemiskinan nelayan secara otomatis akan meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan terhadap ekonomi nasional? Apakah nelayan-nelayan yang berskala kecil itu dapat menjadi pelaku utama dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan?

Sebenarnya tuntutan pengelolaan sumber daya ikan sudah dimulai sejak zaman Belanda. Paling tidak ada tiga peraturan yang mencerminkan kepedulian pemerintah Hindia Belanda pengelolaan sumber daya ikan. *Pertama*, pada tahun 1914 pemerintah menerbikan peraturan tentang mutiara, teripang, dan bunga karang dalam batas alur laut tidak lebih dari tiga mil laut. *Kedua*, pada tahun 1920 diterbitkan peraturan yang melarang penangkapan ikan dengan obat bus, bahan beracun, atau bahan peledak, kecuali untuk

adalah adanya *Code of Conduct for Responsible Fisheries*. perikanan mesti dikelola dengan sebaik-baiknya, yang salah satunya dunia internasional yang memang sudah menghendaki sumber daya tulisan. Tentu perkembangannya wacana ini terdorong oleh desakan masyarakat dalam berbagai proyek, seminar, maupun tulisan-istilah-istilah seperti ko-manajemen atau pengelolaan berbasis *management* sudah mulai berkembang dengan mulai dikenalnya generasi mendatang. Di Indonesia, akhir-akhir ini wacana *fisheries* yang dapat menikmati kekayaan sumber daya, melainkan juga daya (*sustainability*). Dengan begitu, tidak saja generasi sekarang merupakan upaya penting dalam menjaga kesinambungan sumber Pengelolaan sumber daya perikanan (*fisheries management*)

PENGLOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN BERBASIS MASYARAKAT

BAB 7

kepentingan penelitian dalam jangka waktu tertentu. *Ketiga*, pada tahun 1927, diterbitkan peraturan perburuan paus dalam batas laut tiga mil laut. Dalam peraturan ini ada pengecualian bagi nelayan Indonesia yang telah melakukan penangkapan paus secara turun-temurun.¹

Tentu persoalan pengelolaan sumber daya perikanan saat ini tidak sesederhana dulu, seiring dengan makin tingginya intensitas penangkapan. Pada masa lalu seperti digambarkan Soewito *et al* (2000) bahwa hingga tahun 1973 upaya mengkaji stok ikan belumlah populer di kalangan pemerintah maupun peneliti. Pada saat itu, potensi memang belum diusahakan secara maksimal; perhatian mereka diarahkan pada identifikasi spesies-spesies ikan yang ekonomis.

Selanjutnya, kini isu pengelolaan sumber daya perikanan mulai diperhatikan karena orang makin sadar bahwa sumber daya perikanan, apabila tidak dikelola dengan baik, akan terancam kelestariannya. Salah satu aspek penting dalam kajian sosial seputar pengelolaan sumber daya perikanan adalah pelaku-pelaku yang terlibat dalam proses pengelolaan tersebut, apakah pemerintah (*government based management*), masyarakat (*community based management*), ataukah kerja sama antarkeduaanya (*Co-management*).

Pada bab ini, pertama-tama akan dipetakan secara teoretis, di mana posisi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya. Pada umumnya model-model pengelolaan sumber daya dikategorikan ke dalam dua kelompok. *Pertama*, model yang didasarkan pada tingkat pengendalian *stakeholder* atau pemangku kepentingan, sehingga dalam model tersebut terungkap siapa yang paling dominan dalam pengelolaan sumber daya: apakah pemerintah, masyarakat, ataukah

1 Soewito (2000) *op.cit.*

keduanya. Sementara itu, yang *kedua* merupakan model yang didasarkan pada *right*, khususnya *right* yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya. Kategori model yang kedua sangat penting sebagai penjabar kategori model pertama. Artinya, ketika berbicara tentang ko-manajemen, maka kita tidak serta-merta akan mengatakan cocok untuk konteks masyarakat pesisir kita, karena mesti diketahui terlebih dahulu ko-manajemen dalam konteks *right* yang bagaimana.

Command and Control, CBM, dan Co-Management

Salah satu pendekatan dalam mengklasifikasikan model pengelolaan sumber daya perikanan, adalah berdasarkan tingkat pengendalian *stakeholder*. Dalam pendekatan ini, Jentoft (1989) mengklasifikasikannya menjadi tiga, yakni *government (command and control)*, *community based management*, dan *co-management*.

1. Pengelolaan oleh Pemerintah

Model *command and control* merupakan model konvensional dengan pemerintah memegang seluruh kendali pengelolaan sumber daya perikanan, khususnya dalam hak inisiatif maupun pengawasan melalui organisasi formal yang dimilikinya. Nelayan atau pelaku usaha perikanan tidak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengelola sumber daya perikanan. Dengan demikian, proses pengelolaan sumber daya perikanan berlangsung secara sentralistik. Contoh penerapan model ini adalah di sebagian perikanan Denmark.

Pengelolaan berpusat pada pemerintah didasarkan pada alasan bahwa ada fungsi-fungsi tertentu dalam pengelolaan sumber daya, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.² Fungsi alokasi melalui regulasi dimaksudkan untuk membagi sumber daya

2 Nikijuluw (2001) *Rezim Pengelolaan Sumber daya Perikanan* (Jakarta: P3R)

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Fungsi distribusi dilakukan pemerintah dalam upaya menciptakan keadilan dan kewajaran sesuai pengorbanan dan biaya yang dipikul setiap orang atau kelompok. Sementara itu, fungsi keadilan dilakukan dalam bentuk keberpihakan kepada mereka yang posisinya lemah.³ Namun, pada kenyataannya pengelolaan sumber daya, yang berpusat pada pemerintah tersebut, mengandung beberapa kelemahan, sebagaimana diungkapkan Lawson (1984) dalam Nikjuluw (2001):

- 1) Keterlambatan pemerintah dalam menegakkan aturan yang sudah ditetapkan;
- 2) Kesulitan penegakan hukum karena kekurangan personil dan fasilitas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian;
- 3) Ketidakesesuaian antara peraturan yang dibuat pemerintah pusat dengan kenyataan di lapangan;
- 4) Munculnya berbagai peraturan yang saling bertentangan satu sama lain;
- 5) Tingginya biaya transaksi, khususnya dalam biaya sosialisasi, biaya pemantauan, biaya pelaporan, dan biaya kegiatan yang tidak diantisipasi sebelumnya;
- 6) Banyaknya wewenang yang tersebar di banyak instansi departemen sehingga sering menyebabkan masalah dalam koordinasi;
- 7) Ketidakakuratan data dan informasi yang didapatkan pemerintah menyebabkan ketidaktepatan keputusan yang diambil;
- 8) Kegagalan merumuskan keputusan manajemen dapat terjadi ketika pemerintah harus cepat mengatasi masalah-masalah yang muncul di lapangan.

3 *Loc.cit.*

2. Pengelolaan oleh Masyarakat

Kegagalan praktik pengelolaan sumber daya yang berpusat pada pemerintah tersebut mendorong munculnya kesadaran pentingnya *community based management* (CBM) atau pengelolaan berbasis pada masyarakat, yang merupakan kebalikan dari model *command and control*. Dalam CBM, pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh para nelayan atau pelaku usaha perikanan di suatu wilayah tertentu melalui organisasi yang sifatnya informal. Dalam model ini, partisipasi nelayan sangatlah tinggi dan mereka memiliki otonomi terhadap pengelolaan sumber daya perikanan tersebut. Efektivitas pengelolaan sumber daya dengan sistem CBM terlihat karena perencananya bersifat *bottom up* dan menggunakan pendekatan partisipatif, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan atas sumber daya (Satria dan Matsuda, 2004). Contoh yang paling mudah ditemukan di Indonesia adalah sistem *sasi* di Maluku.

Sasi, yang diterapkan kurang lebih sejak abad ke-17, memiliki arti penting dalam pengembangan masyarakat dan kelestarian ekologi pesisir. Ada tiga tujuan utama dari kelembagaan *sasi* (Zerner 1992), yaitu:

- 1) menjamin kesempatan yang sama kepada komunitas lokal dalam melakukan kegiatan perikanan di wilayah pesisir;
- 2) menjamin efektivitas pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah perairan pesisir secara berkelanjutan;
- 3) menjamin kesempatan kepada anggota komunitas untuk melestarikan nilai-nilai subsistensi maupun ekonomi dari wilayah perairan mereka.

Secara harfiah *sasi* berarti “larangan”. Hal ini berarti ada hak pengelolaan tertentu terhadap suatu wilayah perairan oleh suatu komunitas di sekitar wilayah perairan, sementara komunitas di luar wilayah tersebut dilarang melakukan kegiatan perikanan di wilayah

sasi diterapkan. Aturan main yang diterapkan juga tidak serta-merta melarang nelayan luar masuk ke wilayah perairan, melainkan juga kadang melarang komunitas pemegang hak *sasi* untuk beroperasi.

Paling tidak ada empat hal yang terkandung dalam kelembagaan *sasi*, yaitu: (1) penentuan waktu beroperasi, (2) peraturan penangkapan berdasarkan spesies, (3) pengaturan berdasarkan alat tangkap, dan (4) sanksi. Hal ini sudah dijelaskan dalam bagian sebelumnya.

Secara umum, model CBM mengandung beberapa unsur pokok (Ruddle dan Satria 2010), yaitu:

- 1) Batas Wilayah
CBM memiliki batas wilayah baik yang bersifat fisik (muara sungai, pohon, gunung) maupun imajiner.
- 2) Aturan
CBM memiliki aturan operasional terkait dengan apa yang boleh dan tidak boleh dalam pemanfaatan sumber daya perikanan
- 3) Hak
CBM mengatur hak para nelayan untuk mengelola maupun memanfaatkan sumber daya.
- 4) Pemegang Otoritas
CBM dikelola oleh lembaga/organisasi lokal yang umumnya tidak formal
- 5) Sanksi
CBM mengatur sanksi bagi para pelanggar aturan yang umumnya berupa sanksi sosial dan ekonomi, dan kadang kala sanksi fisik
- 6) Pemantauan dan pengawasan
CBM mengatur aktivitas pemantauan dan pengawasan untuk memastikan aturan main dapat dilaksanakan.

Ada beberapa keunggulan model CBM ini, antara lain:

- 1) Tingginya rasa kepemilikan masyarakat terhadap sumber daya sehingga mendorong mereka untuk bertanggung jawab melaksanakan aturan tersebut;
- 2) Aturan-aturan yang diciptakan sesuai dengan realitas yang sebenarnya baik secara sosial maupun ekologis sehingga aturan dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat itu sendiri;
- 3) Biaya transaksi rendah karena semua proses pengelolaan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, khususnya dalam kegiatan pengawasan.

Selain di Maluku, model CBM tersebut dapat ditemukan di berbagai tempat, seperti *rompong* di Sulawesi dan *awig-awig* di Lombok. Model-model tersebut merupakan model yang berbasis pada hak ulayat yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, meskipun model tersebut mengakar dan memiliki nilai historis tetap saja pada masa lalu tidak mendapat perhatian dari pihak pemerintah sehingga lambat laun memudar. Karena itu, seperti di Lombok, penerapan *awig-awig* tidak lain merupakan upaya rekonstruksi dan revitalisasi nilai-nilai yang dulunya pernah mengakar dan kemudian memudar. Dengan demikian, ada tiga mekanisme pokok dalam pemberlakuan model CBM (Satria, 2009b).

Pertama, mekanisme berlakunya hak ulayat laut yang sejak dulu berkembang dan saat ini tetap dijalankan, sebagaimana terlihat pada model *sasi*, *seke*, *rompong*. Artinya model CBM tersebut berbasis pada hak ulayat laut, yang menurut Wahyono *et al.* (2001), memiliki beberapa fenomena umum:

- 1) Setiap pengelolaan mempunyai organisasi sebagai penyelenggara atau pelaksana pengelolaan;

- 2) Pada setiap sistem pengelolaan terdapat pihak-pihak yang memiliki wewenang sebagai unit sosial pemegang hak ulayat dalam masyarakat;
- 3) Aturan-aturan dalam pengelolaan yang pada intinya bersangkutan paut dengan hal-hal yang dibolehkan dan dilarang dalam praktik hak ulayat laut;
- 4) Masa kewenangan diberlakukan atas waktu pelaksanaan hak ulayat laut.

Kedua, mekanisme reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai lokal yang telah pudar dan kemudian dijadikan dasar dikembangkannya CBM. Mekanisme ini terlihat pada berkembangnya *awig-awig* di Lombok yang saat ini mulai dijalankan masyarakat dan diakui pemerintah.

Ketiga, mekanisme intervensi pihak luar untuk membuat model CBM baru yang bisa saja merupakan hasil pelajaran dari pengalaman model CBM melalui dua mekanisme di atas. Mekanisme ini ada yang dikembangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan ada pula dilakukan pemerintah. Saat ini sering ditemukan berbagai proyek LSM atau pemerintah yang bertujuan untuk bersama-sama masyarakat menciptakan model CBM baru.

Di samping sejumlah keunggulan yang dimiliki, model CBM juga memiliki kelemahan sebagai berikut:

- 1) Kurang terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan ilmiah dalam pengelolaan sumber daya, karena hampir seluruh proses CBM—khususnya yang berkembang melalui mekanisme hak ulayat dan mekanisme reaktualisasi - berdasar pada pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*). Seperti dalam pengelolaan sumber daya, sangatlah penting data tentang stok ikan sebagai dasar untuk menyusun model pengelolaan.

- 2) Sering Model CBM dikembangkan atas dasar intervensi pihak luar yang kurang mengakar sehingga kurang dipatuhi masyarakat lokal. Masalah ini umumnya terjadi sebagai akibat besarnya keinginan pemerintah untuk mewujudkan model CBM sehingga sering bertumpu pada kekuatan organ pemerintah dan bukan pada tokoh informal.

Selain itu, banyak juga hasil studi yang menunjukkan beberapa kelemahan dari model CBM. Hasil studi Satria *et al.* (2006) di Gili Indah, Lombok Barat menunjukkan bahwa *awig-awig* gagal dalam menangani konflik kepentingan pemanfaatan sumber daya pesisir, meskipun karakteristik masyarakatnya homogen. Selain itu, Nikijuluw (2002) juga menunjukkan beberapa kelemahan model CBM meliputi:

- 1) Tidak mampu mengatasi masalah interkomunitas, padahal sumber daya ikan bermigrasi dan melampaui batas-batas wilayah dan tempat tinggal komunitas tertentu, sehingga konflik antarkomunitas yang berbeda sering terjadi;
- 2) Bersifat lokal sehingga masalah yang lebih besar seperti *over-exploitation* untuk ikan jenis tertentu tidak dapat dipecahkan melalui CBM di suatu lokasi;
- 3) Sulit mencapai skala ekonomi karena bersifat lokal dan hanya dianut oleh suatu masyarakat saja;
- 4) Tingginya biaya institusioanalisis, khususnya untuk proses edukasi, penyadaran, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya CBM, perumusan aturan CBM melalui pengembangan partisipasi masyarakat, serta untuk pembentukan organisasi CBM itu sendiri.

3. Ko-manajemen

Model ko-manajemen (*co-management*), yang akhir-akhir ini terus disosialisasikan. Model ini merupakan sintesis dari dua model ekstrem sebelumnya. Dalam model ini pemerintah dan masyarakat yang sering diwakili organisasi nelayan atau koperasi perikanan sama-sama terlibat dalam proses pengelolaan sumber daya: mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Terdapat banyak definisi tentang *co-management*, antara lain, (Lim et.al., 1995):

- (1) *a natural adaptation between the government and the local community in resources management (Acheson)*
- (2) *power sharing and responsibility-sharing through delegation of a portion on the planning process to group of fishermen (Rettig et.al)*
- (3) *sharing of management power and responsibility by the state and fishing community (Barkes & Kislalioglu and Feeny)*
- (4) *Devolution of management responsibilities to the local level, giving importance to the participation of fisherfolk in management and environmental monitoring activities, and government support endorsing the formation of any community organization (FAO)*
- (5) *a dynamic relationship between the national government and the community sharing authority for fisheries management (Pemeroy)*

Banyak pakar yang tertarik untuk terus menelaah efektivitas model ini. Kajian-kajian tersebut merupakan langkah untuk menyempurnakan atau mengambil pelajaran sebagai bahan dalam pengembangan pengelolaan sumber daya perikanan. Model Jepang tampaknya representatif untuk dikaji sebagai bahan pelajaran. Namun, praktik ko-manajemen tidak semata monopoli Jepang, melainkan

Norwegia, bahkan Amerika Serikat. Di Norwegia, bahkan praktik ko-manajemen telah berlangsung selama 90 tahun melalui *Lovoten Law of 1897*. Lovoten Law merupakan solusi terhadap masalah-masalah di perairan, khususnya konflik antarnelayan. Isinya, antara lain, tentang aturan jenis alat tangkap dan masa penangkapan ikan. Pengelolaannya dilakukan oleh koperasi perikanan, tapi tetap ada semacam komisi atau *regulatory committee* yang anggotanya dipilih oleh dan dari para nelayan, khususnya para nakhoda.

Menurut Pomeroy dan Berkes (1997), dalam Nikijuluw (2002), ada sepuluh tingkatan ko-manajemen yang disusun berdasarkan rentang partisipasi masyarakat dan tanggung jawab pemerintah, yaitu:

- 1) Masyarakat hanya memberikan informasi kepada pemerintah dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan perumusan manajemen;
- 2) Masyarakat berkonsultasi dengan pemerintah;
- 3) Masyarakat dan pemerintah saling bekerja sama;
- 4) Masyarakat dan pemerintah saling berkomunikasi;
- 5) Masyarakat dan pemerintah saling bertukar informasi;
- 6) Masyarakat dan pemerintah saling memberi nasihat dan saran;
- 7) Masyarakat dan pemerintah melakukan kegiatan atau aksi bersama;
- 8) Masyarakat dan pemerintah bermitra;
- 9) Masyarakat melakukan pengawasan terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah;
- 10) Masyarakat lebih berperan dalam melakukan koordinasi antarlokasi atau antardaerah dan hal tersebut didukung oleh pemerintah.

Pendekatan Berbasis *Right*

Secara teoretis, ada dua bentuk regulasi dalam pengelolaan sumber daya perikanan, yaitu *open access* dan *controlled access regulation*. *Open access* adalah regulasi yang membiarkan para nelayan untuk menangkap ikan kapan saja, di mana saja, berapa pun jumlahnya dan dengan alat apa saja, sehingga regulasi ini mirip dengan “hukum rimba” dan “pasar bebas”. Secara empiris, regulasi ini menimbulkan dampak negatif yang dikenal dengan “*tragedy of the common*”, baik berupa kerusakan sumber daya perikanan, maupun konflik antarnelayan.

Gagalnya regulasi tersebut mendorong munculnya bentuk regulasi lainnya, yakni *controlled access regulation*. Dalam regulasi ini, menurut Anderson (1995), paling tidak ada dua kategori, yakni (1) berdasarkan pembatasan *input* (*input restriction*) yang membatasi jumlah pelaku, jumlah dan jenis kapal, serta jenis alat tangkap, dan (2) berdasarkan pembatasan *output* (*output restriction*) yang membatasi berapa jumlah tangkapan bagi setiap pelaku berdasarkan kuota baik *Individual Quota (IQ)*, *Individual Transferable Quota (ITQ)*, dan seterusnya yang umumnya diterapkan di negara-negara maju.

Selama ini, pembatasan input merupakan instrumen kebijakan yang masih sering digunakan oleh negara-negara Asia dan negara berkembang lainnya. Salah satu formulasi dari pembatasan *input* adalah *territorial use right* yang menekankan penggunaan *fishing right* (hak untuk memanfaatkan sumber daya perikanan) dalam suatu wilayah tertentu dengan batas yurisdiksi yang jelas. Dalam sistem ini, hanya pemegang *fishing right* yang berhak melakukan kegiatan perikanan di suatu wilayah, sementara pihak yang tidak memiliki *fishing right* tidak diizinkan beroperasi di wilayah tersebut.

Selain diatur siapa yang berhak melakukan kegiatan perikanan, juga diatur kapan dan dengan alat apa kegiatan perikanan dilakukan. Sistem ini memang menjurus pada bentuk “pengavelingan” laut. Bentuk regulasi ini dianggap penting untuk menjaga kepentingan nelayan kecil yang hanya beroperasi di wilayah pantai pesisir dan kepentingan kelestarian sumber daya.

Sistem ini umumnya berlaku di negara-negara yang masih memiliki nilai-nilai tradisional yang kuat karena umumnya sistem tersebut berakar pada nilai-nilai tradisi yang telah mapan dan dalam perkembangannya mengalami berbagai modifikasi sesuai dengan perkembangan zaman. Jepang merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem ini, dan hingga kini sistem tersebut telah menjadi landasan yang kuat bagi majunya sektor perikanan, khususnya di wilayah pesisir. Namun, ada juga sistem yang dalam perkembangannya justru mengalami degradasi, yang berarti tidak dapat dipertahankan lagi. Kasus ini dapat ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia.

Dari beberapa macam pendekatan dan jenis (model) pendekatan pengelolaan sumber daya perikanan di atas, muncul pertanyaan: manakah yang paling efektif untuk digunakan? Pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tapi membutuhkan jawaban yang barangkali secara tuntas sulit ditemukan dalam tulisan ini. Hal ini mengingat secara teoretis masih terus dikaji dan diperdebatkan karena memang model-model tersebut dilihat dari perspektif yang berbeda-beda. Sebagai contoh, para ekonom yang basis pemikirannya neo-klasik akan cenderung memilih model *individual property right* atau ITQ. Sementara itu, para sosiolog dan antropolog cenderung memilih komanajemen atau CBM, dan para ahli biologi atau lingkungan akan memilih model yang mengarah kepada manajemen ekosistem. Selain itu, faktor wilayah juga perlu menjadi pertimbangan mengingat pada

prinsipnya model pengelolaan sumber daya perikanan tersebut bersifat *site specific* yang sulit digeneralisasi untuk setiap wilayah.

Hingga saat ini ITQ memang merupakan pendekatan atau model yang diterapkan di negara-negara maju. Model ITQ juga sering disebut sebagai model yang “modern”, sehingga seolah-olah merupakan model yang patut ditiru untuk mengatasi problem sumber daya perikanan laut. Namun, baik secara teoretis maupun empiris telah terbukti bahwa ITQ memang mendatangkan keuntungan secara ekonomis. Namun, pada saat yang sama juga ITQ membawa sejumlah masalah secara sosial. Ini merupakan konsekuensi dari rumus “*the fewer vessels the larger the share of the resource for each them eithin a given TAC*”.

Secara teoretis, ITQ memang merupakan pemecahan ekonomi terhadap problem sumber daya, yang bertolak dari kerusakan sumber daya seperti *over fishing* dianggap sebagai kegagalan pasar (*market failure*). ITQ dianggap akan dapat menjaga kelestarian sumber daya sekaligus meningkatkan efisiensi usaha penangkapan. Akan tetapi, ada hal penting yang patut dikaji bagaimana pendekatan ITQ memahami karakter masyarakat (*fishing community*).

Dalam memahami karakter masyarakat nelayan paling tidak ada dua pendekatan yang sering digunakan (Jenfoft 2000). *Pertama*, adalah teori konsolidasi yang melihat masyarakat sebagai sistem yang interdependen (*interdependent system*), aspek peranan tidak diperhatikan dalam interaksi individu tapi antarperilaku individu tersebut saling memengaruhi satu sama lain. Dalam sistem ini, tidak ada hak dan kewajiban yang mengatur interaksi. Contoh yang tepat untuk sistem ini adalah antrean bus: para calon penumpang berkumpul tapi satu sama lain tidak ada kepentingan, kecuali memiliki tujuan yang sama, yakni mendapatkan tempat duduk yang nyaman. Calon penumpang akan menganggap calon penumpang lain

adalah sebagai gangguan. Jadi, masyarakat tidak lain dilihat hanya sebagai agregat dari individu-individu yang motif perilakunya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Hubungan mereka bersifat *zero sum game*, kemenangan satu pihak berarti kekalahan pihak lain. Pada komunitas perikanan, dicerminkan anggapan bahwa nelayan tidak lain merupakan pesaing bagi nelayan lain dalam usaha pemanfaatan sumber daya yang ada. Karena itu, menurut Jenfoft (2000), ITQ tidak lain merupakan upaya depersonalisasi masyarakat nelayan, karena lalu masyarakat hanya berpikir utilitas dan perhitungan-perhitungan rasional lainnya.

Kedua, teori domino yang melihat masyarakat sebagai fungsional yang saling bergantung dan saling mendukung karena berbagai macam ikatan baik budaya, keturunan atau keluarga, maupun sejarah. Dengan demikian, antarnelayan tidaklah “berjarak”, melainkan merupakan suatu bentuk hubungan kolegiat. Dalam konteks komunitas nelayan, hal ini ditunjukkan dengan adanya saling kerja sama, bukan persaingan, dalam pemanfaatan sumber daya. Kondisi masyarakat yang seperti inilah yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya berlangsung secara tepat baik secara ekonomi maupun sosial.

Lalu, faktor apa yang akan bisa membuat masyarakat tetap merupakan sistem yang fungsional? Jenfoft (2000) menjawab dengan menunjuk pentingnya organisasi karena melalui organisasi nilai-nilai sosial bisa dilakukan sehingga kerja sama, solidaritas, kohesi, dan integrasi sosial dapat terwujud. Dalam konteks perikanan, keberadaan organisasi nelayan sangat penting guna meningkatkan kerja sama integrasi antarnelayan. Melalui organisasi ini pula, nelayan diharapkan mampu menyampaikan aspirasinya dalam kaitan dengan pengelolaan sumber daya perikanan. Dari berbagai pendekatan maupun model pengelolaan yang telah dijelaskan di

atas, model ko-manajemen dianggap tepat untuk mengakomodasi kepentingan partisipasi nelayan dalam proses pengelolaan sumber daya perikanan tersebut.

Akan tetapi, pengalaman di Norwegia seperti digambarkan Jenfoft (2000) menunjukkan bahwa ternyata pada kenyataannya ko-manajemen juga tidak menjamin adanya peran nelayan dalam proses pengambilan keputusan. Karena itu, di Kanada ada organisasi nelayan yang mengusulkan adanya pendekatan baru yang mereka sebut “*community based co-mangement*” untuk mempertegas lagi bahwa nelayan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya perikanan.

Model Jepang: *Fishery Right*

Sejarah pengelolaan perikanan Jepang tidak terlepas dari apa yang telah berkembang pada era Edo/feodal dan Meiji (Morisawa *et al.* 1991). *Territorial use right* yang dikembangkan di Jepang merupakan akumulasi proses historis sejak masuknya Buddha. Sejak abad ke-6 sampai pertengahan abad ke-19, ada semacam larangan agama untuk makan daging yang ternyata didukung juga kurangnya Jepang akan lahan hijau untuk ternak. Akibatnya, sumber daya hewani laut menjadi buruan, dan selanjutnya industri perikanan berkembang pesat (Kawaguchi *et. al.* 1984). Namun, ternyata cepatnya perkembangan industri perikanan di Jepang pada waktu itu menimbulkan sejumlah konflik antara nelayan lokal dengan luar karena keterbatasan wilayah penangkapan (*fishing ground*). Melihat itu, rezim Edo (era feodal), melalui para tuan tanahnya di daerah, segera memberikan hak khusus kepada nelayan di wilayahnya untuk menangkap ikan, yang kemudian dikenal dengan istilah *soyu (communal ownership)* dari masyarakat desa nelayan. Dengan *soyu*, masyarakat desa dan nelayan memiliki hak mengelola

dan menangkap ikan di wilayahnya, sementara nelayan dari luar wilayah tersebut tidak diizinkan. Jadi, telah terjadi pengavelingan laut, dan menjurus pada *property right* terhadap wilayah perairan. Tapi, jangan lupa bahwa ini dikeluarkan Rezim Feodal juga dalam skenario penarikan pajak dari para nelayan lokal tersebut. Pihak yang sebenarnya berkuasa terhadap pengavelingan laut tersebut bukanlah nelayan, melainkan para tuan tanah yang berafiliasi ke pemerintah feodal.

Selanjutnya pada zaman Restorasi Meiji tahun 1868, hak-hak semacam *soyu* tersebut dihilangkan dan semuanya dikembalikan kepada pemerintah pusat yang baru (*kaimen kanyu sengen*). Hal ini terjadi pada tahun 1874. Namun, ternyata adanya kebijakan baru tersebut justru menimbulkan konflik antarnelayan di wilayah perairan, sehingga para nelayan menuntut dikembalikannya aturan main lama yang memang seolah-olah telah menjadi hak ulayat. Pada tahun 1875, pemerintah Meiji akhirnya memenuhi tuntutan para nelayan. Akan tetapi, hak-hak (*Fishery Right*) dialihkan dari tuan-tuan tanah ke gubernur yang selanjutnya diberikan kepada federasi koperasi atau asosiasi perikanan (*fisheries cooperative association-FCA*) untuk mengatur hak-hak tersebut demi kepentingan anggotanya. (Sato 1991; Hirasawa *et al.* 1991). Menurut Morisawa *et al.* (1991), apa yang dikembangkan pada era Meiji ini selanjutnya menjadi dasar bagi Undang-undang Perikanan Jepang pada tahun 1949. Selanjutnya, dalam UU perikanan yang baru tersebut terkandung prinsip-prinsip yang kuat untuk menghilangkan sisa-sisa feodalisme Rezim Edo. Prinsip tersebut, antara lain, memuat aturan: (a) bahwa *fishery right* hanya diberikan kepada nelayan atau pengusaha perikanan yang aktif, (b) penjualan hak (*leasing arrangement*) dilarang, dan (c) administrasi lokal yang menangani *fishery right* adalah FCA.

Fishery right sendiri berkembang sejalan, dengan perkembangan perundang-undangan. Berdasarkan UU Perikanan yang direvisi (1984) *fishery right* dapat dikategorikan menjadi tiga tipe, yakni (1) *common fishing right*, (2) *set-net fishing right*, dan (3) *demarcated fishing right*. Pertama, *common fishing right* merupakan hak yang diberikan kepada nelayan melalui koperasi perikanan di wilayah pesisir (*coastal*) dengan batas wilayah hingga dua km dari garis pantai. Dalam perkembangannya, hak ini dibagi lagi menjadi empat macam, yaitu: (a) hak untuk penangkapan spesies ikan dasar laut yang tidak bermigrasi, (b) hak untuk menangkap dengan alat tancap permanen di laut (*stationary gear*) pada kedalaman kurang dari 27 meter, (c) hak penangkapan ikan dengan *beach seine*, yang umumnya dilakukan di tepi pantai oleh para perempuan, dan (d) hak pada *inland fisheries* (perikanan darat). Dalam *fishery right*, diatur juga jenis spesies ikan yang boleh ditangkap, waktu penangkapan, jenis alat tangkap, dan metode penangkapan. Sangat tegas bahwa nelayan luar dari wilayah lain tidak diizinkan masuk dan beroperasi di wilayah tersebut.

Kedua, *set-net fishing right* merupakan hak penangkapan ikan dengan menggunakan jaring tancap (*set net*) pada kedalaman di atas 27 meter dengan wilayah tertentu sesuai dengan hak, umumnya untuk penangkapan ikan yang bermigrasi. Ketiga, *demarcated fishing right*, umumnya digunakan pada usaha budi daya ikan (*mariculture*) di pesisir yang sering berbentuk jaring apung. Hanya nelayan yang menjadi anggota koperasi perikanan yang dapat memperoleh *fishery right* tersebut (Lim *et al.* 1995). Selanjutnya, para nelayan itu pun dikenai "pajak" atas yang diperolehnya dengan pembayaran setiap tahun kepada koperasi.

Hak-hak tersebut dikeluarkan oleh pemerintah provinsi kepada koperasi-koperasi perikanan yang umumnya dimiliki setiap kota.

Koperasi sendiri di dalamnya terdapat komisi pengelola hak (*fishery right management committee*) yang mengatur hak-hak tersebut. Komisi ini selanjutnya akan berhubungan intensif dengan Komisi Koordinasi Perikanan Regional (*Regional Fishery Coordination Committees*) yang terdiri dari 15 anggota, 9 di antaranya mewakili nelayan, 4 mewakili orang yang mengetahui dan berpengalaman dalam pengelolaan perikanan regional, dan 2 sisanya mewakili kepentingan publik lainnya. Dengan komposisi seperti itu, tampak posisi nelayan sangatlah kuat. Komisi ini berfungsi untuk mengembangkan perencanaan pemanfaatan sumber daya perikanan, memberi sanksi pada nelayan yang melanggar peraturan, dan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di perairan pesisir.

Memang, “pengavelingan laut” telah terjadi di Jepang. Namun, upaya tersebut diatur sedemikian rupa sehingga efektif dan produktif bagi usaha perikanan. Ternyata adanya “pengavelingan laut” melalui kelembagaan *fishery right* membawa sejumlah dampak positif. Pertama, konflik-konflik antarnelayan di perairan menjadi makin berkurang, seiring dengan jelasnya batas-batas yuridiksi usaha perikanan. Kedua, pendapatan nelayan meningkat karena memperoleh jaminan wilayah usaha dan dapat menikmati kekayaan alam di wilayahnya sendiri. Ketiga, ada hal yang lebih penting dari itu semua, yakni dengan adanya hak tersebut, nelayan akan bertanggung jawab terhadap masa depan wilayah perairannya. Karena itu, mereka tidak akan sembarang menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan. Hal ini mengingat adanya kesadaran bahwa keberlanjutan sumber daya hayati laut tersebut merupakan masa depan kehidupan mereka sendiri.

BAB 8

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Topik pemberdayaan nelayan penting dikaji untuk mengatasi problem besar nelayan, yakni kemiskinan, ketertinggalan, ketertindasan, dan keterasingan. Sebagaimana sering disebutkan, hal tersebut merupakan hal yang ironis karena justru terjadi pada masyarakat yang bekerja di dalam sumber daya yang melimpah. Untuk itu, memang tidak ada jalan lain, selain mengeluarkan nelayan dari perangkap keterbelakangan. Pertanyaannya adalah bagaimana melakukan pemberdayaan yang efektif sehingga nelayan dapat mengalami mobilitas vertikal sekaligus keluar dari jebakan-jebakan yang memarginalkan posisinya? Namun, formulasi konsep pemberdayaan tersebut sulit dilakukan tanpa pemahaman tentang pergeseran paradigma pembangunan yang melatarbelakangi munculnya gagasan pemberdayaan dan pemahaman tentang karakteristik sosial nelayan, suatu kelompok manusia yang akan diberdayakan.

Pemberdayaan: Hasil Pergeseran Paradigma Pembangunan

Kemunculan istilah *pemberdayaan* sekitar pertengahan 1990-an merupakan isyarat terjadinya perubahan paradigma pembangunan. Pada mulanya, paradigma modernisme telah mendominasi baik dalam perencanaan maupun praktik pembangunan. Dalam

paradigma tersebut, menurut Sanderson (1993), paling tidak terdapat tiga asumsi pokok sebagai berikut:

- (1) Keterbelakangan cenderung dilihat sebagai suatu “keadaan asli” (*original state*), sebagai suatu keadaan masyarakat yang telah ada dalam aneka bentuknya. Keterbelakangan itu terjadi akibat belum masuknya; kapitalisme, sehingga untuk keluar dari ketertinggalan, kapitalisme-lah jawabannya;
- (2) Keterbelakangan merupakan akibat dari banyaknya kekurangan yang ada; di dalam suatu masyarakat, seperti kekurangan kapital sehingga untuk mengatasinya diperlukan formasi kapital baru melalui difusi modal dan teknologi;
- (3) Masyarakat terbelakang biasanya tidak mempunyai semacam kesadaran atau mentalitas yang menawarkan perkembangan. Kemajuan dikatakan terjadi bila orang telah mengadopsi pemikiran rasional, nilai-nilai yang berorientasi masa depan, dan sistem etik. Sementara itu, umumnya nilai-nilai lokal masyarakat dianggap tidak kondusif bagi pencapaian kemajuan.

Jadi, dengan kata lain, menurut paradigma modernisme tersebut, masalah keterbelakangan suatu masyarakat bersumber dari masyarakat itu sendiri, sehingga solusinya adalah perlunya bantuan dari pihak luar. Pihak luar inilah yang akan menata proyek pembangunan, dengan sejumlah keyakinan bahwa model yang akan diciptakannya bersifat universal sehingga terbebas dari dimensi ruang dan waktu.

Sering tidak disadari, bahwa para pengambil kebijakan pada masa lalu menganut aliran pemikiran modernisme. Bahkan, tidak sedikit pula akademisi yang terjebak pada perangkap ideologi modernisme. Adanya pencangkokan model koperasi perikanan ke semua wilayah secara homogen, serta tidak diakuinya kearifan

tradisional untuk pengelolaan sumber daya (seperti *sasi*) dalam sistem hukum nasional, merupakan contoh kecil dari dominasinya aliran modernisme ini dalam praktik pembangunan di Indonesia.

Ternyata secara empiris terbukti bahwa paradigma modernisme tersebut menyebabkan berbagai persoalan ketimpangan di masyarakat. Dalam dunia pertanian, kajian tentang dampak modernisasi terhadap perubahan struktur sosial petani sudah sangat banyak. Hasilnya memang menunjukkan bahwa modernisasi ternyata menciptakan polarisasi sosial, karena teknologi yang diintroduksi tidak netral skala. Hanya petani kaya yang bisa menikmati hasil modernisasi. Inilah yang sering diungkapkan Sajogyo (1982) dengan istilah “*modernization without development*”. Tentu ke depan modernisme sebagai ideologi pembangunan sudah saatnya ditinggalkan. Hal ini disebabkan secara empiris terbukti gagal dalam mengapresiasi nilai dan sistem sosial lokal sehingga program-program pembangunan cenderung teknokratis, sentralistis, dan kurang membumi.

Sebagai kritik terhadap ideologi modernisme, telah berkembang paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang lebih memberikan tempat kepada rakyat untuk turut serta dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proses pembangunan. Dalam payung paradigma inilah, wacana pemberdayaan (*empowerment*) mulai tumbuh. Pemberdayaan merupakan upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat (Wahyono *et. al* 2001). Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisasi diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, melainkan sebagai subyek yang menentukan hidup mereka

(Moelyarto 1996, dalam Wahyono *et. al* 2001). Paparan pergeseran paradigma pembangunan di atas penting diperhatikan sebagai kerangka formulasi model pemberdayaan nelayan.

Dimensi dan Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial masyarakat pesisir paling tidak memiliki dua dimensi pokok, yakni *dimensi kultural* dan *dimensi struktural*. Dimensi kultural pemberdayaan sosial mencakup upaya-upaya perubahan perilaku ekonomi, orientasi pendidikan, sikap terhadap perkembangan teknologi, kebiasaan-kebiasaan, dan seterusnya. Pemberdayaan ini diperlukan untuk mengatasi kemiskinan kultural seperti pola hidup konsumtif, rendahnya kemampuan menabung, sikap subsistensi, resistensi dan terhadap pendidikan formal.

Sementara itu, dimensi struktural mencakup upaya perbaikan struktur sosial sehingga memungkinkan terjadinya mobilitas vertikal nelayan. Perbaikan-perbaikan struktural tersebut umumnya berupa penguatan solidaritas nelayan untuk selanjutnya dapat berhimpun dalam suatu kelompok dan organisasi yang mampu memperjuangkan kepentingan nelayan. Di sini tidak ada pretensi untuk selalu menciptakan koperasi nelayan karena apa pun bentuk organisasi yang tercipta, yang terpenting adalah organisasi tersebut secara riil mampu menjamin kepentingan sosial ekonomi nelayan. Kehadiran organisasi tersebut -yang dijalankan sesuai dengan tingkat budaya organisasi nelayan setempat - juga diharapkan dapat menjadi institusi alternatif selain institusi patron-klien sebagaimana selama ini telah mengakar.

Terdapat empat akses dalam pemberdayaan masyarakat pesisir pada umumnya adalah: 1) Akses terhadap sumber daya alam; 2) Akses terhadap partisipasi; 3) Akses terhadap pasar; dan 4) Akses terhadap informasi dan pengetahuan. *Pertama*, akses

terhadap sumber daya adalah kemampuan masyarakat pesisir baik secara individu maupun berkelompok untuk dapat memanfaatkan sumber daya pesisir, perikanan dan kelautan. *Kedua*, akses terhadap partisipasi artinya adalah bahwa masyarakat pesisir mendapatkan partisipasi mulai dari informasi, *input*, proses sampai *output* dan *outcome* hasil dari partisipasi secara merata dan adil. *Ketiga*, akses terhadap pasar, artinya bahwa masyarakat pesisir yang sebagian besar adalah nelayan mampu menjual hasil tangkapannya dan mengetahui informasi dinamika pasar yang berkembang, seperti harga komoditas ikan tertentu sedang, naik atau informasi harga komoditas unggulan di daerah lain. *Keempat*, akses terhadap informasi dan pengetahuan adalah transformasi informasi, pengetahuan yang lancar antara masyarakat dengan masyarakat lain dan antara masyarakat dengan pemerintah. Akses informasi meliputi ilmu pengetahuan meliputi teknik dan cara penangkapan yang ramah lingkungan, program bantuan dan pemberdayaan pemerintah, dinamika perkembangan permintaan dan penawaran pasar, cuaca dalam melaut, dan akses mendapatkan bahan bakar untuk keperluan melaut.

Harapannya dengan adanya pemberdayaan menciptakan masyarakat yang *informed*, memanfaatkan kesempatan akses terhadap pelayanan umum, menciptakan *bridging social capital* antara masyarakat pesisir yang satu dengan yang lain dalam satu kawasan, dan menciptakan *linking social capital* dalam berjejaring dengan pemerintah sehingga menciptakan kerjasama yang bersifat akuntabel dan transparansi atas kebijakan yang mengatur masyarakat.

Dalam pemberdayaan nelayan -baik secara struktural maupun kultural perlu dipahami adanya keunikan karakteristik sosial nelayan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yang tentunya menuntut adanya pendekatan pemberdayaan yang unik pula. Namun, pendekatan yang unik ini pun tidak bisa digeneralisasi untuk seluruh konteks

kehidupan nelayan. Banyak variabel yang memengaruhi keunikan tersebut, baik yang bersifat sosiologis maupun ekologis. Dengan demikian, pendekatan pemberdayaan nelayan Jawa dan luar Jawa mesti berbeda seiring perbedaan sosiologis (struktur, kultur, dan formasi sosial) dan ekologis. Namun, ada benang merah prinsip-prinsip pemberdayaan yang penting digunakan untuk seluruh konteks komunitas nelayan.

1. Prinsip Tujuan

Pemberdayaan mesti dilandasi tujuan yang jelas, yang tentunya berbeda dengan tujuan yang didengung-dengungkan para penganut modernisme. Dalam modernisme, tujuan kedatangan kita dalam komunitas nelayan adalah mentransfer bantuan kepada nelayan, baik yang berupa pengetahuan, modal, teknologi, maupun yang lainnya. Nelayan dianggap sebagai *receiver* atas apa yang kita bawa dari luar yang sering kita anggap sebagai “obat mujarab”. Asumsinya adalah bahwa nelayan tidak punya apa-apa yang mampu mendorong mobilitas vertikal nelayan. Berbeda dari paradigma lama, dalam paradigma baru yang akan kita kembangkan, nelayan mesti dianggap sebagai subyek dalam pembangunan, sehingga pendekatan yang kita lakukan adalah *to help them to help themselves*, yakni membantu para nelayan agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dengan pendidikan orang dewasa (*andragogi*). Artinya, di sini kita hanya sebagai fasilitator dan bukan sebagai pihak yang terus memberi.

Dalam pendekatan baru ini, asumsinya adalah bahwa nelayan sebenarnya memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dirinya sendiri.

2. Prinsip Pengetahuan dan Penguatan Nilai Lokal

Pengetahuan “modern” yang kita miliki sering dianggap segalanya dan ampuh untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi

nelayan, baik persoalan teknis maupun sosial. Padahal, seperti diketahui, bahwa nelayan memiliki sistem pengetahuan tersendiri yang penting dijadikan bahan atau bekal bagi pemberdayaan. Sistem pengetahuan yang dimiliki nelayan sudah cukup mengakar karena diwariskan secara turun-temurun. Sistem pengetahuan yang mereka miliki sudah sepatutnya membawa kita untuk sampai pada kesimpulan bahwa “nelayan adalah paling hebat di dunianya”. Karena itu, sudah sepatutnya pula kita mau mendengarkan sekaligus belajar dari pengetahuan yang mereka miliki.

Begitu pula berkaitan dengan nilai lokal, bahwa sebenarnya banyak nilai lokal yang potensial sebagai landasan dalam pemberdayaan. Nilai lokal tersebut dapat menjadi modal sosial yang cukup penting untuk dikembangkan bagi kemajuan masyarakat nelayan.

3. Prinsip Keberlanjutan (*Sustainability*)

Prinsip ini sangat penting diperhatikan mengingat pemberdayaan nelayan merupakan salah satu bentuk rekayasa sosial. Ihwal ini membutuhkan waktu yang relatif lama karena berkaitan dengan perubahan sosial, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Perubahan tersebut tidak dapat berlangsung seperti membalik telapan tangan. Berdasarkan pengalaman proyek-proyek pemberdayaan yang dilakukan, kita sering terjebak pada “paradigma proyek” yang mengharuskan tercapainya target secara nyata dalam waktu yang singkat. Sebagai contoh, untuk mengatasi hambatan struktural mobilitas vertikal nelayan, para konsultan sering mengupayakan terputusnya hubungan patron-klien. Diharapkan melalui pemutusan hubungan dengan patron, nelayan akan terbebas dari perangkap kebergantungan dan secara otomatis akan mengalami mobilitas vertikal. Tidak sedikit pula dari konsultan tersebut yang melakukan

upaya pemutusan hubungan melalui penggantian seluruh utang klien terhadap patron. Dengan bebasnya utang klien seolah-olah persoalan akan selesai, tanpa dipikirkan masak-masak bagaimana kondisi nelayan setelah “proyek” pemberdayaan itu selesai; apakah nelayan masih tetap bebas dari perangkap kebergantungan dengan patron?

Dengan demikian, prinsip keberlanjutan sering diabaikan dalam “proyek-proyek” pemberdayaan dan ini terjadi karena masih kuatnya paradigma “proyek” dalam setiap aktivitas pemberdayaan dan sifat proyek yang hanya sesaat, tidak *multi years*. Karena itu, perlu dipikirkan perubahan sistem administrasi proyek yang terkait dengan program pemberdayaan. Alhasil, program pemberdayaan bisa berjalan dengan efektif, tanpa ada batasan-batasan administrasi yang sering menghambat.

4. Prinsip Ketepatan Kelompok Sasaran

Mesti dipahami, bahwa setiap komunitas nelayan memiliki ciri stratifikasi sosial yang berbeda-beda. Ada yang mencirikan polarisasi dan ada pula yang tidak. Seperti digambarkan Chambers (1987), yang sering didatangi para tim pelaksana adalah justru para elit desa, yang sebenarnya jauh dari persoalan. Namun, karena elit desa lebih bisa berkomunikasi, kita sering pula menganggap bahwa suara mereka adalah suara “rakyat desa”. Sebaliknya, nelayan miskin yang tidak bisa “membuka mulut” jarang kita datangi. Akibatnya, informasi yang kita peroleh sebenarnya bias bagi kepentingan informan elit nelayan tersebut.

Akibat lebih jauh, tidak sedikit program pemberdayaan yang hanya menyentuh elit nelayan dan bukan nelayan strata bawah yang sebenarnya merupakan pihak yang merasakan banyak masalah. Karena itu, sudah saatnya pemberdayaan sosial nelayan saat ini

berorientasi pada kelompok sasaran yang tepat, yakni kelompok nelayan yang berada dalam strata bawah untuk sebuah program tertentu.

5. Prinsip Kesetaraan Gender

Prinsip ini penting dalam mewujudkan efektivitas pemberdayaan. Seperti dijelaskan di muka, salah satu ciri sosial nelayan adalah kuatnya peran perempuan atau istri nelayan dalam aktivitas ekonomi dan pengambilan keputusan ekonomi rumah tangga. Melihat fakta itu, maka sasaran pemberdayaan mesti mencakup istri-istri nelayan. Sering program pemberdayaan cenderung pada laki-laki, sehingga laki-laki lah yang selalu diajak berdiskusi dan memecahkan masalah yang mereka hadapi tanpa melibatkan istri-istrinya. Prinsip gender ini juga sempat disinggung Chambers (1987), bahwa pada umumnya perempuan terabaikan dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan penyuluh laki-laki.

Model-Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Salah satu model yang pernah dikembangkan pemerintah adalah program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) pada tahun 2001 dengan prinsip *to help them to help themselves*. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan pendayagunaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan tujuan PEMP, dorongan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian pembangunan. Kegiatan PEMP meliputi pengembangan partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, dan peningkatan fasilitas masyarakat dalam akses permodalan,

serta pengembangan kemampuan pemerintah lokal dan masyarakat. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat sendiri meliputi pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat, pengembangan sumber daya laut dan pesisir dengan berbasis masyarakat yang sesuai kaidah kelestarian lingkungan, serta pengembangan jaringan dan kelembagaan sosial ekonomi.

Untuk mendukung program tersebut, kemitraan antara masyarakat, aparat dan swasta dalam mengembangkan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pantai perlu dibangun. Model pengembangan PEMP diawali dengan tahapan identifikasi potensi dan permasalahan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dasar tentang daerah. Informasi ini berupa informasi tentang sumber daya alam dan sumber daya pesisir, sumber daya manusia, kegiatan usaha perikanan, sarana dan prasarana, kelembagaan sosial ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Informasi (data) yang diperoleh akan melewati proses analisis data sehingga dihasilkan susunan program pengembangan PEMP.

Analisis data dilakukan untuk menghasilkan program-program pengembangan PEMP, mencakup program ekonomi, program sosial, program lingkungan, dan infrastruktur. Program-program tersebut hendaknya berbasiskan kemampuan lokal, saling mendukung dan tidak tumpang-tindih. Dalam hal ini, program sosial, program lingkungan, dan infrastruktur dikembangkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, program sosial juga dilaksanakan untuk mengembangkan budaya lokal dalam kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mengantisipasi dan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam pemanfaatan sumber daya alam.

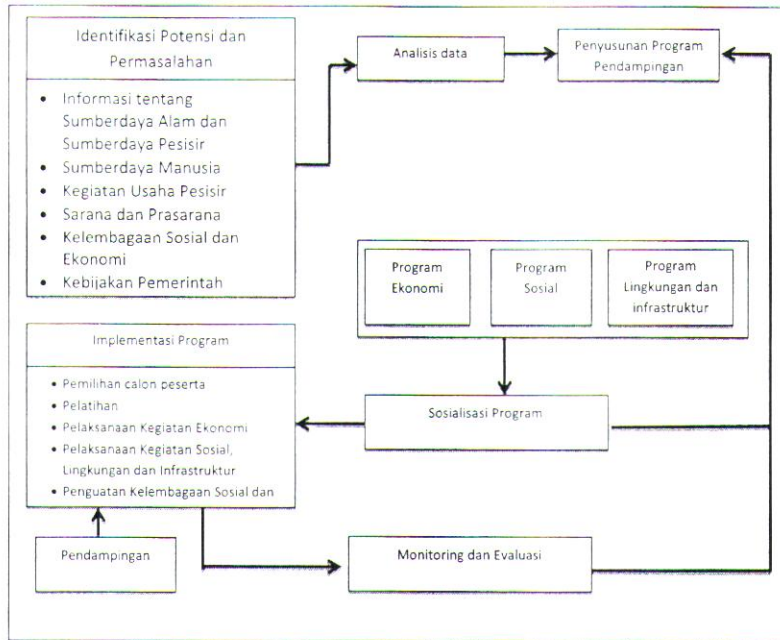
Tahapan selanjutnya adalah sosialisasi program kepada seluruh *stakeholder* untuk mendapatkan masukan konstruktif. Implementasi program dilaksanakan dalam bentuk pemilihan calon

peserta, pelatihan, pelaksanaan kegiatan ekonomi, pelaksanaan kegiatan sosial, lingkungan, fasilitas, dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi. Dalam implementasi program, masyarakat selalu mendapatkan pendampingan dari Tenaga Pendamping Desa yang telah dilatih terlebih dahulu.

Tahap terakhir yang perlu dilakukan adalah monitoring dan evaluasi untuk memantau implementasi program serta mengkaji ulang kelemahan dan kelebihan dari program, termasuk kendala-kendalanya. Pemantauan dan evaluasi harus selalu dilakukan agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan dalam program kerja sehingga semakin mengarah pada program yang sempurna. Secara skematis, model pengembangan PEMP dilihat pada gambar 4 di bawah ini:

Keberhasilan program PEMP sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan dalam implementasi. Karena program PEMP melibatkan banyak unsur dan memiliki sasaran masyarakat pesisir dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, pendekatan yang dilakukan hendaklah bersifat persuasif dan aktif dari pemerintah pusat maupun daerah. Pendekatan yang digunakan dalam program PEMP ini adalah pendekatan partisipatif, kemandirian, dan kemitraan, dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang bersifat *acceptable, transparency, accountability, responsiveness, quick disbursement, democracy, sustainability, equality, dan competitiveness*.

Sosiologi Masyarakat Pesisir



Gambar 4. Model Pengembangan PEMP

Sumber: DKP (2002).

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, LG. 1995. *Privatising Open Access Fisheries: Individual Transferable Quotas*. In: Bromley, D. W. *The Handbook of Environmental Economics*. Oxford: Blackwell Handbooks in Economics.
- Anggraini, Eva. *Analisis Penyusunan Model Pengelolaan Sumber Daya Laut: Tinjauan Sosiologi dan Kelembagaan di Kelurahan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu*. Skripsi, Institut Pertanian Bogor, IPB. Tidak dipublikasikan.
- Bappenas dan JICA. 2014. *Analisis Pencapaian Nilai Tukar Nelayan*. Kerjasama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan JICA. Jakarta.
- Budiman, Arif. 1995. *Negara dan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas.
- Chambers, Robert. 1987. *Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Charles, Anthony. 1991. *Sustainable Fisheries*. Blackwell.
- Damanhuri, Didin S. 1996. *Ekonomi Politik Alternatif*. Jakarta: Sinar Harapan.
- _____. 1998. *Pilar-Pilar Reformasi Ekonomi Politik*. Jakarta: Cides dan Pustaka Hidayah.
- _____. 1997. *Tinjauan Kritis atas Aliran-Aliran Ekonomi Dunia dan Implikasinya Bagi Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Badan Diklat Depdagri.
- Djojohadikusuma, Sumitro. 1993. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

- Direktorat Jenderal Perikanan. 2000. *Buku Statistik Perikanan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers.
- Firth, Raymond. 1996. *Malay Fishermen: Their Peasant Economy*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.
- Goodwin, James R. 1990. *Crisis in The World's Fisheries: People Problem and Policies*. California: Stanford University Press.
- Hirasawa, Yutaka, Masaaki Sato, Tadashi Yamamoto. 1991. Fisheries cooperative as the core or development of coastal fisheries management system. *Proceeding*. International Perspectives on Fisheries Management with Special Emphasis on Community Based Management System Development in Japan.
- Jentoft, Svein. 2000. "The community: a missing link of fisheries management." *Marine Policy* Vol. 23 (2000): 53-59.
- Juwono, Pujo Semedi H. 1998. *Ketika Nelayan Harus Sandar Dayung*. Jakarta: Kophalindo.
- Kiersberg, Louis. 1998. *Constructive Conflicts from Escalation to Resolution*. England: Rowman & Littlefield.
- Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah dan Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Press.
- _____. 1990. *Sejarah dan Teori Antropologi II*. Jakarta: UI Press.
- Kusnadi. 2000. *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung: HUP
- Lim, CP, Matsuda, Y. Shigemi. 1995. "Co-management in marine fisheries: the Japanese experience." *Coastal Management* Vol. 23 No.3: 195-222.
- Mashuri (ed.). 1999. *Pemberdayaan Nelayan Tertinggal dalam Mengatasi Krisis Ekonomi: Telaahan Terhadap sebuah Pendekatan*. Jakarta: Puslitbang Ekonomi dan pembangunan LIPI.
- Morisawa, Motokichi, Kevin Short, Tadashi Yamamoto. 1991. Legal framework for fisheries management system based on exclusive fishing rights. *Proceeding*. International Perspectives on Fisheries

Daftar Pustaka

- Management with Special mphass on Community based management System Development in Japan.
- Muflikhati, Istiqlaliyah. 2010. "Analisis dan Pengembangan Model Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia dan Kesejahteraan Keluarga di Wilayah Pesisir Provinsi Jawa Barat." Disertasi, Sekolah PascaSarjana, Institut Pertanian Bogor, IPB. Tidak dipublikasikan.
- Nikijuluw, Victor. 2001. *Rezim Pengelolaan Sumber daya Perikanan*. Jakarta: P3R.
- Oleona, Ambrosius & Pieter Tedu Bataona. 2001. *Masyarakat Nelayan Lamalera dan Tradisi Penangkapan Ikan Paus*. Bogor: Lembaga Galekat Lefo Tanah.
- Pollnac, Richard B. 1988. "Karakteristik Sosial dan Budaya dalam Pembangunan Perikanan Berskala Kecil" dalam Cernea, Michael, *Mengutamakan Manusia dalam Pembangunan: Variabel-Variabel Sosiologi dalam Pembangunan Perdesaan*. Jakarta: UI Press.
- Raharjo, M. Dawam. 1983. *Esei-Esei Ekonomi Politik*. Jakarta. LP3ES.
- Sanderson, Stephen K. 1993. *Sosiologi Makro*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ruddle, Kenneth, Satria Arif. 2010. "An Introduction to Pre-Existing Local Management System in Southeast Asia" dalam *Managing Coastal and Inland Waters*. London: Springer.
- Sajogyo. 1982. "Modernization without Development." *The Journal of Social Studies*. Bacca, Bangladesh. 90.
- Samiya, Maya. 2011. "Pengaruh Ikatan Patron Klien terhadap Pengelolaan Sumberdaya Pesisir. Skripsi." Institut Pertanian Bogor, IPB. Tidak dipublikasikan.
- Sanderson, Stephen K. 1993. *Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarman, Mukhtar & Sajogyo. 2000. *Masalah Penanggulangan Kemiskinan Refleksi dari Kawasan Indonesia Timur*. Jakarta: Puswaswara.
- Sato, Masaaki. 1991. Fisheries cooperatives in Japan as fisheries management organization. *Proceeding*. International Perspectives

on Fisheries Management with Special mphass on Community based management System Development in Japan.

- Satria, Arif. 2001. *Dinamika Modernisasi Perikanan: Formasi Sosial dan Mobilitas Nelayan*. Bandung: HUP
- _____. 2001. *Nelayan Era Otonomi Daerah: Terberdayakan atau Terperdayakan?* Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional “Pemanfaatan Teknologi dan Sumber daya Manusia yang Profesional untuk Pengembangan Perikanan yang Berkelanjutan” pada 16 Juni 2001 di STP Jakarta.
- Satria, Arif, Abu Bakar Umbari, Ahmad Fauzi, Ari Purbayanto, Endriatmo Sutarto, Ismudi Muchsin, Istiqlaliyah Muflikhati, Muhamad Karim, Sudirman Saad, Wawan Oktariza, Zulhamsyah Imran. 2002. *Menuju Desentralisasi Kelautan*. Jakarta: Cidesindo.
- Satria, Arif and Yoshiaki Matsuda. 2004. “Decentralization of Fisheries Management in Indonesia. *Marine Policy* 28 (2004): 437–450.
- Satria A, Matsuda Y, Sano M. 2006. Questioning community based coral reef management systems: case study of awig-awig in Gili Indah, Indonesia. *Environment, Development, and Sustainability*.
- Satria, Arif. 2009a. *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LkiS.
- Satria, Arif. 2009b. *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*. Bogor: IPB Press.
- Satria, Arif, Rinto Suncoko dan Hirmen Sofyanto, 2013. *Socio Economic Study to Support Development of Coastal and Marine Spatial Planning and Fishery Management in Rote Ndao District of East Nusa Tenggara Province*. Collaboration Research: Faculty of Human Ecology, Bogor Agricultural University and The Nature Conservancy Indonesia.
- Scott, James C. 1991. *Social Networking Analysis*. London: Sage Publications.
- Sitorus, Felix, Satyawan Sunito, Endriatmo Soetarto, Ivanovich Agusta. 1998. *Sosiologi Umum*. Bogor: DOKIS.
- Soekanto, Soerjono. 1995. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soewito. 2000. *Sejarah Perikanan Indonesia*. Jakarta: Ditjen Perikanan RI.

Daftar Pustaka

- Sorokin, Pitirim. 1962. "Social Stratification" in Talcot Parsons, Edward Shills, Kaspar P. Naegele, Jesse R Pits (ed), *The Theory of Society: Foundation of Modern Sociology Theory*. The Free Press of Glence.
- Sunarto, Kamanto. 2000. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suncoko, Rinto Andhi. 2013. "Politik Seafood Savers Ikan Konsumsi Karang Hidup (Studi Kasus di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara)." Thesis, Sekolah PascaSarjana, Institut Pertanian Bogor, IPB. Tidak dipublikasikan.
- Suseno, Frans Magnis. 1999. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utomis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia.
- Todaro, Michael P. 1995. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- UU No 25 tentang Pemerintahan Daerah & UU tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Wahyono, Ary, I.G.P Antariksa, Masyhuri Imron, Ratna Indrawasih, dan Sudiyono. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wright, Eric Olin. 1982. "Batas-Batas Kelas dan Lokasi Kelas yang Kontradiktif" dalam Giddens, Anthony, dan David Held, *Perdebatan Klasik dan Kontenporer mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zanden, Vander James W. 1990. *Sociology: The Core*. London: Mc Graw Hill Publishing.
- Zerner, Charles. 1992. "Community Management of Marine Resources in the Maluku Island." FAO Fisheries Report FAO/JAPAN Expert Consultation on the Development of Community-Based Coastal Fishery Management System for Asia and the Pacific. No. 474 Vol. 127-142.

INDEKS

- ABK, 18, 29-31, 50, 64-65, 72-76, 78-80
Akses, 7, 129-130, 134
Ambrosius Oleona, 67
Anderson, 118, 127
Andragogi, 131
Andriati, 21
Anggraini, 46-47
Arif Satria, xii, 19, 22, 25, 29, 31, 37, 53, 55, 57, 62, 64-65, 73-74, 77-78, 80, 84, 86, 88, 111-113,
Arya Hidi Dharmawan, 11
awig-awig, 14, 87, 113-115
- Bagan Malam, 54, 75-76
Bagan Siapi-api, 25, 57, 86, 89, 97
Bagan Tancap, 37
Bajo Lamanggau, 87
Bajo Wakotobi, 60-61
Bank Dunia, 93-95
Bappenas, 96, 100, 102
beach seine, 124
Belanda, 107
Bengkulu, 89
Berkes, 116
- Blitar, 104
Borjuis, 66-67
BPPI, 59
BPS, 93-94, 97-99, 101, 103,
bridging social capital, 130
Bugis, 58
- cadranan, 19
Chambers, 133-134
Charles, 31-32
Cirebon, 57
Code of Conduct for Responsible Fisheries, 107
collective conscience, 14
Co-management, 108-109, 116
command and control, 109
commercial fisher, 30, 32
common fishing right, 124
community based management, 108-109, 111
cothok, 25
- demarcated fishing right*, 124
Denmark, 109

Indeks

- Departemen Kelautan dan Perikanan, viii, 1
- Dimensi kultural, 129
- Dimensi struktural, 129
- Discovery*, 56-57
- Ditjen Perikanan, 27, 60
- division of labour, 11, 14
- DKP, 1, 9, 137
- dugo-dugo*, 16
- Dyadic contract*, 40
- Emotional friendship*, 39
- Empowerment*, 128
- Enforcement*, 25
- Engels, 23
- FAO, 116
- Feodal, 63, 122-123
- Filsafat Materialisme, 23
- fisheries management*, 106, 116
- Fishing ground, 26, 85, 90, 92, 95, 129
- fishing right*, 118, 124-125
- folk*, 10, 14
- Folk-society*, 11
- gillnet, 34, 59, 70
- Goodwin, 22
- GT (gross ton), 27
- hak ulayat, 84, 113-114, 123
- hand line*, 34
- Hindia Belanda, 59, 107
- Hirasawa, 123
- HNSI, 23, 65-66
- Hongkong, 45
- Horton, 8
- indigenous knowledge*, 18, 114
- Industrial fisher, 30
- infrastruktur, 23, 135, 137,
- Instrumental friendship*, 39
- ITQ, 118-121
- James Scott, 40
- juragan darat, 28
- juragan laut, 28, 45
- juragan, 65, 68-69
- juragan-pandega, 68
- Juwono, 16-17, 41, 68-70
- Kamanto Sunarto, 38-39
- Kapal *long line*, 3, 93
- kapitalis, 62
- Kawaguchi, 122
- kemiskinan absolut, 92-93
- kemiskinan kultural, 104, 129,
- kemiskinan relatif, 92-93
- Kepulauan Natuna, 25, 44
- Kepulauan Fiji, 59
- kesadaran kolektif, 14
- Koentjaraningrat, 9-11, 13-14, 38, 40, 56-57

Sosiologi Masyarakat Pesisir

- Komblum, 37
 Komoditas, 7, 54, 75-76, 98, 100, 130
 Konflik cara produksi atau alat tangkap, 89
 konflik cara tangkap atau alat produksi, 85
 konflik kelas, 88-89
 konflik kepemilikan sumber daya, 85-86
 Konflik lingkungan, 86
 Konflik primordial, 86
 Konflik usaha, 86
 Konsep Formasi Sosial, 86
 Kusnadi, 21, 51, 62, 68, 71-72
- lampara malam*, 75-76
lampara siang, 75-76
langgan, 42-44
large scale fisherman, 29
Linking social capital, 130
 Lombok, 14, 86, 113
 Lovoten Law, 117
 LSM, 3, 114
- Maluku, 14, 110, 113
 Maori, 24
mariculture, 124
 Marxis, 23
 masyarakat agraris, 7
 Masyhuri Imron, 41
 Matsuda, viii, 111,
 Maya Samiya, 46, 48-49
- mini purse seine*, 5, 35
mode of production, 62
 Morisawa, 122
 Muara Angke, 25, 92, 105,
 Muara Baru, 3, 93
 Muflikhati, 93-97
- Native/indigenous/aboriginal fishers*, 32
 nelayan ikan dasar, 37
 nelayan lampara siang, 75-76
 nelayan perahu layar, 34
 nelayan sampan, 34
 nelayan tombak, 34
 nelayan tradisional, 1-2, 24-25, 29, 45, 55, 63-64, 85-89
 nelayan tuna, 75, 78
 nelayan udang, 36
 Nikijuluw, 109, 115, 117
 Nilai Tukar Nelayan (NTN), 100-103
 modernisasi 50, 52, 57-60
 NTP, 98-99
- one day fishing*, 2
one week fishing, 2
open access, 7, 84, 118
overexploitation, 115
- panglima laot, 87
 pantura Jawa, 3
 Papalele, 35, 44, 75-76,

Indeks

- Papua, 3
 patron-klien, 2, 6, 38, 41-46, 104-105, 129, 132
peasant community, 12-13
peasant-fisher, 29-30
 pengetahuan lokal, 16, 114
people centered development, 128
Perbani, 17
 Pieter Tedu Bataona, 67
 PKSPL IPB, ix, 17, 41, 88
 Pollnac, 20, 29-30,
 Pomeroy, 116
post-peasant fisher, 30
poverty line, 93
principle of reciprocity, 40
 prinsip kesetaraan gender, 134
profit oriented, 31
 pukot harimau, 84
 Pulau Busung, 42, 87-88
 Pulau Karimun, 26, 89
 Punggawa, 45
purse seine, 5, 30, 35, 64, 72-73
- Ralp Linton, 8, 56
Rapid Appraisal for Fisheries, 18
 Raymond Firth, 8, 22, 29-30
recreational fisher, 32
 Redfield, 10-13
Regional Fishery Coordination Committees, 125
 Resolusi konflik, 90
 Restorasi Meiji, 123
 Riau, 3, 42, 89, 92
 ritualisme, 20
- Rokhim Dahuri, viii, 26, 105-106,
 Sajogjo, 8, 44-45, 93, 128
 sampan berkajang, 4
 Sanderson, 127
 Sape-Bima, 41
 Sarman, 44-45
sasi, 14
sasi, 24, 86, 111,
 Sato, 123
 Seafood Savers, 87
 sedekah laut, 13, 19
 Selandia Baru, 24
 Sero/lutu, 42-42
set net fishing right, 124
 Sitorus, 8, 81
small scale fisherman, 29
 Soewito, 59-60, 108
 solidaritas mekanik, 14
 solidaritas organik, 14-15
soyu (communal ownership), 122
subsistence fishers, 32
 suku laut, 3-5, 17, 42, 92
 Sulawesi Selatan, 44
 sumber daya hayati laut, 125
 Suncoko, 54, 61, 78, 80, 87, 88
 Suprastruktur, 23
 Suro, 19
 Susenas, 94
- Taiwan, 44
 Taman Nasional, 48
 Tanjung Pinang, 87-88

Sosiologi Masyarakat Pesisir

- tauke, 3, 42
Tenaga Pendamping Desa, 136
tengkulak, 3, 48-49
territorial use right, 118, 122
the poorest of the poor, 92
tipologi nelayan, 6, 31-34, 74-75
tragedy of the common, 118
trawl, 24-25, 57, 63-64, 85-89
tribal community, 12
under capacity, 58
Wakatobi, 60, 87
Wolf, 3, 39
Wright, 66-67
Zanden, 52
ZEEI, 58
zero sum game, 63, 121

TENTANG PENULIS

Arif Satria, lahir di Pekalongan, 17 September 1971, beristrikan Retna Widyawati dengan dikaruniai seorang putra Zafran Akhmadery Arif dan seorang putri Sweetyandari Nidya Areefa, lulus di Fakultas Pertanian (Faperta) Departemen Sosial Ekonomi Pertanian IPB (1995), dan melanjutkan ke jenjang S2 di Program Studi Sosiologi Perdesaan IPB, serta menyelesaikan Program Doktor di bidang *Marine Policy*, Kagoshima University, Jepang.

Sejak tahun 2009 hingga sekarang, ia menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB dan menjabat pada instansi lainnya diantaranya: Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan (2012-sekarang), Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (2010-2014), Anggota Dewan Kelautan Indonesia (2013-2017) dan Anggota Komisi Tuna (2012-2014). Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Riset dan Kajian Strategis IPB (2008-2010), Anggota Komisi Nasional Pengkajian Sumber daya Ikan (2008-2011), dan Wakil Ketua Umum Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (2009-2011).

Selain itu, ia juga aktif dalam beberapa Organisasi Profesi Internasional diantaranya: *American Fisheries Society*, *International Institute for Fisheries Economics and Trade* (IIFET), *International Association for Study of The Commons*, *Japan Regional Fisheries Society*, dan *Japan International Fisheries Research Society*.

Beberapa penghargaan yang pernah ia peroleh diantaranya: 1) Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa 2009 Bidang Ilmu Pengetahuan dan Mendiknas; 2) *The First Winner of the JIFRS Yamamoto Prize for the Best Paper*, pada *International Institute of Fisheries Economics and Trade (IIFET) Conference*, Juli 2008, di Nha Trang Vietnam; dan 3) Penghargaan Akademisi Peduli Penyuluhan dan SDM Perikanan, Kementrian Kelautan dan Perikanan (2013).

Selain buku ini, buku lainnya telah dipublikasikan dalam skala internasional maupun nasional diantaranya: 1) *Managing Coastal and Inland Water: Pre-Existing Aquatic Management System In South East Asia*, ditulis bersama Kenneth Ruddle (2010); 2) *Pre-existing Fisheries Management System in Indonesia*, ditulis bersama Dedi Adhuri (2010); 3) *An Introduction to Pre-Existing Aquatic Management System In South East Asia*, ditulis bersama Kenneth Ruddle (2010); 4) *Errors and Insight*, ditulis bersama Kenneth Ruddle (2010); 5) *Sawen: Institution, Local Knowledge and Myth Fisheries Management In North Lombok* (2007); 6) *Pesisir dan Laut untuk Rakyat* (2009); 7) *Ekologi Politik Nelayan* (2009); 8) *Globalisasi Perikanan: Reposisi Indonesia?*, ditulis bersama Eva Anggraini dan Akhmad Solihin (2009); 9) *Menuju Konservasi Laut yang Pro Rakyat dan Pro Lingkungan*, ditulis bersama Riza Damanik dan Budiarti Prasetiamartati (2006); dan 10) *Dinamika Modernisasi Perikanan: Formasi Sosial dan Mobilitas Nelayan* (2001).

